



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI**

Tahun Sidang	:	2019 – 2020
Masa Persidangan	:	IV (Empat)
Rapat ke	:	3 (tiga)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	LPSK, Komnas HAM dan BNPT
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Selasa, 23 Juni 2020
Pukul	:	10.00 WIB – 16.25 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.
Sekretaris	:	Novianti, S.E.
Acara	:	Membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2021
Hadir	:	A. Anggota DPR RI : 37 dari 51 orang Anggota Komisi III DPR RI dengan rincian:

PIMPINAN

4 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Herman Herry
2. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
3. H. Ahmad Sahroni, SE., M.I.Kom.
4. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M..

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

11 orang dari 11 orang Anggota:

1. M. Nurdin (virtual)
2. Trimedya Panjaitan (virtual)
3. Masinton Pasaribu (virtual)
4. Idham Samawi (virtual)
5. Bambang D.H (virtual)
6. Arteria Dahlan
7. Ichsan Soelistio
8. Marinus Gea (virtual)
9. Wayan Sudirta (virtual)
10. Agustiar Sabran (virtual)
11. H. Safaruddin (virtual)

/2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos, M.Si
2. Ir. H. Sari Yuliaty, M.T
3. Supriansa, SH., MH.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, SH., MH.
2. Romo H.R Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum.
3. Muhammad Rahul (virtual)
4. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H. (virtual)

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M (virtual)
2. Eva Yuliana, M.Si.
3. Ary Egahni Ben Bahat, SH. (virtual)

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

4 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P.
2. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A. (virtual)
3. H. Moh. Rano Al Fath, S.H., M.H.
4. N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, SH., MH., ACCS.
2. H. Santoso, S.H
3. Didik Mukrianto, S.H., M.H.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si.
2. Drs. H. Adang Daradjatun

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. H. Nazaruddin Dek Gam (virtual)
2. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.,

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. H. Arsul Sani, S.H., M.Si.

B. Undangan:

1. Kepala BNN beserta jajaran
2. Kepala BNPT beserta jajaran
3. Kepala PPATK beserta jajaran
4. Ketua LPSK beserta jajaran
5. Ketua Komnas HAM beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/ F.PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pak Hinca mewakili Pimpinan Komisi III,
Yang saya hormati Kepala BNPT beserta seluruh jajaran,
Yang saya hormati Ketua Komnas HAM beserta seluruh jajaran,
Juga yang saya hormati Ketua LPSK beserta seluruh jajaran,
Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas berkenannya jugalah kita hari ini dapat melaksanakan menghadiri rapat dengar pendapat dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat dengar pendapat pada hari ini berdasarkan daftar hadir telah hadir sebanyak 25 Anggota dari 7 Fraksi. Oleh karena itu mungkin kita tidak perlu kuorum ya hari ini karena tidak membuat kesimpulan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib maka perkenankanlah kami membuka rapat dengar pendapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada saudara Kepala BNPT, Ketua Komnas HAM, Ketua LPSK atas kehadirannya memenuhi undangan kami dalam rapat dengar pendapat pada hari ini. Demikian juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang baru hadir maupun yang melalui virtual kami juga mengucapkan terima kasih. Selanjutnya Pimpinan menawarkan dan meminta persetujuan mengenai acara rapat dengar pendapat pada hari ini yaitu:

1. Pembahasan RKA-KL dan RKP-KL tahun 2021,
2. Tanya jawab,
3. Kesimpulan,

Kami juga memohon untuk persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 12.00 WIB siang?

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

(Tidak pakai mic)

KETUA RAPAT:

Saya tawarkan dengan yang lain ayo silakan. Pak Arteri tidak setuju jam 12.00 WIB, yang lain bagaimana kita *sportif* saja.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Kalau tidak Ketua Pimpin sendiri Ketua putusin sendiri.

KETUA RAPAT:

Pak Arteri ini sementara kita tetapkan pukul 12.00 WIB, nanti kita sambung lagi kalau memang masih belum selesai.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Demikian pengantar kami dan untuk mempersingkat waktu kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada BNPT, Komnas HAM, Ketua LPSK untuk menyampaikan menjelaskan, kami persilakan.

Silakan Pak Boy.

BNPT (Dr. BOY RAFLI AMAR, M.H.):

Terima kasih Pimpinan sidang.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syalom om swastiastu namo budaya salam kebajikan.

Terima kasih.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi III DPR RI,

Yang kami hormati seluruh dari Anggota Komisi III DPR RI yang hadir pada hari ini,

Demikian juga para unsur Lembaga yang di undang pada hari ini dari Komnas HAM dan Lembaga LPSK,

Pada kesempatan pertama ini kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami sekaligus mengawali ini kami memperkenalkan diri. Kami baru menjabat tugas selaku Kepala BNPT sejak 6 Mei 2020 yang lalu dan pada hari ini BNPT hadir mendampingi kami selaku kepala seluruh unsur Deputi, Deputi I, Deputi II, Deputi III sementara Sestama kami dijabat oleh Plt. Kepala Biro Perencanaan Pak Bambang yang hari ini ada disamping kanan kami. Izin kami melanjutkan penyampaian kami terkait pembahasan dengan Komisi III DPR RI rapat dengar pendapat tentang RKA-KL dan RKP tahun 2021.

Yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI,

Yang terhormat Anggota Dewan Komisi III DPR RI,

Yang terhormat Pimpinan Lembaga yang hadir pada rapat hari ini,

Sebagai umat yang beragama tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini kita dapat menghadiri

rapat dengar pendapat dengan Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi III DPR RI. Perkenankan kami menyampaikan materi rapat dengar pendapat sesuai surat undangan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW/06931/DPR RI/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 dengan pokok bahasan RKA-KL dan RKP-KL tahun 2021. Dalam kesempatan rapat dengar pendapat ini dapat kami sampaikan pokok bahasan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran BNPT tahun 2019,
2. Alokasi anggaran BNPT tahun 2020,
3. Program kerja 100 hari Kepala BNPT tahun 2020,
4. Rancangan rencana kerja BNPT tahun 2021 dan,
5. Isu-isu strategis tahun 2021,

Realisasi anggaran BNPT tahun 2019 berdasarkan dipa tahun 2019 dengan Nomor SP/Dipa/11/113/01/1.679279/2019 tanggal 11 Desember 2018 jumlah anggaran BNPT tahun 2019 sebesar Rp 699 miliar 598 337 juta pada bulan November tahun 2019. BNPT mendapatkan penambahan anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp 6.618.835.000 sehingga jumlah total anggaran BNPT pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 706.217.172.000. Realisasi anggaran BNPT tahun 2019 berdasarkan laporan sistem akuntansi Instansi BNPT tahun anggaran 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 648.725.271.326 atau capaiannya 91,86% dari total pagu anggaran sebesar Rp 706.217.172.000. Berdasarkan akuntabilitas kinerja dan keuangan BNPT meraih nilai capaian kinerja C pada tahun 2011 sampai dengan 2012, CC pada tahun 2013, 2014 dan B pada tahun 2015 dan 2019. Disamping itu BNPT meraih opini wajar dengan pengecualian di tahun 2012 dan meraih opini tertinggi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sejak tahun 2013 hingga tahun 2019.

Alokasi anggaran BNPT tahun 2020 berdasarkan dipa Nomor SP/Dipa/113.01.1.679279/2020 tanggal 12 November 2019 alokasi anggaran BNPT tahun anggaran 2020 sebesar Rp 516.942.229.000, alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 5 kegiatan penanggulangan terorisme BNPT sebagai berikut:

1. Bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi Rp 188.955.000.183,
2. Bidang penindakan dan pembinaan kemampuan sejumlah Rp 162.147.553.000,
3. Bidang kerja sama internasional Rp 33.826.145.000,
4. Dukungan administrasi dan SDM Rp 128.988.192.000,
5. Pengawasan internal sejumlah Rp 3.024.956.000,

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) maka BNPT mengalami perubahan postur anggaran yang pagu semula sebesar Rp 516.942.029.000 mengalami pemotongan sebesar Rp 76.123.038.000 sehingga anggaran BNPT tahun 2020 menjadi Rp 440.818.091.000 sebagai berikut:

1. Bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi sejumlah Rp 158.505.608.000,
2. Bidang penindakan dan pembinaan kemampuan Rp 137.026.653.000,

3. Bidang kerja sama internasional Rp 27.736.230.000,
4. Dukungan administrasi dan SDM Rp 115.285.883.000,
5. Pengawasan internal Rp 2.263.717.000,

Dalam rencana kerja pemerintah tahun 2020 BNPT termasuk salah satu Kementerian Lembaga yang memiliki kegiatan prioritas nasional yaitu bidang stabilitas pertahanan dan keamanan yang merupakan prioritas nasional ke-5. Kegiatan *output* prioritas nasional BNPT tahun 2020 adalah koordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme sinergitas antar Kementerian Lembaga dalam penanggulangan terorisme. Ketiga program kerja 100 hari Kepala BNPT tahun 2020, pandemi Covid telah mempengaruhi pola kerja dan menjadi tantangan kita bersama dalam berkarya dan beraktifitas. Guna menjawab tantangan tersebut Kepala BNPT mengeluarkan program kerja 100 hari untuk tetap mempertahankan capaian kinerja yang telah ditargetkan dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembentukan BNPT tv-news chanel internet tv,
2. Penyempurnaan road map Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis,
3. Penanganan wabah virus Covid-19 dilingkungan BNPT,
4. Peningkatan kualitas organisasi dan tata kerja BNPT,
5. Percepatan reformasi birokrasi,
6. Intensifikasi kontra propaganda melalui media mainstream online dan medsos serta internet,
7. Pembentukan gugus tugas pencegahan dengan melibatkan unsur utama para alim ulama,
8. Pertemuan dan dialog dengan 100 tokoh daerah nasional dan internasional,
9. Pelayanan rehabilitasi korban terorisme,
10. Penyiapan deklarasi kesiapsiagaan nasional,
11. Penyusunan Peraturan BNPT sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019,
12. Penanganan perempuan dan anak yang berhubungan dengan kelompok terorisme,
13. Konter teroris financing,

Keempat rancangan rencana kerja BNPT Tahun 2021. Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Nomor S376/MK/02/2020 B310/MPPN/D8P/04/02/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 hal pagu indikatif belanja KL tahun anggaran 2021 ditetapkan pagu indikatif BNPT tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp 515.919.440.000 yang terdiri atas:

1. Belanja pegawai sebesar Rp 38.438.164.000,
2. Belanja barang operasional sebesar Rp 30.045.773.000,
3. Belanja barang non operasional sebesar Rp 374.792.000.000,
4. Belanja modal sebesar Rp 72.644.207.000,

Berdasarkan surat bersama Menteri PPN, Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S375/MK/02/2020 dan B308/MPPN/D8/PP/04/03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal daftar program Kementerian Lembaga tahun anggaran 2021 maka program BNPT yang

semula hanya satu yaitu program penanggulangan terorisme menjadi dua yaitu:

1. Program penanggulangan terorisme sebesar Rp 328.268.491.000,
2. Program dukungan manajemen sebesar Rp 192.650.953.000,

Rincian rancangan rencana kerja BNPT tahun 2021 berdasarkan program kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme total seluruhnya alokasi 2021 adalah Rp 515.919.444.000,
2. Program penanggulangan terorisme Rp 323.268.491.000,
3. Bidang pencegahan Rp 158.505.608.000,
4. Bidang penindakan Rp 137.026.653.000,
5. Bidang kerja sama internasional Rp 27.736.230.000,
6. Program dukungan manajemen Rp 192.650.953.000 dengan rincian dukungan administrasi dan SDM Rp 190.387.236.000,
7. Pengawasan internal lainnya Rp 2.263.717.000,

Untuk dapat mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan BNPT telah mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2021 pada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas melalui surat Kepala BNPT Nomor PR/02/01/66/2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal usulan inisiatif baru tahun anggaran 2021 sebesar Rp 361.602.246.000 kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas RI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pengawasan diempat wilayah perbatasan Rp 6.000.000.000,
2. Kegiatan identifikasi korban masa lalu dan masa kini di 12 wiyah Indonesia dan program pemberdayaan sejumlah Rp 4.849.398.000,
3. Peningkatan kemampuan para pelaksana program deradikalisasi dalam melakukan asesmen dan identifikasi terhadap tersangka terdakwa dan narapidana tindak pidana terorisme sejumlah Rp 1.320.436.000,
4. Rencana aksi nasional penanggulan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme atau ran pa sejumlah Rp 2.378.000.00,
5. Peningkatan kapasitas operasional BNPT sejumlah Rp 231.526.412.000,
6. Penyusunan indeks resiko terorisme sejumlah Rp 15.528.000.000,
7. Penguatan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis (Pusdalsis) sejumlah Rp 100.000.000.000,

Kegiatan *output* prioritas nasional BNPT tahun 2021 yang termuat dalam matriks RPJMN 2024 tahun 2024 yaitu prioritas nasional ketujuh memperkuat setabilitas polohukam hankam dan transformasi pelayanan publik dengan rincian sebagai berikut:

1. Deradikalisasi terhadap masyarakat terpapar paham radikal terorisme sejumlah Rp 49.137.232.000,
2. Kegiatan kontra radikalisasi sejumlah Rp 65.315.934.000,
3. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme melalui Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang tersebar diseluruh 32 provinsi baru hari ini sejumlah Rp 32.290.605.000,
4. Kesiapan masyarakat terhadap kesiapsiagaan nasional dalam rangka mengantisipasi tindak pidana terorisme yang dibutuhkan terkait pendanaan

- untuk deklarasi yang kami rencanakan di tahun ini sejumlah Rp550.000.000,
5. Kordinasi kasus tindak pidana terorisme yang berkuatan hukum tetap sejumlah Rp 11.975.993.000,
 6. Sasaran wilayah pelibatan secara terpadu Kementerian dan Lembaga pelaksanaan program penanggulangan terorisme sejumlah Rp 9.240.597.000,
 7. Kordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme sejumlah Rp 3.906.866.000,

Poin kelima isu-isu strategis pada tahun 2021. Selain pelaksanaan kegiatan rutin sesuai tugas dan fungsi BNPT dalam menghadapi tantangan penanggulangan terorisme BNPT telah mengidentifikasi hal-hal strategis yang perlu dipersiapkan pada tahun 2021:

1. Berperan aktif dalam melawan paham radikal terorisme berbasis online.

Mohon izin kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI Komisi III dapat kami laporkan hari ini juga kami telah mengajukan usulan Perpres SOTK untuk organisasi BNPT yang terbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dimana dibidang pencegahan ada 3 tugas besar BNPT:

1. Terkait dengan membangun kesiapsiagaan nasional,
2. Kontra radikalisme,
3. Deradikalisasi,

Oleh karenanya satu hal yang dapat kami sampaikan pada poin nomor satu ini adalah melawan paham radikal terorisme berbasis online. Jadi kita melihat bahwa hari ini penyalahgunaan dari dunia maya cukup tinggi berkaitan dengan penyebar luasan paham-paham ideologi terorisme, intoleran dan radikalisme yang hari ini sangat menghiasi ruang publik kita pada dunia maya dan ini tentulah menjadi tugas salah satu yang dilaksanakan oleh BNPT adalah bagaimana melakukan kontra radikalisme, melawan segala bentuk hal-hal adanya informasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar falsafah bangsa kita pancasila terkait dengan nilai-nilai norma yang ada terkait dengan norma hukum maupun hal-hal yang kita nilai tidak patut yang isinya berisi dengan terkait ujaran kebencian. Oleh karena itu salah satu yang nanti akan diemban dengan organisasi baru adalah adanya Deputi Bidang Kontra Radikalisme.

Yang kedua adalah jaringan terorisme lintas negara. Kita menyadari bahwa terorisme ini adalah juga trans nasional crime. Yang tentunya berkaitan kejahatan terorisme yang terjadi dibelahan dunia lain itu memiliki benang merah terhadap aktifitas dimana mereka menanggapi bahwa ideologi terorisme mereka merupakan satu garis satu paham. Oleh karena itu upaya kita untuk juga melakukan kerja sama terutama dengan rekan-rekan kita dikawasan Asean utamanya dan tentunya dengan beberapa pemangku kepentingan di kawasan Timur Tengah ini menjadi hal yang terus kita tingkatkan. Yang ketiga penanganan deportan dan returnis yang terkait dengan terorisme. Hari ini mereka-mereka yang kena propaganda berangkat ke Irak Suriah atas hasutan propaganda dari isis itu dapat dikatakan yang

sudah masuk antara sekitar 500 mereka ada yang di deportasi dan ada yang dikembalikan oleh negara otoritas setempat. Yang saat ini juga sudah kembali dan kita melakukan langkah-langkah monitoring lanjutan. Kemudian peningkatan kornasi dan sinergitas Kementerian Lembaga. Jadi kami dalam konteks deradikalisasi terutama di luar mereka yang terkait sebagai tersangka, terdakwa napi terorisme kita bersama dengan Kementerian Lembaga membangun beberapa kegiatan yang lebih mengedepankan pendekatan kesejahteraan.

Salah satu contoh yang saat ini dilaksanakan di NTB adalah di Bima kita telah bekerja sama dengan Kementerian PU membangun rusunawa yang nanti akan digunakan masyarakat sekitar yang merupakan hasil mapping kita. Demikian juga kedepan dimulai dengan tahun ini kita akan membentuk semacam agrowisata ikhwan dimana disini melibatkan unsur-unsur masyarakat katakanlah masyarakat di daerah yang terkait dengan aktifitas dari juga keberadaan mantan ex napiter yang nantinya juga merupakan bagian yang kita ikut sertakan. Ada tiga pilot project yang kita tentukan yang pertama adalah Sulawesi Tengah, kemudian NTB dan ketiga Jawa Timur. Proses pembentukan agrowisata ikhwan ini juga tengah dalam pembahasan antara kami dengan Kementerian Lembaga yang terkait. Yang memang kita punya MoU selama lima tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2023 yang melibatkan 38 Kementerian Lembaga.

Yang kelima kelompok radikal masih tetap aktif melaksanakan aksinya melalui propaganda perekrutan baik secara online maupun offline selama masa pandemi Covid-19. BNPT mengkoordinasikan aparat penegak hukum yang ada. Jadi dalam catatan yang kami terima setidaknya-tidaknya dari periode Januari saja sampai dengan bulan Juni itu ada 84 tersangka terkait dengan masalah jaringan kelompok teror yang selama ini dalam pengawasan dalam penyelidikan aparat penegak hukum dan mereka umumnya adalah merencanakan berbagai aksi-aksi termasuk aksi-aksi serangan teror yang berhasil digagalkan. Yang keenam peningkatan kerja sama internasional, dalam hal penanganan kerja sama internasional tentu kita berprinsip tetap menjaga kepentingan nasional, tetap pada format yang tidak merugikan pihak negara, tetap menjaga kedaulatan negara selama kita memiliki visi yang sama dalam hal memerangi kejahatan terorisme kita dengan beberapa negara yang konsen dengan masalah penanggulangan terorisme ini menjalin berbagai kerja sama.

Baik itu yang sifatnya tukar menukar informasi terkait jaringan terorisme global atau pun yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas para personil kita termasuk unsur-unsur aparat penegak hukum. Dimana banyak fasilitas yang mereka tawarkan kami mengakomodir menyusun agenda kerja sama dengan tentunya melibatkan Kementerian Lembaga terkait. Yang ketujuh penyesuaian struktur organisasi BNPT sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Usulan draft sudah kami sampaikan saat ini tentu kami sedang menunggu. Andai ini mendapat persetujuan tentunya nanti BNPT akan terdiri dari 6 Deputi

Pimpinan dan seluruh Ibu/Bapak sekalian,

Hari ini Deputi kami hanya tiga. Dengan 6 (enam) Deputi ini rencana yang akan kita susun adalah:

1. Deputi Sistem dan Kebijakan,
2. Deputi Kontra Radikalisme,
3. Deputi Kesiapsiagaan Nasional,
4. Deputi Bidang Deradikalisasi,
5. Deputi Bidang Penegakan Hukum dan Pemantauan,
6. Deputi Bidang Kerja Sama Internasional,

Jadi pengembangan ini sesuai beban tugas yang diberikan dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 kepada BNPT. Jadi baru pada Undang-Undang inilah BNPT ditugaskan oleh negara, diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut. Termasuk satu hal yang isu strategis yang sedikit kami tambahkan adalah keberadaan Pusat Pengendalian Krisis yang dikordinasikan oleh BNPT. Jadi dalam masa-masa krisis yang kita tentukan kategori situasinya sampai dengan pelibatan Bapak Presiden di dalam pengendalian krisis. Jadi Kepala BNPT berperan sebagai sekretaris dengan melibatkan seluruh Kementerian Lembaga yang ada dan tentunya keberadaan Pusdalsis inilah yang kita berharap akan kita rencanakan kita buat di tahun 2021. Karena melihat dari postur anggaran kami yang tahun 2020 ini memang tidak ada pembentukan belanja modal terkait keberadaan Pusdalsis. Kami berharap di tahun 2021 kita dapat membangun Pusdalsis, dimana peran BNPT adalah mengkordinasikan seluruh Kementerian Lembaga terkait termasuk di dalamnya unsur Polri, unsur TNI dan Aparat Penegak Hukum lainnya.

Untuk selalu menganalisis sebuah kondisi situasi jika terjadi adanya serangan teror sampai kepada tingkat yang *high level* dimana nanti dilaporkan kepada Bapak Presiden dan pelibatan-pelibatan yang diperlukan di dalam penanggulangan teror tersebut. Itulah beberapa isu strategis yang dapat kami laporkan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI dan terima kasih sekali lagi pada kesempatan yang diberikan kepada kami pada rapat dengar pendapat pada hari ini Selasa 23 Juni 2020, atas perhatian dan kerja sama yang baik selama ini kami haturkan terima kasih dan tentunya doa-doa kami kepada Bapak dan ibu semuanya agar dimasa pandemi Covid-19 ini senantiasa diberikan kesehatan kekuatan oleh Tuhan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam mengemban tugas-tugas negara di DPR RI.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Boy Rafli.
Selanjutnya kami persilakan Ketua Komnas HAM.

KETUA KOMNAS HAM (AHMAD TAUFAN DAMANIK):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi menjelang siang.

Bapak Pimpinan yang saya hormati dan seluruh Anggota Komisi III yang kami banggakan,

Rekan-rekan dari BNPT dan dari LPSK,

Sebelum saya memulai mempresentasikan mohon izin Pak Pimpinan untuk kami mungkin memperkenalkan terlebih dahulu karena sekarang sejak tanggal 12 Juni yang lalu sesuai dengan periodisasi di Komnas HAM kami 2,5 tahun kemudian setelah itu harus ada pemilihan saya mungkin perlu sampaikan. Struktur yang baru sekarang ini ada perubahan sedikit Ketua tetap saya, Pak Wakil Ketua Pak Munafrizal Manan, Wakil Ketua Eksternal Pak Amiruddin Rahab, kemudian Hairansyah selaku kordinator untuk sub komisi penegakan bersama beliau ada juga Pak Choirul Anam untuk komisioner bidang pemantauan dan penyelidikan, Pak Munafrizal sekaligus di dalam sub komisi penegakan itu. Untuk kemajuan kordinator sub komisinya Pak Beka Ulung Hapsara sama dengan yang lalu, kemudian ada Ibu Sandrayati Moniaga sebagai komisioner untuk bidang pengkajian dan penelitian, Pak Amirudin sebagai Wakil Ketua Eksternal, sebagai komisioner di pemajuan.

Jadi tetap tujuh tetapi ada sedikit perubahan-perubahan dan itu kami ambil dengan satu musyawarah mufakat tanggal 12 Juni yang lalu, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan rencana kerja kami karena mulai tahun ini juga renstra Komnas HAM itu mengalami perubahan dan sudah kita tanda tangani Peraturan Komisinya Perkomnya nanti saya bacakan beberapa poin-poin pentingnya tetapi juga saya mohon izin Pak Pimpinan. Karena satker Komnas HAM ini kan juga ada Komnas Perempuan. Di dalam RDP kali ini kami juga seperti biasa mengundang Komnas Perempuan untuk hadir tetapi berhubung ada, sebagian ada di luar karena kita punya keterbatasan di dalam ruangan dan tempat duduk karena *distancing*. Jadi tetapi teman-teman Komnas Perempuan sudah hadir beberapa komisionernya dan juga Setjen dan beberapa staf. Kami juga di dampingi oleh Setjen Komnas HAM Pak Tasdiyanto dia sudah 2,5 tahun bersama kami, *alhamdulillah* kita sudah menghasilkan satu renstra baru yaitu renstra Komnas HAM 2020 – 2024.

Visi Komnas HAM sebagaimana kami sampaikan disini terwujudnya Komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini hasil kesepakatan kita dengan mengundang juga tempo hari beberapa pihak eksternal mitra kerja Komnas HAM, teman-teman dari masyarakat sipil, teman-teman pakar dari berbagai universitas. Kita juga mengirim tim kita keliling berbagai daerah untuk menyerap berbagai masukan. Nah misinya yang pertama harus mengutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara. Jadi sebagaimana mandat kami dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 maka Komnas HAM salah satu tugas fungsinya adalah mengharuskan utamakan norma hak asasi manusia karena itu memang di dalam prioritas nasional kami pada tahun ini pun kembali kami mengajukan standar norma kami sebut standar norma tahun lalu juga masuk, tahun juga kami

mengajukan lagi untuk menjadi salah satu program prioritas nasional kami. Kedua membangun keadaban HAM masyarakat jadi ini ada kaitan nanti dengan bagaimana kita melakukan fungsi di kluh kita karena Komnas ada fungsi pendidikan dan penyuluhan soal keadaban hak asasi manusia kepada masyarakat kita tadi juga dijelaskan oleh Pak Rafli misalnya. Satu tren intoleransi konflik antar masyarakat karena perbedaan-perbedaan ideologi, agama, suku dan macam-macam itu semakin menguat karena itu bagi kami kami menganggap keadaban HAM di masyarakat itu juga penting selain kita melihat aparat pemerintah atau aparat negara.

Yang ketiga memperkuat peran strategis Komnas HAM ditingkat nasional dan internasional. Yang baru sebetulnya adalah soal internasional. Tahun ini sesungguhnya sudah direncanakan tempo hari untuk Komnas HAM bersama Kementerian Luar Negeri melakukan apa yang kami sebut sebagai kepada para diplomat-diplomat kita di Eropa. Sudah disepakati waktu itu sekalian Komnas HAM sedang ada satu pertemuan di Genewa tetapi karena Covid kemudian dibatalkan Pak. Kehadiran Komnas HAM di Dewan HAM untuk sidang Dewan HAM waktu itu kita cancel semua. Kita berharap waktu itu masih ada virtual tetapi kemudian juga di cancel. *Insy Allah* mungkin sedang kita rencanakan lagi dengan Kemlu itu sekitar bulan September mudah-mudahan ada satu titik terang dimana Komnas HAM mulai ambil peran internasional. Kemudian ada beberapa MoU sekarang ini yang kita coba mulai lakukan dalam rangka memperkuat peran internasional itu dengan beberapa negara tetangga kita.

Salah satu yang sudah berjalan itu dengan Malaysia dengan Suhakam, Suhakam itu Komnas HAM-Nya Malaysia khusus untuk isu andokumentit yang ada di Sabah Sarawak. Kemudian sedang dalam proses harusnya sudah tanda tangan tetapi karena Covid kita tunda lagi itu dengan Filipin untuk Filipin Selatan karena disitu ada banyak orang-orang Indonesia yang hilir mudik dari Sulawesi bagian Utara kesana dan ada belasan ribu dalam catatan Komnas HAM-Nya Filipin orang-orang yang sebetulnya itu secara natural adalah warga negara Indonesia tetapi karena mereka sudah secara alamiah tradisional selalu bolak balik kebanyakan dari mereka ini tidak mempunyai dokumentasi kewarganegaraan. Itu rencana MoU dengan Filipin tetapi sampai hari ini kita harus tunda lagi karena persoalan Covid. Kemudian mewujudkan Komnas HAM sebagai Lembaga yang mandiri, profesional dalam memastikan pemenuhan perlindungan dengan penegakan hak asasi manusia.

Ini tentu saja ada kaitan nanti dari tujuh isu strategis yang kami pilih salah satunya adalah penataan Kelembagaan. Jadi memang poin yang pertama adalah soal pelanggaran HAM yang terkait konflik agraria. Ini kami jadikan salah satu isu strategis sebagaimana tahun lalu juga karena memang laporan yang masuk atau pengaduan yang masuk Komnas HAM itu paling banyak memang terkait soal konflik agraria. Kemudian pelanggaran HAM yang berat, masih tetap baru saja kita misalnya juga menyampaikan hasil penyelidikan Komnas HAM mengenai dugaan pelanggaran HAM yang berat di Paniai Papua. Kemudian tadi seperti saya katakan penataan Kelembagaan terkait dengan penguatan Kelembagaan staf dan lain-lain. Kemudian isu yang

lalu juga sudah kami masukan, intoleransi dan ekstimisme dengan kekerasan. Yang kami tambahkan yang baru adalah akses atas keadilan ini satu isu strategis yang baru untuk tahun 2020 dan 2021 selanjutnya. Baru kekerasan aparat negara dan kelompok masyarakat jadi kami tidak hanya menyingung soal kekerasan aparat negara tetapi juga kekerasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang ini juga semakin meningkat sehingga kita perlu melakukan suatu langkah-langkah yang strategis untuk mengatasi masalah ini.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya soal kebebasan berpendapat, berekspresi dan bercerita. Jadi ini berkaitan dengan isu hak asasi sipil dan politik yang ditengah-tengah dinamika demokrasi kita ini ternyata juga kadang-kadang ada fluktuasi naik turun. Bahkan ada kekhawatiran dari berbagai masyarakat sipil yang datang ke Komnas HAM memberikan pengaduannya. Meskipun secara umum kami tetap menanggapi bahwa demokrasi Indonesia ini sebetulnya masih tetap *on the track* tetapi kita tentu tetap perlu mencermati perilaku-prilaku tertentu yang kemudian menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, berekspresi dan bercerita. Kemudian kalau kaitan dengan pagu Komnas HAM tahun anggaran 2020 detailnya sebetulnya ada di bahan kami yang lebih tebal, ada dua bahan yang kami sampaikan satu yang naratif, satu yang power point lebih lengkap ada di naratif itu. Nah pagu Komnas HAM untuk tahun anggaran 2020 totalnya itu Rp 104.058.932.000 untuk Komnas HAM karena ini dua Lembaga Komnas Perempuan satkernya di Komnas HAM.

Untuk Komnas HAM Rp 80 miliar 252 juta sekian-sekian. Komnas Perempuannya mendapatkan pagu anggaran Rp 23 miliar 806 juta sekian-sekian. Kalau kita perbandingkan dari tahun 2018, 2019 dan 2020 serta nanti 2021 ada beberapa perkembangan dari segi total pagu anggaran tahun 2018 misalnya itu totalnya Rp 97 miliar 945 juta sekian-sekian serapan kami waktu itu masih 86%. Jadi memang selain dari pihak Komisi III juga pernah menekan kami untuk memperhatikan soal serapan ini, pihak Kementerian Keuangan dan Bappenas juga berkali-kali mengingatkan tetapi memang waktu itu pada saat awal kami sedang membenahi Kelembagaan Pak. Yang kita tahu dulu ada dua tahun sebelum kami masuk disclaimer kemudian tahun pertama kami masuk naik sedikit menjadi WDP kemudian tahun lalu sudah WTP Insya Allah juga mudah-mudahan tahun ini juga bisa WTP lagi. Jadi dalam rangka pembenahan itu memang serapan anggaran kami waktu itu paling maksimum masih 86% tetapi pada tahun 2019 serapan anggaran kita dengan total anggarannya Rp 85 miliar 794 juta sekian-sekian itu naik menjadi 96%.

Mendapat apresiasi dari BPK RI dan juga dari Kementerian Keuangan karena terjadi peningkatan dalam serapan itu. Kemudian untuk pagu anggaran 2020 itu sebesar Rp 104.058.932.000 tetapi ini sebelum ada permintaan dari pemerintah untuk mengurangi anggaran sebesar 15%. Kemudian ini nanti ada kaitan dengan revisi anggaran yang sudah juga kami sampaikan beberapa waktu lalu sesuai dengan permintaan surat dari Pimpinan DPR RI. Untuk tahun 2021 sesungguhnya pagu anggaran Komnas HAM ini menurun Pak dari yang tadi tahun 2020 104 miliar itu sebelum

dikurangi 15% tentu saja, sekarang menurun Rp100.090.000.000 padahal sebetulnya serapan kita meningkat kinerja kita juga meningkat WTP misalnya tadi. Kemudian lakip sakipnya juga meningkat *alhamdulillah* juga tukin kita juga untuk seluruh staf itu juga meningkat sebelumnya 40% sekarang sudah 60%. Nah yang berikut saya lompat saja kaitan dengan catatan tahun anggaran 2020 yang mengalami revisi yang sudah kami sampaikan. Jadi berkaitan dengan penanganan pandemi Covid di Komnas HAM memang ada beberapa penambahan anggaran kami masukan dalam revisi tempo hari terutama karena ada satu surat edaran dari pemerintah yang kemudian di Komnas HAM itu diimplementasikan dengan surat edaran di internal Komnas HAM yaitu perlindungan, kesehatan kepada seluruh staf Komnas HAM, komisioner maupun pegawai tidak tetap atau honorer seluruhnya.

Itu ketika sudah mulai dengan transisi new normal sekarang ini seluruh staf yang sudah mulai masuk diberikan rapid tes untuk memastikan kesehatan mereka. Kalau dia terbukti reaktif maka dilanjutkan dengan swab jadi kita siapkan anggaran 290 juta untuk rapid tes dan swab juga ada keperluan-keperluan lain misalnya kotak desinfectan dan lain-lain itu tadi dalam rencana anggaran yang semula sebelum Covid itu tidak ada sekarang kita ajukan. Kemudian ada beberapa usulan untuk memperbaiki internal dan kinerja Komnas HAM terkait dengan IT tetapi tentu ini kita akan mintakan nanti persetujuan dari Komisi III dan juga tentu dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. Selanjutnya pagu indikatif Komnas HAM tahun 2021 tadi sebagaimana saya katakan ada penurunan sekitar 4 miliar kurang lebih. Untuk Komnas HAM itu pagu indikatifnya Rp 80.252.286.000, untuk Komnas Perempuan Rp 22.739.955.000.

Nah secara singkat kami sampaikan pagu indikatif itu untuk belanja pegawai Rp 32 miliar 353 juta sekian-sekian, belanja operasionalnya Rp 19 miliar 814 juta sekian-sekian, belanja non operasionalnya sebesar Rp 18.084.713.000, sementara program dukungan manajemen totalnya Rp 62.920.770.000, untuk program peningkatan kemajuan dan penegakan HAM Rp 37.169.330.000. Nah rencana kerja anggaran dan anggaran tahun 2021 itu kami sampaikan secara detail disini dibahan yang naratif juga kami sampaikan itu ada terkait dengan penguatan kesadaran HAM masyarakat dan aparaturnegara Rp 5,5 miliar lebih, penyelesaian kasus pelanggaran HAM Rp 20 miliar lebih, pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak anak hak korban ya itu Rp 22.739.985.000 kalau nantiizinkan kami bisa mintakan Komnas Perempuan untuk mendetailkan Pak karena ini ranahnya ada di Komnas Perempuan kebetulan satkernya ada di Komnas HAM.

Kemudian peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan Rp 4 miliar lebih, penyelenggaraan layanan perkantoran, kepegawaian, perundang-undangan dan bantuan hukum itu Rp 58.834.869.000. Nah kemudian yang berikut ini ada kebutuhan yang belum teralokasi sebetulnya pernah dulu disampaikan oleh Komnas HAM tentang kekurangan gaji kemudian pelayanan fungsi Komnas HAM di manca negara, pesipalham ini kita ajukan dulu satu perubahan karena ini program yang sangat penting menjadi 5,8. Sekarang kita sedang bernegosiasi lagi dengan pihak Bappenas agar kita

disetujui untuk meningkatkan anggaran festival HAM ini, Bappenas meminta kita untuk memberikan satu tor baru yang menjelaskan urgensi dari program festival HAM ini. Kemudian rekomendasi usulan konsep penanganan dan atau penyelenggaraan konflik agraria Rp 2,5 miliar. Nah dulu pernah kami ajukan itu soal renovasi gedung Komnas HAM ini 361 miliar lebih tetapi sampai hari ini belum mendapat persetujuan Pak dari pihak pemerintah. Kami akan kembali mencoba meyakinkan pihak pemerintah agar disetujui, tentu saja kami sangat memintakan dukungan dari pihak Komisi III dan khususnya dan secara umum tentu saja Pimpinan DPR RI agar memberikan dukungan kerana kondisi dari gedung Komnas HAM itu sudah kurang memadai untuk kami dalam menjalankan tugas dan fungsi kami dalam melayani masyarakat maupun dalam bekerja sehari-hari karena jumlah staf PNS-Nya atau ASN-Nya ditambah yang PPNPN yang honorer itu sudah hampir 400 orang Pak jumlahnya.

Tahun lalu kami mendapat tambahan 120an ASN baru, tahun ini sedang dalam proses kita mendapat memang tidak banyak hanya 15 ASN baru nantinya. Saya kira kurang lebih ini Bapak Pimpinan sekali lagi terima kasih dan mohon izin kalau diizin waktu teman-teman dari Komnas Perempuan mungkin kurang lebih 5 menit menyampaikan yang lebih detail yang khusus tentang Komnas Perempuan tadi karena ini merupakan ranah mereka meskipun tadi saya sampaikan secara umum karena satker dari Komnas Perempuan itu adanya di Komnas HAM Pak, mohon izin Pak.

KOMNAS PEREMPUAN (THERESIA SRI ENDRAS ISWARINI):

Terima kasih

Mohon izin Pimpinan maaf ini ketutup sama laptop sama pc sama disini Pak.

Saya Theresia Sri Endras Lswarini sebelumnya terima kasih Pak Taufan sebagai Pimpinan Komnas HAM mempersilakan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Saya adalah salah satu Pimpinan transisi dari Komnas Perempuan. Kami saat ini adalah komisioner baru dari ada sekitar 15 mohon maaf karena baru hanya saya yang bisa hadir. Saya sebenarnya bersama satu teman lagi komisioner mohon maaf tidak bisa hadir tetapi senang sekali saya bisa memaparkan beberapa hal. Mungkin agak sedikit lebih panjang tetapi saya berusaha 5 menit.

F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Interupsi Ketua.

Saya mau tanya Komnas Perempuan berapa orang yang hadir?

KOMNAS PEREMPUAN (THERESIA SRI ENDRAS ISWARINI):

Dua sebenarnya komisioner lalu kemudian ada Setjen.

F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Berapa orang semuanya?

KOMNAS PEREMPUAN (THERESIA SRI ENDRAS ISWARINI):

Semuanya ada 15.

F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

15 orang, yang datang satu orang?

KOMNAS PEREMPUAN (THERESIA SRI ENDRAS ISWARINI):

Yang datang satu orang sebenarnya yang hadir disini dua orang.

F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Jangan sebenarnya, yang ada sebenarnya.

KOMNAS PEREMPUAN (THERESIA SRI ENDRAS ISWARINI):

Yang sebenarnya ada dua orang disini.

F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Menurut saya 15 orang 2 hadir lewatkan saja Ketua.
Terima kasih.

KOMNAS PEREMPUAN (THERESIA SRI ENDRAS ISWARINI):

Mohon maaf Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kasih 5 menit bu silakan singkat.

KOMNAS PEREMPUAN (THERESIA SRI ENDRAS ISWARINI):

Betul ini saya juga harus menyatakan bahwa kehadiran saya disini adalah juga karena bagian dari satker Komnas HAM. Jadi minta maaf karena saya mewakili dari kehadiran dari Komnas Perempuan tetapi menurut saya menjadi sangat penting. Saat ini memang Komnas Perempuan dengan segala kerja-kerjanya berdasarkan Perpres yang sudah diberikan yaitu Perpres 65 Tahun 2015 kami memang masih memiliki tugas dan kewenangan yang tidak jauh berbeda dari pada yang sudah digariskan dan peran strategis kami adalah sebagai pemantau dan pelapor pusat pengetahuan atau center inisiator perubahan, moderator dan negosiator pemenuhan hak korban dan fasilitator pengembangan kapasitas, jaringan lokal dan internasional. Dari semua kerja-kerja kami kami mendapati bahwa kami punya banyak sekali potensi dan permasalahan yang harus kami petakan dan kami mendapatkan informasi berdasarkan aduan yang masuk ke kami jumlah kekerasan

terhadap perempuan di tahun 2019 itu 431.000 jadi ini meningkat dari tahun 2018.

Kemudian kondisi layanan bagi perempuan korban kekerasan juga menghadapi tantangan terutama pada saat Covid-19 ini. Kami juga sedang mengembangkan sebuah kajian-kajian sudah melakukan survei online dan memang mendapati bahwa beban kerja perempuan itu bertambah saat di rumah saat Covid dan juga laporan kepada pengada layanan itu menjadi berkurang juga dan ini kami sedang bekerja bersama dengan KPPA karena kami juga ingin membantu KPPA untuk mengembangkan pengada layanan. Lalu juga soal kebijakan diskriminatif ini belum tertanggulangi masih ada 421 kebijakan diskriminatif yang merugikan perempuan dan pada tingkat Asia ini menurut saya menjadi penting untuk melihat bahwa situasi Indonesia ditingkat Asia ini juga mengalami satu tantangan tersendiri kita masih punya konflik dan bencana, lalu kemudian ada infeksi baru HIV, kemudian juga ada pandemi ini dan kami juga mempunyai peta jalan tahun 2020 – 2045 bahwa di tahun 2045 perempuan Indonesia aman, sentosa dan berdaulat.

Ini sebenarnya sejalan juga dengan visi Presiden terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Nah kemudian dari peta jalan itu kami membuat semacam prioritas agar pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban itu ada. Jadi kalau tadi Pak Taufan mengatakan bahwa ada satu program yang kami masukan di dalam Komnas HAM itu adalah pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban dan itu menjadi arah perubahan kerja kami sebenarnya di tahun 2020 sampai 2024 itu pembaharuan dan konsen nasional untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Nah dari arah perubahan itu kami kemudian menurunkan dalam skema program jadi kalau mohon maaf semua dokumen sudah kami berikan di Sekretariat Komisi III mungkin nanti bisa disampaikan. Karena tadi disampaikan jumlah total tahun 2021 pagu indikatif yang akan kami sampaikan adalah sebesar Rp 22.739.985.000 itu digunakan untuk 4 prioritas nasional.

Jadi ada pemantauan pelaksanaan SPPTPKKTP itu adalah sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang sekarang kita sedang mencoba untuk mendorong peradilan pidana terpadu itu betul-betul memberikan ruang bagi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, lalu ada harmonisasi kebijakan kemudian ada dukungan dan perlindungan terhadap perempuan pembela HAM jadi kalau pendamping pada layanan itu kami kategorikan sebagai perempuan pembela HAM, kemudian juga ada penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan. Ini adalah menjadi mandat kerja kami selama tahun 2020 – 2045 dan pagu indikatif itu kami masukan karena kita dalam proses-proses ini juga ada pertemuan-pertemuan dengan Bappenas sehingga ada beberapa hal seperti tadi yang dikatakan ada proses adjustment penyesuaian-penyesuaian terhadap anggaran sehingga kami juga harus melakukan banyak rimeping. Nah tetapi pada akhirnya kami mengajukan satu program lalu satu kegiatan

yaitu tadi pencegahan dan penanganan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban.

Ada empat sasaran pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penanganan dan pemulihan bagi korban, pemantauan dan kajian

KETUA RAPAT:

Ibu satu menit lagi ya.

KOMNAS PEREMPUAN (THERESIA SRI ENDRAS ISWARINI):

Iya Pak.

Daya tanggap Komnas Perempuan dan kemudian dari situ kami juga mengusulkan ada penambahan untuk dana Komnas Perempuan karena kita melihat bahwa pasca pandemi ini ada banyak sekali perubahan-perubahan termasuk dalam konteks teknologi informasi, penguatan infrastruktur, pengembangan sistem diklat, penerimaan pengaduan dan tugas fungsi Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Sehingga kami mengusulkan untuk penambahan sekitar 4,5 miliar lagi tambahan alokasi program prioritas Lembaga Pelaksanaan Mandat dan Tusi Rp 2.900.000.000, lalu ada belanja operasional sebesar Rp 1.342.000.000 dan tambahan belanja modal untuk tik sebesar Rp 350.000.000. Jadi total jumlah yang kami minta itu sebenarnya hanya 27,3 miliar jadi ini hanya karena ini menurut kami dengan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang masih terus ada sekarang ini sudah 22 juta itu memang sebenarnya tidak mencukupi tetapi kami mencoba untuk diling dengan ini. Demikian Pimpinan kami sampaikan, sebelumnya terima kasih dan salam nusantara.

KETUA RAPAT:

Baik ibu terima kasih.

Terima kasih juga kepada Pak Taufan, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala LPSK.

Silakan.

KETUA LPSK (Dr. HASTO ATMOJOYO SUROYO, M.Krim):

Yang terhormat Ketua Komisi III DPR RI,
Para Wakil Ketua Komisi III DPR RI,
Para Anggota Komisi III DPR RI,
Juga Ketua Komnas HAM dan Kepala BNPT,
Serta hadirin sekalian,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak dan Ibu sekalian,

Karena ini adalah kali pertama kita bertemu setelah Idul Fitri meskipun ini sudah masuk ke bulan Zulhijah saya tetap mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dalam pergaulan dan bekerja selama ini. Yang kedua saya ingin memperkenalkan diri lebih dulu nama saya Hasto Atmojo Suroyo sekarang Ketua LPSK dan saya di dampingi oleh dua orang Wakil Ketua LPSK kami ada 6 Wakil Ketua kebetulan yang dua bisa mengikuti adalah Pak Edwin Partogi Pasaribu dan Ibu Susilaningtias. Empat Wakil Ketua yang lain tidak bisa hadir dipertemuan ini tetapi mengikuti pertemuan ini melalui *teleconference* di kantor. Tidak bisa hadir karena memang ada informasi dari penghubung Sekretariat Komisi III bahwa tempatnya terbatas.

Bapak dan Ibu sekalian,

Pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya kita diberi kesehatan ditengah pandemi Covid-19 dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang telah mengundang kami untuk rapat dengar pendapat dengan agenda pembahasan RKA-KL dan RKP-KL tahun 2021.

Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,
Serta hadirin sekalian yang berbahagia,

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini dari sisi anggaran LPSK masih merupakan satuan kerja pada bagian anggaran Kementerian Sekretariat Negara yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada saksi dan atau korban tindak pidana. Saat ini kami sedang dalam proses transisi untuk menjadi bagian anggaran sendiri atau organisasi yang mandiri. Nanti barang kali kalau memang diperlukan mungkin Pak Setjen ini saya di dampingi Pak Setjen Dr. Nursidarta nanti mungkin bisa menjelaskan prosesnya sampai dimana transisi untuk menjadi bagian anggaran sendiri ini.

Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati,
Serta hadirin sekalian,

Pada tahun 2020 LPSK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 54.558.755.000 yang kemudian dilakukan penyesuaian karena adanya pandemi Covid-19 kami mengalami pemotongan anggaran sehingga anggaran kami untuk tahun 2020 ini adalah sebesar Rp 45.842.457.000. Sampai dengan 20 Juni 2020 LPSK telah melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp 21.176.285.641 atau setara dengan 46,19% dari anggaran sebesar Rp 45 miliar 800 juta sekian. Sisa anggaran yang ada sebagian besar merupakan anggaran rutin seperti gaji dan operasional kantor. Sedangkan keperluan layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan atau korban sampai saat ini kami tinggal memiliki Rp 3,3 miliar dan itu harus kami belanjakan sampai akhir tahun 2020. Sebagai bandingan pada tahun 2019 anggaran untuk layanan pada saksi dan korban ini kami menghabiskan anggaran sekitar Rp 25 miliar. Jadi kalau sampai pertengahan tahun ini tersisa anggaran layanan itu 3,3 miliar kalau dibandingkan tahun 2019 yang

25 miliar itu satu semester kan paling tidak 12,5 miliar ini situasi yang sangat memprihatinkan bagi kami.

Untuk menghadapi situasi ini sebenarnya kami sudah melakukan berbagai upaya. Kami melakukan loby kepada Wakil Presiden RI, Ketua DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet dan juga Kepala Kantor Staf Presiden. Hal yang sama juga kami sering sampaikan kepada beberapa Anggota Komisi III ini dalam berbagai kesempatan tentang daruratnya anggaran di LPSK ini. Mengingat angka 3,3 miliar yang tersisa untuk layanan pada para saksi dan korban sampai Desember kami khawatir belum sampai bulan Desember nanti kami harus melakukan moratorium layanan kepada saksi dan korban. Sementara ini dalam waktu yang baru saja kami sudah menerima permohonan perlindungan untuk kasus TPPO anak buah kapal China yang di Korea iu dan juga terjadi dua kasus terorisme yang baru saja terjadi yaitu di Kalimantan Selatan dan di Karanganyar Jawa Tengah dan ini tentu saja yang kasus TPPO ABK sudah menjadi terlindung kita dan kasus terorisme Kalimantan Selatan ini sudah menjadi layanan kita tetapi yang Karanganyar baru besok kami akan berangkat untuk menghubungi para korban yang menjadi korban di Karanganyar.

Pada tahun 2020 LPSK seperti yang tadi sudah digambarkan mengalami kesulitan anggaran yang cukup serius. Minimnya anggaran pelaksanaan program perlindungan mendorong LPSK melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain kami melakukan penghentian program perlindungan untuk kasus-kasus yang memang agak stakan. Setidaknya pada bulan Mei Juni ini LPSK telah menghentikan perlindungan pada 838 terlindung sehingga jumlah terlindung hingga 15 Juni 2020 tersisa sebesar 1.423 terlindung dengan total layanan sebanyak 2.495. ini karena satu orang terlindung itu tidak hanya menerima layanan satu jenis layanan tetapi kadang-kadang ada dua tiga jenis layanan sehingga jumlah layanan ini lebih banyak dari jumlah terlindungnya.

Penghentian terhadap sebagian besar terlindung ini masih belum menyelesaikan persoalan keterbatasan anggaran LPSK. Berbagai upaya lainnya dilakukan seperti menyusun proyeksi kekuatan anggaran dalam melaksanakan program perlindungan dan melakukan metode penelaahan permohonan dengan menetapkan skala prioritas yang ketat. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi permohonan saksi dan korban yang mengajukan perlindungan. LPSK saat ini menerapkan kebijakan mengevaluasi sejumlah terlindung sesuai dengan jumlah kecukupan dan ketersediaan anggaran dengan mempertimbangkan terlindung baru yang akan masuk. Jadi selain mempertimbangkan layanan kita terhadap terlindung yang sudah menjadi terlindung LPSK kita tetap mempertimbangkan permohonan baru meskipun dengan pertimbangan yang sangat ketat. LPSK saat ini sangat membutuhkan dukungan tambahan anggaran selain untuk terlindung yang sudah masuk program maupun untuk terlindung baru yang akan dilayani.

Selain itu terdapat kebutuhan anggaran untuk pembiayaan pembayaran kompensasi terhadap korban terorisme pada peristiwa yang terjadi di Poso, Sibolga, Mako Brimob, Wonokromo dan Pandeglang dengan nilai Rp 5.646.627.520 ini adalah mandat dari Undang-Undang yang mau tidak mau sebenarnya kami harus melaksanakan pembayaran kompensasi ini. Dengan keterbatasan ini LPSK telah mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan melalui Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp 127 miliar. Saat ini proses usulan tersebut masih dalam penelaahan di Biro Perencanaan dan Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara. Dengan adanya tambahan anggaran tersebut diharapkan LPSK dapat melaksanakan layanan sampai akhir Desember tetapi kita belum tahu nasib dari permohonan akan biaya tambahan ini.

Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati,
Serta hadirin sekalian,

Berdasarkan surat sekretaris Kementerian Kesekretariat Negara Nomor B7/KemenSetneg/Ses/PR00.02/05/2020 perihal pagu indikatif bagian anggaran 007 anggaran 2021. LPSK saat ini mendapatkan pagu indikatif untuk tahun 2021 sebesar Rp 79.417.515.000 dari usulan awal sebesar Rp 237 miliar 19 juta 3017. Nilai pagu indikatif tersebut belum dapat mengakomodasikan kebutuhan biaya untuk bayaran kompensasi tindak pidana terorisme masa lalu yang kami prediksi mencapai Rp 44,150.000.000. Ada pun pelaksanaan ini masih menunggu terbitnya peraturan terkait perubahan PP Nomor 7 Tahun 2018 yang sampai sekarang belum di tanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia. Padahal sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pelaksanaan pembayaran kompensasi kepada korban masa lalu ini diberi batas 3 tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Ini diundangkan tahun 2018 artinya tahun 2021 itu harus sudah selesai tetapi PP-Nya sampai sekarang belum ditanda tangani dan kami sudah mencoba menginformasikan pada Pak Presiden melalui berbagai pihak bahwa PP ini harus segera ditanda tangani. Anggaran tahun 2021 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan LPSK dalam rangka meningkatkan aktifitas perlindungan saksi dan korban. Ada pun rincian rencana kerja LPSK tahun 2021 adalah sebagai berikut Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Sekretariat Negara karena sampai saat ini kita secara anggaran masih menjadi bagian dari Sekretariat Negara.

Kegiatan pemberian layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban dan output satu layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban sebesar Rp 23.067.690.000 yang terdiri atas penerimaan permohonan investigasi dan persidangan sebesar Rp 7.100.000.000 kira-kira ini meliputi kegiatan penerimaan permohonan, investigasi, asesmen asesmen ini untuk medis maupun pepsikologis, pelaksanaan sidang paripurna, perlindungan darurat, gelar, kasus, pengembangan aplikasi penerimaan permohonan, revisi SOP, standar layanan dan juga tim reaksi cepat serta monitoring tindak lanjut rekomendasi. Mengenai tim reaksi cepat

ini saat ini kami sudah membentuk satu satgas untuk bisa memberikan reaksi cepat terhadap kasus-kasus terorisme kami sebut tim ini tim sakti (Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia). Tim sakti ini juga berkordinasi dengan BNPT sehingga kalau terjadi satu tindak pidana sebagaimana yang terjadi di Kalimantan dan juga Karanganyar kami langsung melakukan kordinasi dengan BNPT. Untuk di Kalimantan Selatan kemarin kami turun bersama, di Karanganyar ini hari ini BNPT berangkat kami besok berangkat. Yang kedua pemenuhan hak saksi dan korban sebesar Rp 16 miliar sekian ini meliputi layanan perlindungan saksi dan korban sebesar 7,3 miliar dan layanan bantuan medis pepsikologis dan siko sosial sebesar 7,3 miliar, fasilitasi kompensasi dan restitusi sebesar 1,3 miliar, rapat kerja sebesar Rp 185.690.000.

Output dua layanan dukungan manajemen sebesar Rp 13.100.000.000 kira-kira, ini terdiri atas beberapa kegiatan penyusunan peraturan kerja sama penelitian dan kehumasan sebesar Rp 4 miliar kurang lebih. Dua perencanaan laporan dan keuangan sebesar Rp 1.659.000.000, pengelolaan rumah tangga kepegawaian pendidikan dan latihan dan teknologi informasi Rp 2.400.000.000 kira-kira, tata usaha pesuratan dan protokol sebesar Rp 3 miliar, pengawasan internal sebesar Rp 1.300.000.000 dan pembiayaan LPSK perwakilan di daerah saat ini kita sudah mempunyai dua perwakilan yaitu di Yogya dan di Medan untuk Sumatera Utara sebesar Rp 642 juta. *Output* tiga yakni sarana dan prasarana internal sebesar Rp 1.400.000.000 yang terdiri atas beberapa kegiatan yang pertama pengaaan kendaraan bermotor sebesar Rp 26.600.000, pengadaan perangkat pengelolaan data dan komunikasi perwakilan sebesar Rp 593 juta, pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran perwakilan LPSK sebesar Rp 750 juta, pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan untuk LPSK perwakilan sebesar Rp 50 juta.

Output empat yaitu layanan perkantoran sebesar Rp 41.565.000.000 yang diantaranya berisi pembayaran gaji dan tunjangan sebesar kurang lebih Rp 17 miliar dan operasional dan pembelian kantor kurang lebih Rp 24,5 miliar.

Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati,
Serta hadirin sekalian yang berbahagia,

Sehubungan dengan jumlah pagu indikatif yang berdasarkan perhitungan kami tidak mencukupi kebutuhan anggaran LPSK di tahun 2021. Kami sampaikan pula LPSK melalui Kementerian Sekretariat Negara sedang mengusulkan inisiatif baru penambahan pagu indikatif untuk tahun 2021 kepada Menteri Keuangan sebesar Rp 83.729.000.000. Rencana program dan kegiatan real atas usulan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk yang pertama pelaksanaan layanan asesmen, penilaian derajat luka korban, tindak pidana terorisme masa lalu sebesar Rp 1.150.000.000. Kami membuat patokan skema untuk pembayaran kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu ini dengan skema derajat luka berat, luka menengah, luka ringan sehingga pembayarannya menjadi tidak terlalu besar menjadi tanggungan dari negara. Yang kedua, pelaksanaan pemberian kompensasi

korban tindak pidana terorisme masa lalu sebesar Rp 44.150.000.000. Ini kami ancar-ancar dari data yang kami terima dari BNPT ada sekitar 800 korban tindak pidana terorisme masa lalu yang harus dibayarkan kompensasinya oleh negara dengan nilai Rp 44.150.000.000 ini. Pelaksanaan investigasi dan asesmen bagi korban terorisme di luar negeri sebesar Rp 1.500.000.000. Ini kosekuensi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2018 yang kemudian turunannya PP pengganti PP Nomor 7. Keterlibatan Kementerian Luar Negeri kemudian mengusulkan agar LPSK juga memberikan perhatian kepada para korban tindak pidana terorisme di luar negeri. Oleh karena itu kami menganggarkan untuk melayani korban terorisme di luar negeri ini apabila terjadi dan memang sebenarnya sudah pernah terjadi. Empat, penguatan layanan bantuan medis dan ppsikologis korban kejahatan sebesar Rp 12.350.000.000.

Bapak dan Ibu sekalian,

Sebagai dampak dari disahkannya Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dimana BPJS tidak lagi membiayai korban kejahatan. Kemudian ini berdampak pada peningkatan permohonan bantuan medis korban kejahatan pada LPSK. Bahkan sering kali BPJS justru memberikan rekomendasi bahwa ini sudah ada Lembaga yang menanggung yakni LPSK. Oleh karena itu kami saat ini mengalami kesulitan menghadapi para korban yang demikian ini. Kita bisa membayangkan kalau seluruh korban tindak kejahatan yang tidak mendapat bantuan medis lagi dari BPJS kemudian dirujuk pada LPSK sementara LPSK adalah bukan Lembaga Penjamin seperti BPJS tentu LPSK akan mengalami kesulitan. Ini juga kami akan mengkosultasikan nantinya kepada Bapak-bapak dan ibu di Komisi III bagaimana menyikapi dampak dari Perpres 82 Tahun 2018 ini. Yang kelima, pelaksanaan fasilitasi kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme ini tentu saja untuk korban-korban yang tindak pidana yang baru.

Kemudian yang keenam pelaksanaan layanan pemenuhan hak prosedural sebesar Rp 4.150.000.000 ini seperti biasanya. Peningkatan layanan bantuan rehabilitasi psikologis melalui pembentukan sekretariat nasional pemenuhan psikososial korban sebesar Rp 1.550.000.000. Peningkatan dan penguatan layanan fasilitasi restitusi yang meliputi perintisan jaringan kerja sama, penanganan restitusi dengan Gakum dalam rangka restorasi *justice* dan pembuatan metode penghitungan restitusi sebesar Rp 2.230.000.000.

Bapak dan Ibu sekalian,

Saya ingat pada saat kami mengikuti seleksi di Komisi III ini salah satu pertanyaan kunci yang diajukan oleh para Anggota pada waktu itu adalah tentang penanganan

KETUA RAPAT:

Pak Ketua biar bisa cepet sedikit Pak.

KETUA LPSK (Dr. HASTO ATMOJOYO SUROYO, M.Krim):

Oh iya maaf.

Ini layanan untuk kegiatan untuk menguatkan peran LPSK dalam menangani *justice* kolaborator atau pelaku yang bekerja sama seperti sekarang sedang terjadi kontroversi antara KPK dengan Dirjen HAM soal Dirjen PAS tentang status *justice* kolaboratornya Nazarudin. Sebenarnya kalau merujuk pada Undang-Undang LPSK itu mestinya LPSK yang diberi peran untuk itu. Sosialisasi pelaksanaan hak korban terorisme, penguatan kerja sama internasional akhir-akhir ini kita sedang sudah mulai merintis kerja sama dengan Kedutaan Besar Australia Departemen Of Justice dari Amerika dengan UNTB dan juga Europol bahkan nanti tahun 2021 kami akan menjadi Host atau Co Host untuk meetingnya Europol yang kami akan selenggarakan di Pulau Bali. Yang kesebelas pengembangan perlindungan hukum dan penghargaan bagi pelapor termasuk perlindungan dan pengadaan terhadap masyarakat yang berperan dalam mengungkap kasus korupsi. Yang keduabelas penguatan Kelembagaan untuk menjadi Badan Anggaran sendiri karena ini memerlukan anggaran tersendiri, persiapan kita untuk menjadi Badan Anggaran sendiri. Yang ketiga belas peningkatan SDM dan keempat belas pengadaan sarana pendukung.

Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati,

Sebagai informasi LPSK sejak tahun 2008 sampai sekarang masih menjadi bagian satker dibawah Kementerian Sekretariat Negara yang saat ini sedang diproses agar kami menjadi bagian anggaran sendiri yang Insya Allah kalau itu sudah terjadi pada tahun ini nanti kami akan menjadi mitra dari Komisi III sepenuhnya baik secara subtransi maupun secara anggaran. Kalau saat ini kami merasa kesulitan karena secara substantif kami menjadi mitra Komisi III tetapi untuk anggaran kami menjadi mitra Komisi II karena kami adalah bagian dari satker Sekretariat Negara.

Bapak dan Ibu sekalian,

Saya kira demikian penjelasan singkat dari saya terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon masukan dari Bapak dan Ibu para Anggota Komisi III.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hasto.

Bapak/Ibu Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat,

Kita telah mendengar paparan dan penjelasan dari BNPT, Komnas HAM maupun dari LPSK. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak/Ibu Anggota Komisi III untuk melakukan pendalaman. Sebelumnya kami perlu

sampaikan informasi bahwa jadwal hari ini kita membahas fungsi anggaran bukan fungsi pengawasan. Kami persilakan

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Itu harusnya Ketua lebih tegas dari tadi karena banyak yang dibahas juga bukan fungsi anggaran. Jangan Anggota yang diingetin Ketua, mitra juga diingatin.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pertama-tama Ketua saya ingetin juga Ketua bahan-bahan itu diberikan jangan saat ini jadi tidak ada ruang bagi kita untuk melakukan koreksi. Kesepakatan Komisi III kan minimal 1 x 24 jam materi itu diberikan ke kita. Kita juga mau periksa apa ini pura-pura semua. Kemudian satuan tiganya mana berkali-kali Pak harusnya dibagikan ke kita juga. Apa yang mau kita evaluasi kita tidak tahu arah, kebijakan maupun program. Kita tidak tahu juga anggarannya sudah cukup, berlebih atau kurang. Semuanya minta menambah anggaran tetapi kita tidak bisa melihat ini benar tidak anggarannya. Yang tahu anggarannya sudah terserap sekian persen begitu. Ini saya pertama ke BNPT ini. Pak Kepala BNPT kan orang baru Pak saya minta Bapak harus paham tentang BNPT. Kemudian juga komunikasi dengan DPR RI harus bagus, ikuti yang kemarin-kemarinlah. Pasca Undang-Undang Teroris BNPT itu kordinator Pak.

Jadi kerja, giat, program terkait dengan pemberantasan penanggulangan terorismenya posturnya berbeda dengan yang kemarin sebelum Undang-Undang dilahirkan. Karena Bapak merupakan fungsi kordinator paling tinggi Pak tetapi yang disini sama saja tidak kelihatan makannya Bapak tidak mempunyai visi saya lihat. Tidak terlihat program kebijakan strategis dan fokus sasaran yang mau diambil. Saya minta betul ini tolong diperhatikan sama ini dari tahun ke tahun. Padahal disini ditegaskan baru halaman pertama Pak teroris merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan *bla, bla, bla, bla*.

Kemudian juga saya ingin sampaikan disini dituliskan fungsi BNPT Pasal 43F bagaimana kordinasi kebijakan strategi program nasional tidak kelihatan juga disini tidak kelihatan ini mohon maaf Pak. Apa lagi kita bicara kebijakan 100 hari, kebijakan 100 harinya. Saya pikir BNPT bukan badan baru tetapi seolah-olah ini baru semua, desain seragam dinas, penyiapan peta proses bisnis, analisa intelegent, pengelolaan IT, SDM dan sebagainya.

Ini tinggal melanjutkan kok yang kemarin sudah bagus itu Bang, sudah bagus tidak usah diiniin lagilah. Kemudian juga bagaimana terkait dengan program-program 100 hari yang lain ini pada poin 6, intensifikasi kontra propaganda sudah dihadirkan pertemuan dan dialog dengan 100 tokoh.

Penyiapan dekorasi kesiapsiagaan nasional ya inilah yang mengakibatkan bagaimana kita pemberantasan terorismenya tidak begitu efektif karena kerja-kerjanya kerja-kerja permukaan Pak. Ini saya mohon sekali program 100 harinya ini juga dilihatlah bagi saya ini mohon maaf Pak ini agak mengecewakan ini.

Berikutnya juga mengenai pengungkapan jaringan terorisme, ini satu kegiatan operasi alokasinya sekian. Ini kaitannya dengan nanti ada lagi Pak bagaimana dengan kegiatan pengendalian krisis saat tindak pidana teroris terjadi. Kaitan dengan operasi intelijen jaringan terorisme. Ini semua ada nomen kulturalnya anggarannya semua. Pertanyaan saya ini satu-satu atau satu bisa jadi dibiayai oleh tiga nomenklatur ini Pak.

Kemudian berkali-kali kita dalam rapat tahun-tahun sebelumnya penanggulangan terorisme bidang internasional kerja sama internasional. Ini ada tiga nomenklatur. Ini ngapain saja ini di tiga nomenklatur itu halaman 11. Ada pelaksanaan kerja sama bilateral 9 kerja sama, pelaksanaan kerja sama regional dan multilateral 13 kerja sama, partisipasi aktif di forum 8 rekomendasi kebijakan nilainya juga relatif besar-besar.

Posturnya ini kan juga sudah menyedihkan jadi yang untuk kerja sendirinya sedikit. Nah kemudian tiba-tiba pada halaman 12 minta tambahan anggaran lagi 361 miliar. Ini meminta dari yang tadi 516 artinya meminta sekitar 60 atau 70% tambahan. Yang menjadi pertanyaan disini adalah timbul yang namanya 7 program yang belum teralokasi Pak. Saya boleh tidak tanya kenapa tidak yang ini dimasukkan ke dalam dulu saja kalau memang ini dirasakan lebih penting Pak. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pengawasan di 4 wilayah perbatasan toh angkanya 6 miliar. Kemudian juga apa iya kegiatan identifikasi korban masa lalu dan masa kini di 12 wilayah di Indonesia dan pemberdayaan ini kaya begini ini kan bisa dilakukan sinergitas atau digabunglah kegiatan-kegiatan ini Pak sama program yang Bapak hadirkan di depan. Kemudian ada peningkatan kapasitas operasional BNPT 231 miliar apa ini tolong dijelaskan ini jadi biar kita semuanya ini paham Pak.

Kemudian saya berbicara mengenai kegiatan *output* prioritas nasional halaman 14 Pak. Saya katakan tolong kita semua pahami kondisi bangsamu, pemetaan kita ini seperti apa potret yang dilihat BNPT. Kemudian tahu tidak uang lagi susah kenapa saya agak marah sedikit Pak karena begitu saya melihat nomenklatur *outputnya* seperti ini. Bayangin 172 miliar mintanya untuk kegiatan yang seperti ini, tolong juga ini dijadikan bahan pertimbangan.

Kemudian isu-isu strategis tahun 2021. Saya tadi agak menyentuh takala bicara radikal-radikal dan radikal, apalagi ujung-ujungnya tadi ada yang namanya agro wisata ikhwan. Kalau bicara radikal itu tidak bicara agama tertentu Pak. Saya PDI-Perjuangan dengerin dibilang islam radikal saja saya agak tersentuh Pak, apalagi dinamakan agro wisata ikhwan begitu seolah-olah orang islam ini yang radikal. Kalau bisa digantilah sama kalimat-kalimat yang lain kalau berbicara radikalisme itu ada bukunya nanti saya bawa baca Pak tidak melulu agama. Ujung-ujung radikalisme itu apa si, urusan perut orang lapar dipakailah instrumen yang radikal .

Mudah-mudahan ini bisa dijadikan catatan bagi Pak Kepala dalam pertemuan yang perdana ini Pak Kepala. Kemudian ke Komnas HAM ini saya bahas yang lembaran ini dulu Pak Komnas HAM. Ini paparannya sangat visioner saya apresiasi tetapi kembali lagi ini hanya sekedar kata-kata. Tidak jelas Komnas HAM ini setiap hari setiap ini datang. Saya dari tujuh isu strategis Pak saya mau dua ini sajalah bagaimana Komnas HAM terkait dengan pelanggaran HAM pada konflik agraria. Sudah bohongan semua tidak ada gunanya. Bagaimana HGU diatas HPL, HGU 90 tahun ada tidak Komnas HAM protes itu di RUU Cipta Kerja. Ini yang substantif ini yang saya katakan sudahlah tidak banyak jargon-jargon kaya begini bacanya capek. Kemudian pelanggaran HAM berat. Yang mana yang sudah diselesain sama Komnas HAM, ada juga berantem sama Kejaksaan Agung. Takala kita minta duduk bareng tidak pernah ada yang mau semuanya menang-menangan kemudian main di ruang publik bikin malu saja ribut antar Lembaga Negara di ruang publik. Kemudian bagaimana mau kerja posturnya hanya 3,1 miliar per bulan Pak. Ini yang harus Bapak bahas ke kita tidak usah banyak cerita macam-macam. Cuma sisa ruang bermain ini kan hanya sekitar 39 miliar apa bisa Bapak kejar 39 miliar ini yang Bapak bahas di Komisi ini Pak.

Kemudian juga ada namanya penanganan pelanggaran HAM berat yang memenuhi upaya pemulihan pemenuhan hak-hak korban tidak ada tidak bisa dikerjain sama Komnas HAM. halaman 4 yang di slide Pak. Ini yang saya katakan lucu apa lucunya Bapak minta opti 292 itu revisi antar kegiatan dari *refocusing* kayanya ini untuk rapid dan swab 292 dipotonglah anggaran Bapak tetapi Bapak minta untuk fasilitas *teleconference* 1,9 bukannya namanya *refocusing* ini, nambah anggaran Pak. Dipotong 292 mintanya 1,9 ya DPR RI si memang bodoh tetapi tidak idiot. Saya minta tolong ini kita agak serius. Kemudian kebutuhan yang belum teralokasi.

KETUA RAPAT:

Pak Arteria sebentar.

Waktu kita jam 12.00 WIB jadi mungkin saya meminta persetujuan waktu kita perpanjang sampai jam 13.00 WIB bagaimana?

(RAPAT: SETUJU)

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Kemudian kebutuhan yang belum teralokasi Ketua. Oke kekurangan gaji ke 14 ini wajib hukumnya tetapi bagaimana juga dengan yang dikatakan festival HAM. Jangan main dipermukaan Bapak-bapak ini aktifislah jangan main dipermukaan substantif main ke bawah isu rakyat perjuangkan tanah dan air untuk rakyat jangan festival Pak. Ini sudah benar-benar kalau ganti ini nomenklaturnya kita tidak usah pakai ini. Kemudian penjelasan atas usulan tambahan, tidak nyambung penjelasan Bapak coba deh Bapak halaman 12. Mana HAM berat di luar batas teritorial Republik Indonesia ya di dalam teritorial Republik Indonesia Bapak tidak bisa kerjain, ini diluar teritorial.

Kemudian juga masalah penanganan dan atau konsep penyelesaian konflik agraria. Yang mana yang sudah dikerjakan Pak. Saya ini Komisi II Pak dulu Pak yang Komnas HAM bantuin kita itu yang mana tidak ada jadi kasih tau publik. Kemudian halaman 4 dibuku Pak ini visi misi dan tujuan. Saya baru melihat ternyata Pak Kepala sudah dua kali tetapi tidak mempunyai visi terkait bagaimana membangun Komnas HAM sesuai yang diharapkan Komisi III.

Padahal waktu kami akhir msa periode kemarin kita sudah ngomong dari hati ke hati. Yang Bapak ini hanya mengatakan pelanggaran HAM yang terkait dengan konflik agraria tidak dikerjakan, pelanggaran HAM berat tidak, intoleransi dan ekstremisme tidak. Mana ada pada saat gereja digusur, orang islam pada saat ditempat-tempat tertentu masjidnya diiniin tidak ada, yang datang itu partai politik Pak kalau tidak PKS PDI-Perjuangan itu saja ya bolehlah PPP disebut. Kemudian pada halaman 7 Pak ini pada bab 2 Pak bagaimana juga dengan sasaran strategis, terselesaikannya kasus pelanggaran HAM berat yang mana yang Bapak selesaikan Pak tahun kemarin Pak biar kami tahu Pak. Kemudian juga itu ada 4 kasus, meningkatnya penyelesaian kasus HAM 600 realisasi 602 yang mana Pak. Kemudian juga meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara. Bapak tahu aparatur negara kita jumlahnya berapa, yang Bapak beri pemahaman itu hanya 40 orang Pak.

Aparatur negara yang ada penegak hukum di DPR RI saja lebih dari 1.000 Pak. Inilah yang saya katakan tolonglah bermain jangan dipermukaan, main-main substansi saja. Mengenai postur anggaran, postur anggaran saya ingin sampaikan dari 104 miliar tetapi program yang Bapak bisa mainkan hanya 39 miliar ini yang dikatakan ini mimpi. Jadi Bapak buat ini materi bagus saja tetapi saya pasti tidak bisa dikerjakan halaman 11 Pak Bapak lihat Pak dan dari sini Pak yang 3 halaman sampai halaman 13 kelihatan sekali tidak kreatif. Coba buka tahun yang lalu sama tidak ini teman-teman yang di Kesetjenan, Komnas HAM Setjen tidak. Sama jadi kalau datang ke DPR RI hanya copy paste saja janganlah. Kami mohon sekali ini dijadikan intropeksi dan koreksi Pak Kepala. Komnas Perempuan ya saya juga saya kebetulan pegiat perempuan dan anak di dapil bu. Ini cara pemaparannya mohon maaf tidak lazim jadi paparannya itu kalau bisa ikuti KL KL yang lain jadi bacanya sulit saya tidak tahu ibu mau apa ini tiba-tiba ada tujuan dan sasaran strategis.

Saya tidak bisa banyak-banyak ngomong karena anggaran ibu juga 10 miliar itu setahun kalau saya bilang yang bisa dimainkan. Ini juga kita kasih tahu Ketua. Masalahnya mereka ini bukan masalah program. Anggarannya 10 miliar setahun walaupun kesannya ada 23 miliar tetapi yang bisa mereka mainkan 10 untuk seluruh Indonesia Ketua. Jadi bayangkanlah ini yang juga kita katakan keberpihakan kita sama perempuan dan anak ini masih sangat kecil sekali. Berikutnya LPSK ini Pak Bapak ini dari tadi keluh kesah saja Pak Kepala keluh kesah saja tetapi saya katakan kenapa Bapak ini agak sulit, karena LPSK tidak mampu memperlihatkan bahwa LPSK itu seksi Pak. Kalau Bapak ke luar negeri Pak yang namanya LPSK itu ditakuti orang Pak polisi takut, KPK takut semuanya takut karena Bapak itu adalah organ instrumen pengawas kedua dari pada negara Pak terkait dengan giat-giat aparat

penegak hukum tetapi disini tidak setiap aparaturnya penegak hukum Lembaga Penegak Hukum punya yang namanya LPSK-Nya sendiri punya sendiri tanpa Bapak pantau.

Kejaksanaan punya rumah sekatnya sendiri, KPK punya rumah sekapnya sendiri bukan rumah amanlah ya kita bicarannya rumah aman nanti salah lagi saya. Pernah tidak Bapak kordinasi eh kamu punya house ko tidak koordinasi sama kita sehingga makin tidak disegani. Bapak sudah kasih ini kedudukan, tujuan wewenang tetapi Bapak tidak mampu mengelola kewenangan sehingga tidak dianggap orang. Kemudian saya bicara mengenai realisasi kinerja dan anggaran Pak. Yang saya ingin tanyakan ini ko sasaran strategisnya meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap LPSK coba halaman 6 Pak, artinya LPSK tidak dipercaya rakyat dong kalau begitu. Ini kan Bapak memermalukan diri sendiri Pak halaman 6 meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan LPSK. Kemudian terwujudnya LPSK yang efektif dan efisien. Kalau dalam ilmu bahasa Pak ini tidak pantas dijadikan sasaran strategis, ini dalam ilmu bahasa. Apalagi kan Bapak ini tidak hanya bernarasi ini kan politik disini Pak mampu meyakinkan DPR RI dan publik bahwa Bapak ini punya program yang bagus.

Kemudian mohon maaf pada bab 3 halaman 8 ini yang saya katakan postur anggarannya paling konyol Pak diantara 3 yang dipaparkan disini. Kenapa begitu, anggarannya 54 miliar tetapi untuk kegiatannya Bapak hanya 9 miliar masih cantikan si Komnas Perempuan dari 23 jadiin 10. Sisanya adalah belanja tetap layanan perkantoran 36 miliar. Jadi tidak mungkin bekerja LPSK 9 miliar setahun untuk seluruh Indonesia. Kalau Bapak katakan wah saya begini ngeluh-ngeluh terus ya karena Bapak sendiri tidak kreatif. Berikutnya ini harus dijadikan bukan saya belain LPSK ini pada halaman 10 Ketua. Memang ada kewenangan atribusi Undang-Undang yang diberikan kepada beliau. Ini pembayaran-pembayaran kompensasi kepada korban terorisme ini memang menjadi kewajiban dan kewenangan mereka. Ini harus juga kita pertimbangkan dan mudah-mudahan nanti ada Pimpinan saya ini Pak Donald Trump Pak Ichsan ada 5,5 ini Pak Ichsan. Ini kalau bisa harus kita bantulah LPSK.

Berikutnya juga mengenai usulan tambahan Pak. Kalau saya diajarkan yang namanya usulan tambahan tidak boleh lebih dari pada yang sudah dihadirkan. Seandainya yang dihadirkan 45 kalau Bapak mengusulkan tambahannya 127 namanya itu agak kelewatan Pak. Kalau 45 Bapak usul 5 itu oke tetapi 127 agak kelewatan. Makannya tadi Bapak lapor sana sini termasuk termasuk ke Pimpinan DPR RI ya Pimpinan DPR RI mungkin juga bingung orang pagunya 45 minta tambahannya 127. Saya ke halaman 11 deh biar kita terlihat ini Pak. Halaman 11 memperlihatkan Bapak-bapak semua ini bukanlah patriot kebangsaan kita Pak. Bapak-bapak semua ini tidak mempunyai jiwa militansi. Kenapa begitu Pak, dari 7237 usulan awal yang disetujui kan 79 ya Pak Setjen ya tetapi dari 79 Pak ini saya sedih banget hanya 23,2 Pak yang Bapak pakai buat kerja-kerja sisanya belanja tetap lagi. Kalau maindsetnya begini mentalitas begini yasudahlah jadi namanya kita semua ini tidak berkarya di Lembaga masing-masing kita ini nyari hidup di Lembaga masing-masing saya minta tolong sekali seperti itu.

Berikutnya ada pada halaman 14 kami mohon betul ini ada poin duanya penelaahan investigasi korban terorisme di luar negeri. Maksudnya apa ini Pak saya hanya kasih contohlah waktu itu ada saksi E-KTP yang mati di Amerika mendingan Bapak urusin itu dari pada Bapak buat kaya begini tidak jelas juga kita juga tidak bisa mengawasi, ini hanya contoh. Kemudian pada poin 3-Nya Pak penguatan skema saksi pelaku melalui Perpres dan ketentuan hukum acara. Bapak kemarin kami mengharapkan betul LPSK hadir pada saat kisruh mengenai Nazarudin tetapi kan LPSK tidak pernah berani mengatakan ini jisi dan bukan jisi. Dibuatlah pertempuran di ruang publik antar Lembaga Negara yang harusnya menjadi domennya Bapak. Malu saya Pak ini kan urusan LPSK ngapain Kumham punya pendapat.

KETUA RAPAT:

Pak Arteria substansi sudah cukup.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Yasudahlah saya pulang Ketua kalau dipotonglah.

KETUA RAPAT:

Pak Arteria duduk sebentar. Saya ingatkan berdasarkan tatib Pasal 266 Hak Pimpinan untuk membatasi waktu bertanya.
Silakan Partai Golkar.

F.PG (Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang saya hormati Pimpinan Rapat beserta Anggota Komisi III,
Yang saya hormati Kepala BNPT, Kepala Komnas HAM dan Ketua LPSK beserta seluruh jajaran,

Pertama saya ingin langsung kepada Kepala BNPT saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Kepala BNPT Pak Boy Rafli Amar yang telah terpilih menjadi Kepala BNPT dan harapan kami semua terlebih lagi harapan saya karena Bapak dulu pernah menjadi Kapolda Banten jadi ya sedikit banyak Bapak tahu bagaimana kondisi di Provinsi Banten dikaitkan dengan program kerja yang nanti Bapak akan laksanakan diberbagai daerah. Nah kemudian terkait dengan rencana kerja dan anggaran yang tadi telah Bapak sampaikan yang mengalami penurunan yang amat sangat drastis tentu harapan kami Bapak bisa memaksimalkan program ini dengan sebaik-baiknya karena di masa pandemi Covid-19 ini ternyata urusan terorisme ini bukannya menurun malah bertambah. Hal ini juga mungkin terlihat dari kemarin kami di wa group Komisi III ada seseorang yang masuk ke Polda Brimob di Sultra.

Nah ini juga saya nanti akan pertanyakan apa memang ada kaitannya dengan jaringan terorisme yang ada atau memang ini hanya iseng-iseng belaka dan mencirikan atau memperlihatkan bahwa pandemi ini ya tidak menyurutkan aksi-aksi terorisme yang ada di Indonesia. Kemudian dalam rapat terakhir kami dengan BNPT pada tanggal 21 November 2019 ini ada 4 poin kesimpulan Pak yang pertama yaitu peningkatan kordinasi dengan Lembaga terkait untuk mengoptimalkan fungsi kesiapsiagaan nasional. Oleh karena itu yang ingin saya tanyakan ini bagaimana ini Pak terkait kerja sama konkrit dengan Dirjen PAS untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di lapas terhadap napi terorisme. Ini juga apakah memang sudah ada dengan Dirjen PAS karena kemarin kami juga baru rapat dengan Menkumham dan juga sedikit menyinggung terkait napi teroris yang ada di lapas-lapas. Kemudian juga sedalam mana kerja sama dengan Kominfo Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa akun-akun teroris yang memiliki akun-akun anonim samaran dan kamufase ini dipakai oleh jaringan radikal terorisme. Saya rasa kerja sama dengan Kominfo ini harus lebih intens dilaksanakan agar tadi bisa menelusuri sampai jejak terdalam akun-akun anonim yang memang ada untuk jaringan terorisme di Indonesia ini.

Yang ketiga, dalam program 100 harinya Bapak tadi di poin nomor 12 saya melihat ada terkait teroris kaum perempuan atau pemberdayaan perempuan dan anak di dunia teroris. Kita tahu bahwa tercatat yang saya hitung dari 2016 sampai 2019 ini ada setidaknya 10 kasus pengeboman atau kasus teroris yang melibatkan perempuan dan anak. Yang menghebohkan lagi tentunya kasus Surabaya dan Sibolga. Termasuk juga kasus di Pandeglang Banten yang kemarin juga penusukan terjadap Pak Wiranto yang melibatkan seorang perempuan juga. Nah, bagaimana upaya keras BNPT dalam membuat rencana aksi nasional Pak terkait dengan tadi program 100 hari. Kemarin tanggal 18 Juni kebetulan saya mengikuti webinar Bapak dengan KOWANI dan IWAPI ada 500 peserta webinar dan Bapak menjelaskan terkait radikalisme dalam perempuan.

Saya rasa ini menjadi salah satu contoh program bagaimana penangkalan radikalisme terhadap perempuan dan anak. Kemudian bagaimana juga kerja sama BNPT dengan Kementerian PPA Pak. Saya rasa ini juga banyak program-program yang bisa dilakukan antara BNPT dengan Kementerian PPA juga program-program yang ada di provinsi dan juga Kabupaten Kota. Kemudian terkait persoalan anak yang berhadapan dengan hukum dari kasus terorisme yang dilakukan oleh orang tuanya. Bagaimana perlindungannya selama ini apakah ada ada dampingan pendampingan, apakah ada beasiswa mungkin bagi anak tersebut atau mungkin radikalisme seperti apa deradikalisme. Pokoknya itu Pak ya bagaimana deradikalisme terhadap perempuan atau dan anak yang keluarganya ada dalam kasus teroris dan yang ketiga tadi Bapak sampaikan bahwa kordinasi dengan forum komunikasi penanganan teroris di provinsi ini baru ada di 32 provinsi dan alhamdulillah di Provinsi Banten ini sudah masuk ke yang 32 provinsi tetapi catatan saya Pak bahwa upaya-upaya FKPT dalam mengurangi penanggulangan terorisme di daerah ini hanya baru 8 provinsi yang aktif.

Nah ini bagaimana apakah ada sedikit kendala untuk memaksimalkan kordinasi dengan Pemerintah Daerah atau seperti apa. Kemudian

KETUA RAPAT:

Ibu Rosi saya ingatkan bahwa jadwal kita hari ini fokus membahas fungsi anggaran jadi bukan pengawasan. Silakan ibu singkat ya.

F.PG (Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.):

Oke siap.

Itu tadi dengan BNPT kemudian dengan Komnas HAM. Terkait anggaran juga naiknya sampai 300% Pak ini juga sesuai apa yang disampaikan Pak Arteri kami ingin realisasilah Pak yang realistis begitu jangan sampai anggarannya juga terbatas kemudian juga ditengah pandemi Covid tetapi banyak program-program yang kurang masuk diakal menurut saya juga. Kemudian terkait kasus sedikit karena tadi Pak Arteri juga sudah menyampaikan. Saya hanya ingin menekankan saja bahwa Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam kemarin telah diperintahkan Presiden untuk menyelesaikan 11 kasus berat yang 11 kasus pelanggaran HAM berat yang memang belum terselesaikan. Oleh karena itu kerja cepat, kerja tuntas, kerja singkat juga harus diberlakukan oleh Komnas HAM dan LPSK terkait anggaran juga tadi Pak banyak yang ngoyo Pak ya karena memang sampai sejauh ini ya tadi tidak terlihat program-program LPSK termasuk juga tadi kelemahan LPSK dalam memberikan wewenang terhadap justice kolaborator di kasus Nazarudin.

Nah ini juga terlihat kelemahan LPSK oleh karena itu kami harapkan untuk bisa mendorong lebih baik dan maksimal lagi. Pak Pimpinan karena saya ini tidak selama seperti tadi Pak Arteri jadi saya minta waktu Bu Sari untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi tambahan dari Partai Golkar. Sedikit ya sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Bu 5 menit ya.

F.PG (Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih.

F.PG (Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Pimpinan

Jadi saya hanya ingin menanyakan sedikit tentang anggaran di BNPT. Komisi III Pak Boy itu selalu memberikan dukungan untuk peningkatan anggaran BNPT. Diawali dengan mendukung pembangunan gedung BNPT di Sentul serta dukungan anggaran untuk program deradikalisasi. Kita apresiasi

Pak prestasi dan kinerja BNPT dalam upaya membebaskan bangsa ini dari terorisme. Akan tetapi pandangan masyarakat umum itu menilai bahwa pelaksanaan program deradikalisasi ini belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Bahkan peneliti dari Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) masih memiliki kelemahan kinerja BNPT adalah melakukan deradikalisasi dan kontra, radikalisme masih lemah. Kelemahan itu terlihat lantaran deradikalisasi yang dilakukan BNPT hanya ditujukan kepada orang yang sudah itu artinya BNPT justru kurang menginterfensi orang yang masih memiliki paham radikal. Jadi Pak Boy kontroversial terhadap program ini memunculkan isu negatif mengenai BNPT itu sendiri. Bahkan sampai ada rumor untuk membubarkan BNPT. Jadi saya ingin mendengar penjelasan dari BNPT bagaimana saja si apa saja si program-program deradikalisasi ini sehingga kita juga bisa dengan percaya diri memberikan anggaran untuk program ini. Mungkin itu saja dari saya Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Sari.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Gerindra silakan Pak Romo.

F.P-GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III yang saya hormati,
Bapak-Bapak dari BNPT, Komnas HAM dan LPSK dan hadirin sekalian,

Dalam paparan keuangan ini memang sebenarnya kita pasti tidak akan tepat apalagi teliti mengomentari besaran anggaran yang diajukan oleh masing-masing mitra kita. Kenapa, karena kita tidak memahami secara rinci untuk apa dan kemana anggaran ini akan digunakan. Selain memang kita memerlukan pendalaman kita juga tidak mendapat materi pada waktu yang cukup untuk mempelajari anggaran yang diajukan oleh mitra kerja kita tetapi mungkin kita hanya bisa memberikan semacam warning saja kepada mitra kita misalnya kepada BNPT. Karena ini bukan pengawasan tetapi soal keuangan kalau pengawasan sebenarnya saya hendak mempersoalkan Pasal 43 E bagian B tentang pengangkatan Kepala BNPT. Yang menurut saya menyalahi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Karena mengikuti TR Kapolri pengangkatan oleh Presiden. Padahal BNPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden bukan kepada Kapolri. Kemudian yang kedua saya langsung melihat tugas BNPT.

Tugas BNPT itu kan merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan strategi dan program nasional penanggulangan terorisme. Jadi itu *happy*nya adalah dikesiapsiagaan nasional kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Saya melihat di *output* program kegiatan misalnya disini ada deradikalisasi terhadap masyarakat terpapar paham

radikal terorisme itu 201 kegiatan. Menurut saya ini sangat jauh dari jumlah mereka yang sudah terpapar. Tahanan teroris saja di Indonesia ini sudah berapa banyak begitu ya belum lagi keluarganya. Maka 201 kegiatan ini saya tidak tahu apakah per kegiatan itu untuk sekumpulan orang, apa 201 kegiatan ini untuk 201 tempat atau 201 orang ini kan memang tidak jelas. Kemudian demikian dengan kegiatan kontra radikalisasi 56 kegiatan tetapi tidak ada kegiatan kesiapsiagaan nasional padahal itu adalah program awal dari BNPT kesiapsiagaan nasional baru kontra radikalisasi, baru deradikalisasi. Ini tidak ada ini saya kira perlu diperbaiki kalau melihat dari sisi tugas BNPT. Berapa yang diperlukan anggaran untuk kesiapsiagaan nasional supaya mereka yang terpapar makin kecil.

Kemudian kita kan selalu mengeluh ini Pak Rafli bahwa mereka yang terduga banyaknya mati ditempat ini. Kayanya itu tergambar dari halaman 10 ya tentang program kegiatan *output*. Pengungkapan jaringan terorisme hanya satu kegiatan operasi. Karena happy BNPT itu adalah kesiapsiagaan kontra radikalisme deradikalisasi menurut saya pengungkapan jaringan terorisme ini menjadi sangat penting jadi anggarannya disini saya kira harus lebih besar.

Ini malah hanya satu kegiatan dengan anggaran 616 juta lebih itu saja. Jadi saya kira kesalahan ya dalam mengalokasikan. Sementara perlindungan objek vital transportasi dan lingkungan yang menurut saya ini kan bidang tugas yang lain ya bidang keamanan ini. Ada disitu ada tugas Polisi, ada kan Direktur yang memelihara objek vital ini kan ada obvit ya, di TNI juga ada kenapa ini menjadi kegiatan BNPT yang jumlah kegiatan lebih besar dari pengungkapan jaringan sampai 6 kegiatan dan biayanya pun juga lebih besar 4,6 miliar ini menurut saya kesalahan ya. Pemulihan korban tindak pidana terorisme 27 korban. Tadi kita mendengar dari LPSK itu tugasnya LPSK kan pemulihan psikologis, sikososial dan kesehatan diawali dari kesehatan, kemudian psikologis dan sikososal, ada juga kompensasi itu kan tugasnya LPSK. Ini mungkin karena Pak masih baru penyusunannya Bapak kurang paham ini itu salah itu saya kira tidak cocok masuk disitu pemulihan korban. Kemudian pengawasan terhadap potensi tindak pidana terorisme.

Ini apa bentuknya ini pengawasan ini. Karena ada kegiatan asesmen juga di anggaran yang lain. Jadi menurut saya ini perlu diperbaiki fokus BNPT ini untuk penanggulangan terhadap semakin diminimalisirnya kegiatan-kegiatan terorisme. Kemudian saya juga masih melihat ada indikasi teroris itu adalah islam ya. Karena ada gugus tugas, gugus tugas itu sepenuhnya adalah ulama itu ada biayanya lumayan juga besarnya. Gugus tugas untuk pencegahan terorisme itu yang seluruhnya adalah para ulama saya tidak tahu apakah agama lain ada disebut ulama. Lalu dibawahnya ada lagi pertemuan dengan 100 tokoh itu juga menggunakan pembiayaan tetapi saya kira mengeliminasi tuduhan terhadap suatu kelompok agama itu sangat penting sehingga bahasa itu perlu diperbarui ya tidak cocok masuk di dalam paparan yang disampaikan kepada Komisi III. Kemudian ada yang perlu saya sampaikan kan ada pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana teroris melalui forum komunikasi sepenjagaan terorisme.

Saya membaca sampai akhir itu belum ada upaya untuk memberi pemahaman terhadap Aparat Kepolisian atau Densus 88 tentang apa yang dimaksud dengan teroris. Karena sepengetahuan saya semenjak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disahkan ini teroris semakin banyak ini padahal itu seharusnya semakin selektif. Karena ada definisi tentang teroris itu ada motif politik yang sangat jelas, tidak hanya melakukan tindak pidana seperti penikaman terhadap Wiranto cepat saja itu teroris kayanya semacam ada upaya kalau kira-kira sulit diungkap kita sebut teroris saja karena tidak akan ada penelitian lebih lanjut. Saya kira disini peran dari BNPT kepercayaan itulah yang kami harapkan dari BNPT untuk memberi pemahaman yang jelas tentang siapa itu teroris karena pihak Kepolisian kan tinggal operasional saja tetapi yang mampu memberikan penjelasan tentang apa itu teroris siapa itu teroris saya kira itu BNPT maka itu perlu ada pengalokasian dana ketimbang membuat tv saya kira itu malah tidak efektif membuat tv BNPT. Karena lebih efektif kan sosialisasi kegiatan BNPT itu di media mainstream yang semua orang nonton. Media mainstream saja sekarang sudah semakin berkurang penontonya apalagi tv khusus BNPT.

Jadi saya kira kan bisa ada pengalihan anggaran saya tidak tahu apakah masih mungkin, apakah masih mungkin dilakukan visi terhadap apa yang dipaparkan ini kalau memang masih mungkin saya kira sebaiknya direvisi supaya kerja BNPT itu memang fokus memberikan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi melakukan tindakan terorisme. Saya kira itu untuk BNPT. Untuk Komnas HAM ini sahabat saya ini saya mau menyampaikan pesan saja. Komnas HAM sekarang sudah tidak seram di masyarakat. Orang tidak bisa lagi membayangkan akan hadir Komnas HAM ketika hukuman terhadap pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan hanya dituntut setahun Orang tidak mengharapkan lagi kehadiran Komnas HAM. Tidak tahu kenapa ya ko semacam tidak seram begitu Komnas HAM. Kemudian yang kedua disebutlah kasus ditempat kita. Itu tanah-tanah ex HGU yang 5.800 sekian hektar itu, itu ex karyawan PT PLN yang pensiunan dan penduduk yang ada disitu sudah mati-matian berjuang.

Dengan surat-surat yang mereka miliki satu pun tidak ada yang mendapatkan haknya. Kemudian pemodal-pemodal asing tidak tahu bagaimana caranya sekarang sudah membangun gedung-gedung yang sangat luar biasa megahnya dan ketika saya turun kesana tidak satu pun membicarakan kita ngadu ke Komnas HAM. Ada apa ini Komnas HAM ini. Maka saya sepakat tadi tidak usahlah ada pentas festival tidak usahlah. Bagus kalau bisa investigasi, festival itu diganti dana menjadi investigasi kasus-kasus HAM yang ada di masyarakat-masyarakat melarat mungkin itu yang tidak mampu lagi mengadukannya kepada pihak aparat tetapi dia masih bisa punya harapan ketika menyampaikannya ke Komnas HAM dan dari banyak kawan saya yang dibertugas di aparat mereka tidak berpikir lagi nanti kalau kita lakukan ini kita ditegur Komnas HAM tidak ada lagi itu, mungkin ada program integritas lagi ini Komnas HAM yang perlu diberi anggaran. Saya kira itu yang terakhir untuk LPSK.

Saya mendukung penguatan LPSK ya dan saya tidak tahu strategi Pak Ketua LPSK dan Setjen menaruhkan dana 444 miliar untuk memberikan

santunan kepada korban terorisme dimasa lalu itu tidak dimasukkan dalam program prioritas tetapi diusulan tambahan. Apakah itu strategi saya tidak tahu untuk menakut-nakuti pemerintah ini datelinenya tahun 2021 kan memang kita amanatkan waktu itu 3 tahun setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disahkan tetapi tidak masuk di *ouput* program malah masuk diusulan tambahan. Saya tidak paham juga apakah pemerintah kemudian akan patuh Undang-Undang melihat ini menjadi usulan tambahan prioritas. Kenapa itu tidak dimasukkan saja dari awal karena itu memang tidak mungkin ditolak. Karena kalau tidak tahun 2021 itu tidak bisa lagi dieksekusi dan kalau tidak dimasukkan berarti kan LPSK plus pemerintah melanggar Peraturan Perundang-Undangan. Patut disayangkan menurut saya kenapa itu dimasukkan di *output* program prioritas dari LPSK dan itu saya kira tidak ada kemungkinan untuk dicoret karena ada perintah Undang-Undang khusus tentang itu. Walaupun seperti kata teman yang lain kita akan memberikan dukungan tentang ini tetapi menurut saya kalau masih mungkin untuk dirubah kenapa tidak dirubah supaya yang 44 miliar itu memang hak orang yang sudah menjadi korban.

Jangan lupa di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ada satu pasal bahwa Korban terorisme adalah tanggung jawab negara dan batas waktunya itu adalah tahun 2021. Jadi saya kira ini perlu di diskusikan kalau memang masih bisa dirubah agar dimasukkan tetapi ini memang kita harus sama-sama bekerja untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada korban terorisme.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Romo.
Selanjutnya Fraksi Nasdem kami persilakan.

F-P.NASDEM (EVA YULIANA, M.SI):

Baik terima kasih Pimpinan sidang dan Anggota Komisi III yang hadir serta para mitra yang hadir pada kesempatan kali ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Untuk mempersingkat waktu karena tadi sudah di wanti-wanti untuk singkat, padat dan berkualitas semoga saya bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik. Yang pertama kepada BNPT Pak Boy Rafli mungkin ini kali pertama saya bertemu dengan Bapak dan semua jajaran. Perkenalkan nama saya Eva Yuliana saya dari daerah pemilihan Jawa Tengah V Pak Solo dan sekitarnya. Selamat kepada Bapak beserta jajaran yang baru yang kali ini memimpin BNPT semoga BNPT akan bertambah baik dalam Pimpinan Bapak. Yang pertama saya perlu mengapresiasi program BNPT yang pernah kita lihat dalam dokumentasi dalam dokumentasi karena program BNPT itu kadang-kadang antara ada dan tiada sepertinya ada tetapi tidak kasat mata atau sebaliknya ada tetapi kita tidak merasakan. Jadi pada dokumentasi-

dokumentasi yang kita lihat memang program-program atau kegiatan deradikalisasi itu sangat terasa. Namun pada sisi anggaran kalau saya melihat karena ini saya baru pertama kali atau pada periode pertama saya menjabat sebagai DPR RI duduk sebagai DPR RI.

Saya melihat dari tahun-tahun yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya dari mulai 3 tahun terakhir hingga tahun ini anggaran BNPT itu terus menurun. Nah ini menurut saya sangat mempengaruhi dengan giat-giat atau target-target yang seharusnya dicapai oleh BNPT ketika menurun pertanyaannya kan berarti satu penyerapan bagaimana, kedua kualitas kinerjanya seperti apa, ketiga kemudian targetnya tercapai atau tidak nah ini sangat mempengaruhi. Oleh karena itu kalau melihat dari anggaran yang terus menurun saya Fraksi Nasdem saya mendukung untuk ditambah anggaran BNPT. Namun ditambahnya anggaran ini tentu pada prioritas-prioritas program yang harus diperhatikan. Yang pertama tentu dalam pengungkapan jaringan, kemudian deradikalisasi, yang ketiga ya kesiapan masyarakat dalam bekerja sama dengan pemerintah dalam deradikalisasi tersebut. Saya melihat pada usulan tambahan anggaran ini pada kritikan yang sama dari rekan-rekan saya yang terdahulu dari Fraksi yang lain sama Pak ini harusnya bahan-bahan ini disampaikan paling tidak sehari sebelumnya sehingga kami-kami ini mempunyai kesempatan untuk membaca, mengevaluasi dan kemudian berdiskusi dengan para mitra pada sidang kali ini. Namun ini kita terima tadi mungkin Bapak dan ibu melihat ketika kami duduk kami baru kemudian menerima ini.

Sehingga kami pun cara mencermatinya ya mencermati asal membaca akhirnya. Dari mencermati asal membaca ini tadi Pak beberapa hal telah saya sampaikan dan yang untuk anggaran murninya saya belum sempat membaca mungkin sudah dikritisi oleh beberapa rekan terdahulu. Namun saya melihat pada usulan tambahan anggaran BNPT yang diusulkan itu pada poin 3 dan 5 itu peningkatan kemampuan para pelaksana program deradikalisasi dalam melakukan asesmen dan identifikasi terhadap tersangka terdakwa dan selanjutnya. Itu rasanya ko buyes dengan yang kelima Pak peningkatan kapasitas operasional BNPT. Nah untuk peningkatan kapasitas operasional BNPT itu besar dan kemudian yang tadi yang saya sebutkan nomor 3 itu menurut saya itu penting sekali. Kenapa itu tidak digabungkan karena menurut saya poin ke tiga dan poin ke lima ini bisa ada dalam satu pagu atau satu program yang kemudian kenapa ini dipecah dan yang lain itu menjadi kecil sekali padahal itu penting.

Saya mohon dicermati lagi Pak untuk usulan ini. Pada dasarnya kami menyetujui untuk ditambah namun harus dengan pertimbangan atau pencermatan sekali lagi dan kemudian program-program tentang pengungkapan jaringan dan lain sebagainya perlu Bapak sampaikan atau dituangkan daerah-daerah mana yang memang daerah-daerah merah yang perlu menjadi fokus dalam BNPT melakukan pengungkapan jaringan. Yang berikutnya Pak terakhir mungkin ini dari saya. Pimpinan tetap pada melihat pada dasar anggaran. Saya melihat satu kasus saja mengambil satu kasus saja. Kemarin ada kasus penyerangan di Karanganyar. Kebetulan saya kemarin sedang ada di Jawa Tengah pada saat kejadian tersebut. Yang

menyerang ini adalah narapidana teroris yang sudah bebas tahun 2019 di Lampung. Nah sekarang ini melakukan penyerangan pada Anggota Polri kemarin di Karanganyar. Kalau boleh saya bertanya kepada Bapak Kepala BNPT kira-kira dalam kasus seperti itu apa yang akan dilakukan dan telah dilakukan oleh berdasarkan anggaran yang sudah ada.

Pengungkapan jaringan harusnya sudah dilakukan lebih detail lagi karena itu sudah bebas dari tahun 2019. Kemudian deradikalisasi dan kesigapan masyarakat setempat bagaimana itu dilakukan. Itu saja Pak dari saya dan kemudian untuk LPSK hanya satu saja Pak yang menjadi ini saya. Jadi antara kebijakan di BPJS dan LPSK rasanya ini membutuhkan, LPSK membutuhkan payung hukum yang jelas Pak ya, membutuhkan payung hukum yang kuat untuk kemudian tadi jaminan terhadap korban teroris nah yang itu tidak di *cover* oleh BPJS. Tolong Pak mari kita cari bersama karena kita mitra kita cari bersama payung hukumnya untuk ini agar LPSK pun juga tupoksinya jelas. Saya karena ini adalah RDP pertama kami dengan LPSK maka memang soal tupoksi dan lain sebagainya itu belum dibahas karena ini kita fokus kepada soal anggaran. Jadi mari kita buka kembali apakah ini sudah tertuang dalam tupoksinya LPSK untuk *cover* atau mencukupi dari jaminan untuk korban teroris.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih ibu.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi PKB.

F.PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi IIII,
Bapak dari Kepala BNPT, LPSK dan Komnas HAM serta seluruh jajarannya,

Pertama saya ke BNPT dulu. Ini kalau melihat kita komperasikan dari tahun ke tahun analisa anggaran BNPT ini memang perlu kita *support* dan ya sangat betul-betul dengan keterbatasan melakukan *crime* terutama yang ekstra *crime* di teroris ini kayanya ya belum mencukupi tetapi saya analisa juga di hasil pemeriksaan BPK RI dari LHP yang kemarin ini perlu menjadi catatan buat semua saja bukan hanya BNPT masih banyak ketidak patuhan terhadap Perundang-Undangan yang dilakukan analisis dari BPK RI ini terkait mata anggaran yang dipergunakan oleh Kementerian Lembaga terutama badan seperti BNPT, Komnas HAM dan LPSK. Yang menjadi catatan saya buat BNPT adalah terkait anggaran pencegahan karena harus lebih fokus kalau BNPT itu di preferentif di pencegahan. Jangan sampai kita besarkan anggaran disini ada usulan untuk operasional BNPT untuk penindakan. Justru

yang kita butuhkan seperti tadi teman-teman sampaikan bagaimana kejadian-kejadian sudah terjadi karena sudah pasti akan terjadi konsolidasi setiap Kementerian Lembaga Aparat Penegak Hukum yang lain Polri dan sebagainya turun.

Disini harus lebih stretchingnya justru Pak Kepala BNPT ini dipencegahan Pak ya dan bagaimana tadi usulan dari teman-teman untuk deradikalisasi itu penting dan kita juga mohon dilibatkan juga Komisi III seperti apa langkah-langkah prefentif yang dilakukan oleh Pak Kepala BNPT dengan semangat baru ini Pak. Karena kemarin kita melihat ya bukan tidak baik sudah baik. Saya harapkan ini lebih baik lagi bagaimana langkah-langkah pencegahan ini bisa dilakukan oleh BNPT terutama tadi. Kalau toh misalkan dibutuhkan untuk pencegahan bagaimana sosialisasi ditengah-tengah masyarakat apalagi Komisi III mengetahui ya kita *support* semuanya bagaimana teman-teman bisa menyetujui anggaran untuk pencegahan di BNPT ini. Yang kedua LPSK tidak panjang kan sudah jam 13.00 WIB ini sebagian ditengah-tengah. Tupoksi Bapak ini Pak terus terang saja sangat dibutuhkan oleh rakyat tetapi sosialisasinya tidak ada. Saya pernah ngobrol zamannya Ibu Lili dulu sebelum beliau di KPK.

Bayangkan saja seorang saksi baru dipanggil saksi saja padahal disana LPSK harus ada di depan melindungi integrity dan krebility orang itu jangan sampai dia sudah namanya sudah rusak padahal LPSK harus sudah hadir. Nah ini kita melihat tidak dari sisi *budgetingnya* tetapi fungsi selama ini ke kita saja ini LPSK saja kadang kita evaluasi di Komisi, apa *outcome* dan *outputnya* yang sudah dilakukan selama ini bukan saja pemanggilan-pemanggilan saksi yang sudah dilakukan Aparat Penagak Hukum yang lain. Dimana kehadiran teman-teman LPSK ini sudah betul-betul melaksanakan tugas fungsi sesuai dengan Undang-Undang Bapak-bapak pegang sebagai rujukannya dan terakhir Komnas HAM sama harapan kita bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Romo jangan sampai ini Lembaga belum kita dengar apa sekarang gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Komnas HAM ini lebih baik ya bagaimana investigasi kemudian juga penanganan kasus-kasus yang masih tertunda. Ini sampaikan ke kami Komisi III sampaikan ke publik bahwa ada *progres* yang dilakukan oleh Komnas HAM.

Terima kasih Pimpinan

Wallahulmuafiq Illa Aqwamthoriq.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Cucun.
Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Demokrat.

F.PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan Komisi III dan para Anggota Dewan yang terhormat dan juga,

BNPT, Komnas HAM dan LPSK yang kami hormati,

Saya mulai dari BNPT tentang anggaran. Pertama sebelum masuk ke postur anggarannya saya membayangkan sebuah BNPT yang baru ini. Kebetulan memang di komandani dengan yang baru Bang Boy Rafli Amar. Catatan saya sebentar tahun 2019 Bang Boy ini mendapatkan gelar Doktoral Hukumnya dari Unpad. Judul desertasinya pun menarik integrasi manajemen media dalam strategi Humas Polri sebagai aktualisasi promotor. Sehingga saya tidak kaget kalau membaca isu-isu penting nomor urut satu itu mengenai pembentukan atau medianya. Jadi saya membayangkan BNPT mau mengajak perang penanggulangan terorisme ini menggunakan media-media baru dan saya kira masuk ini. Dalam jalan pikiran saya ketemu ini orangnya sudah siap dan kemudian memimpin di BNPT saya setuju Pak Boy. Dengan pikiran seperti itu saya kira memang media-media baru adalah menjadi tools terbaik hari ini untuk melakukan tugas-tugas utama BNPT yang tadi sudah dijabarkan begitu baik. Nah kemudian yang kedua berangkat dari situ kalau kita ikuti program kerjanya tahun 2020 itu ada 13 dan saya bikin catatan yang nomor 13 itu adalah kounter teroris *financing* begitu.

Yang di tahun 2021 tidak muncul lagi itu karena tinggal 7 saja. Nah saya ingin berangkat dari situ untuk melihat mau macam apa BNPT ini buat kita. Saya ingin menggunakan istilah bagi saya BNPT pilihannya harus sangar kalau pakai bahasa Medan di kampung kami Asani itu harus sangar ini. Dia harus sesuatu yang dihormati. Dulu kalau di Medan itu kalau mendengar nama tekap masih 6 kilometer kita mendengar nama tekap sudah lari kita dulu. Nah hari-hari ini bisa tidak ada ini nanti bisa ke LPSK bisa ke Komnas HAM nanti yang kadang-kadang kita sebut ini Komnas HAM kalau lompat sedikit katanya begini kau datang tak ganjil tak datang pun kau tak genap bahaya itu, ini kalau di kampung kami begitu Cun Medan itu. Jadi BNPT ini kita harapkan hadir paling depan ini apalagi tadi sudah disampaikan dia penjaga terdepan ini. Nah apalagi tadi diumumkan selama datang juga untuk Deputinya menjadi 6 dari 3 menjadi 6. Saya kira BNPT hari ini kita mempunyai harapan besar dipimpin Pak Boy ini.

Oleh karena itu saya membaca postur anggarannya belum ada ini teknologi canggihnya. Saya khawatir begitu besar target dan semuanya tadi teknologi canggihnya tidak ada. Saya menganjurkan Pak masukan Bang Boy supaya kuat ini tentang bagaimana anda punya database yang baik sehingga perlu untuk kemudian melakukan apa yang disebut kalau kita sering nyatakan itu analitic sistem teknologi yang sekarang sudah punya yang kita sebut data mega data yang anda bisa kuasai diseluruh dunia itu jadi harus ada teknologi canggih ini. Saya khawatir BNPT yang sudah disiapkan tadi itu tanpa di *back up* teknologi canggih khawatir saya terbangnya itu tidak pas Pak Boy. Oleh karena itu apa pun nama teknologinya saya kira perlu dimasukan dan dibagian mana itu supaya betul-betul bagus mobilnya, bagus mesinnya, bagus bensinya, bagus juga drivernya begitu. Jadi saya sekali lagi ingin mengingatkan paling tidak bikin data yang bagus karena memainkan media yang maju.

Saya misalnya data *analytic monitoring terrorism*. Tanpa data itu saya khawatir kita tidak punya peta yang kita anggap bisa memetakan ini. Misal dari situ saya berangkat tanggal 22 Juni 2020 BNPT mengumumkan dan menyatakan telah mendeteksi 80 orang anak brudu berumur dibawah 10 tahun yang dibawa orang tuanya untuk bergabung dengan isis diumumkan ini. Dalam kasus itu maka kita perlu menggaris bawahi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlibatan dari peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan juga peperangan berarti ini masuk. Bagaimana anda punya data itu, bagaimana membuat anggarannya, bagaimana memulangkannya, bagaimana kalau sudah pulang dan seterusnya. Sehingga menurut saya saya membayangkan di BNPT itu ada sebuah *news room* atau *room* yang bagus untuk memetakan.

Jadi Pimpinan kalau boleh masih bisa ditambah kan nanti atau diubah Pak Boy masukan Pak supaya anda punya kekuatan yang besar begitu. Misalnya kalau dibawah 10 tahun yang sudah terdata BNPT tadi itu kewajiban negara untuk mengembalikan. Di Amerika Srikat, Belanda, Perancis, Jerman, Belgia, Turki dan Rusia telah mengambil kebijakan itu karena ini anak-anak kita juga tetapi punya data yang kuat untuk ini punya data yang cukup. Mari kita melihat lagi yang kedua dari situ nanti masuk ke *budgetnya*. Nanti saya tidak bicara angkanya silakan nanti Pak Boy membuat angkanya tetapi ini penting.

Yaitu kalau sudah pulang, tahun 2018 BNPT mengeluarkan data bahwa terdapat setidaknya 1.800 jumlah anak dari 500 narapidana terorisme. Tadi yang kita bicara itu kan korban Pak kalau ada terorisme. Sekarang anak dari narapidana terorisme itu. Ini menarik ini adakah datanya, dimana dia, bagaimana dan seterusnya tentu sekali lagi kita punya dukungan yang kuat untuk data itu. Contoh ini kawan-kawan di Banten ini ternyata Balitbang Kementerian Agama Jakarta menemukan fakta bahwa negara belum berperan dalam memberikan layanan pendidikan bagi para anak-anak mantan narapidana terorisme di wilayah Banten belum muncul dia dan seterusnya. Oleh karena itu Pak Boy saya bikin usulan untuk anggaran Pak Boy bisa dimasukkan disisi itu agar yang kita sebutkan tadi tercapai. Dari 100 program 100 kerja yang halaman 13 Pak Boy saya tertarik dinomor 13 yaitu kounter teroris *financing*. Ini penting saya angkat dan bagaimana kemudian kita menaikkan agar menjadi catatan yang penting. Catatan saya begini Pak

KETUA RAPAT:

Pak Hinca waktu sudah jam 13.00 WIB.

F.PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Perpanjang dulu Pak.

KETUA RAPAT:

Kita perpanjang tinggal setelah Pak Hinca ada dua penanya lagi Fraksi PAN dan Fraksi PPP. Jadi kita perpanjang baru kita *break* nanti setelah *break* langsung jawaban. Sepakat? Kalau kita perpanjang cukup tidak 30 menit? Cukup ya.

(RAPAT: SETUJU)

F.PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Baik terima kasih Pimpinan.

Saya teruskan Pak Boy tentang Counter teroris pelayanan dan pendanaan terorisme. Kita diskusi terus nanti baru masuk ke *budgetnya*. Paradikma penegakan hukum di dalam pemberantasan kejahatan terorisme harus segera kita *upgrade* saya usul Pak. Dari sekedar *follow the suspect* berubah menjadi *follow the money*. Mengapa begitu, dari dialog saya dengan teman-teman di PPATK ternyata ketersediaan logistik bagi kelompok terorisme adalah suatu hal yang harus kita telusuri dan memutus rantai aliran dana pada kelompok ini. Akhir tahun 2019 PPATK mengaku kualahan. Untuk menghentikan aliran dana sejumlah kelompok terorisme setelah mampu terdeteksi atau teridentifikasi nanti ganti waktu lagi ganti nama lagi dan seterusnya padahal dananya cukup besar dari penggalangan dana, pemindahan dana, baru penggunaan dana.

Saya kira PPATK dan BNPT bisa join lagi dan teknologinya bisa disesuaikan begitu. Nah dengan demikian tindak pidana pendanaan terorisme ini menurut saya targetnya ini Pak supaya hal-hal lain tadi bisa kita cegah secepat mungkin. Pertanyaan saya apakah anggaran kita sudah kita masukan disitu mumpung belum kita sepakati ini Pimpinan kira beri ruang kepada BNPT untuk memperkuat lagi Kelembagaannya ini. Nah terakhir yang untuk BNPT, tadi kita akan memainkan media sosial yang disebutkan karena memang per hari ini hampir semua kita tidak bisa lagi lepas dari soal ini dan saya paham itu tetapi masalahnya begini. Yang mana yang Bapak sasar nanti dan berapa *budgetnya*. Sebab per hari ini kita paham betul bahwa ternyata buzer itu yang diistilah kita. Buzer itu menjadi isu yang sangat besar di media sosial yang juga angkanya besar sekali. Pertanyaannya apakah BNPT juga akan mau bikin buzer untuk mengcounter ini dan kalau itu berapa *budgetnya* atau bukan itu sehingga kita bisa mempunyai pikiran yang lebih tertib lebih bagus untuk mencegah ini.

Sekali lagi saya berangkat tadi dari disertai Bang Boy tadi yang juga masuk di wilayah itu sehingga saya membayangkan BNPT anggarannya betul-betul seperti apa yang disampaikan oleh Pak Boy tadi karena kita ingin hanya ada satu negara ini terlindungi dari terorisme itu, negara ini terlindungi dari soal-soal radikalisme itu dari saya untuk BNPT. Sekarang Komnas HAM saya setuju teman-teman dengan Romo juga. Waktu saya belajar di kampus zamannya almarhum yang pertama sekali menjadi Ketua Komnas HAM kampus beliau Pak Burhanudin Lopa hampir tidak ada ruang publik televisi bahkan *headline* media-media cetak tanpa Komnas HAM, iya mengisi ruang-

ruang kita 24 jam. Hanya datang saja ke satu tempat menggelegar itu semua begitu dan rupanya zamannya berubah belakangan ini kelihatannya Komnas HAM tidak mempunyai daya getar lagi kepada kita. Bahkan kalau lewat dari jalan latuhar hari tidak ada lagi auranya, tidak ada auranya begitu Pak. Poin kita kita ingin bagaimana Komnas HAM ini menjadi sesuatuah bagi kita.

Nah oleh karena itu tadi sudah diceritakan sudah dikritisi anggarannya saya setuju teman-teman mari kita ubah ini bagaimana iya menjadi hadir lagi dan kemudian menjadi harapan kita semua. Saya tidak tahu bagaimana caranya tetapi saya mau menceritakan bahwa nanti teman saya Pak Arsul ini yang paling ahlinya nanti bagaimana anda melakukan ini tetapi saya ingin jangan sampai Komnas HAM seperti yang di kampung saya tadi datang tak ganjil tak datang kemudian tak genap jangan sampai itu. Dia harus datang tak datang dia hadir begitulah kira-kira.

Untuk Komnas HAM Perempuan saya kira kita sepakat ini menjadi soal kita semua. Saya paling banyak menerima laporan ini kalau sudah soal perempuan jadi nanti kita teruskanlah ke teman-teman di Komnas Perempuan dan menjadi warna untuk kita kedepan. Kita setuju *budget* itu. Khusus LPSK sama ini Pak, kalau tadi teman-teman protes tentang tidak ada gregetnya begitu mengeluh saja kalau di kampung kami kita sebut ini bersungut-sungut ini Pak. Kalau bersungut-sungut itu dua sumber ini Pimpinan satu sumber dosa dua sumber stroke. Jadi jangan pernah bersungut-sungut Pak pokoknya tidak boleh mengeluh jadi kalau kita sebut tidak *acicenglah* itu kalau di Asan sana. Tidak *aciceng* main terus begitu Pak Ketua Komnas HAM. Jadi kita ingin LPSK itu betul di depan Pak. Saya justru ngeri melihat teman-teman saksi ini mau maju itu kalau melapor ke kita boleh ini aku jadi saksi bagaimana aku nanti kalau saksi, bagaimana keluargaku, bagaimana tetanggaku dan seterusnya.

Rasa takut saksi itu masih tinggi sekali maka LPSK harus segera hadir disitu. Pak lupakan festivalisasi, lupakan yang lain-lain Bapak hadir saja diperlindungan saksi ini. Tanpa saksi yang terlindungi tanpa korban yang terlindungi saya kira penegakan hukum kita akan tetap tidak sempurna. Oleh karena itu masih ada waktu teman-teman di LPSK ubahlah Pak agar tampilannya tetap menghadirkan LPSK itu. Kalau Bapak bikin baju kalau anak-anak muda sekarang yang begitu Pak. Kita ingin jugalah teman-teman LPSK itu kalau jalan dilihat dia sama dengan Komnas HAM, BNPT, BNN dan lain-lain. Nama ini penting sekali untuk ditampilkan menjadi harapan kita kedepan.

Saya kira itu sekali lagi dari Fraksi Partai Demokrat bersepakat untuk mempelajari seluruh anggaran kita ini demi kemajuan Lembaga-Lembaga ini untuk menjalankan amanah dan perintah Undang-Undang yang sudah diembannya. Terima kasih LPSK, terima kasih Komnas HAM, terima kasih BNPT.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hinca.
Selanjutnya kami persilakan Pak Suding.

F.PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Baik.

Pimpinan Bapak/Ibu Anggota Komisi III,
Yang saya hormati Kepala BNPT Pak Boy Komjen,
Ketua Komnas HAM dan Ketua LPSK yang saya hormati beserta seluruh jajarannya,

Pertama saya menghargai dan memahami paparan yang disampaikan oleh mitra kerja kita pada siang hari ini. Saya kira ini setiap pembahasan anggaran saya sudah mau dua periode tiga periode di Komisi III ini hampir sama alasan klasik menyangkut masalah kekurangan anggaran dan memang ada pegeseran. Kalau sebelum-sebelumnya anggaran itu berbasis kinerja sekarang kan *follow the program* tetapi paling tidak target sasaran itu harus tepat apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Dari paparan yang disampaikan tadi memang ada beberapa hal yang juga kalau menurut saya perlu menjadi perhatian harus ada capaian-capaian yang disampaikan oleh mitra kerja kita. Jadi tidak hanya seperti disampaikan Pak Arteria tadi bahwa ini hanya copy paste dari program sebelumnya tetapi ada capaian apa yang sudah dicapai terhadap anggaran pada periode sebelumnya. Nah dalam kaitan menyangkut masalah BNPT. Pertama saya sampaikan Pak Boy selamat ya atas pengangkatan saudara sebagai Kepala BNPT dan saya punya harapan yang begitu besar agar BNPT ini betul-betul memainkan peran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu memberikan kewenangan yang begitu besar terhadap BNPT dalam rangka penanggulangan terorisme. Mampu mengkordinir mengorkestra institusi-institusi lain dalam rangka penanggulangan terorisme yang ada di negara kita. Saya setuju bahwa teroris ini adalah crime ya. Di beberapa daerah di Poso ya memang tidak terlepas dari jaringan-jaringan dari luar dan saya kira program-program yang ditawarkan Pak Boy saat ini saya kira ini bisa menjadi jawaban terhadap bagaimana menanggulangi terorisme di masa-masa yang akan datang. Namun catatan saya Pak Boy bahwa ada selalu ada sekat sebenarnya terhadap umat dalam kaitan menyangkut masalah nomenklatur yang selama ini digunakan. Dengan diksi kata radikalisasi dan deradikalisasi apalagi tadi disampaikan tadi ada program agro ikhwan itu kan mengarah-arah ke umat kan begitu.

Ini kan juga potensi adanya ya terjadi ruang perpecahan di. Saya mengusulkan seperti yang disampaikan Komnas HAM bagaimana kalau diksi atau nomenklatur itu diubah menjadi ekstrimis dengan kekerasan begitu loh tanpa menggunakan kata radikalisme, kan itu yang selalu diungkap dan itu

menyakiti perasaan umat terkadang intoleransi, radikalisme, deradikalisasi dan sebagainya. Negara-negara luar juga kadang menggunakan itu karena kita paham bahwa teroris ini kan bermuatan politik ingin mengubah ideologi dengan kekerasan kan begitu berarti itu ekstrimis. Jadi jangan kalau memang memungkinkan ruang-ruang seperti ini sedapat mungkin diminimalisir supaya tidak ada ruang bagi anak-anak bangsa terjadi sekat-sekat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dari program-program yang disampaikan oleh BNPT saya pada dasarnya memberikan dukungan penuh ditambah apa yang disampaikan oleh Pak Hinca tadi bahwa bayangan kita kedepan ini kekerasan itu tidak lagi mindset masyarakat diubah dengan berbagai media kan begitu.

Nah bagaimana BNPT bisa mengambil peran dalam ruang-ruang publik seperti itu dalam rangka menanggulangi penyebaran paham-paham ekstrimis-ekstrimis dalam rangka untuk mengubah ideologi bangsa kita karena ini menyangkut masalah kedaulatan bangsa. Nah itu catatan saya buat BNPT ekpektasi saya sangat besar terhadap Pak Boy dan saya kira posisi Bapak sangat tepat disitu sehingga tidak ada lagi dalam rapat-rapat kerja dengan pihak BNPT ingin membubarkan Lembaga ini. Saya dengan Kepala BNPT sebelumnya Pak siapa itu berapa kali saya minta Lembaga ini dibubarkan saya bilang karena memang tidak nampak kinerjanya kan begitu tetapi mudah-mudahan dengan keberadaan Pak Boy bisa memberikan harapan baru dalam rangka penanggulangan terorisme dan juga mampu mengorkestra dalam rangka penanggulangan teroris. Nah dalam kaitan Komnas HAM saya hampir sama dengan Pak Hinca dengan kawan-kawan yang lain tetapi memang jujur juga bahwa memang Komnas HAM ini memang anggarannya memang kekurangan tetapi memang lebih diperparah juga pada saat ketika terjadi konflik di internal hanya perebutan jabatan kan begitu. Nah mudah-mudahan kedepan jangan terjadi seperti itu lagi di Komnas HAM. Persoalan internal itu terpublikasi hanya rebutan jabatan Ketua kan begitu. Nah ini sedapat mungkin dihindari persoalan-persoalan internal tetapi bagaimana agar dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang ada di institusi disini betul-betul bisa menggelegar seperti yang diharapkan dari Pak Hinca.

Pada dasarnya kita semua ingin memberikan dukungan anggaran Pak sama dengan Kepolisian. Saya pertama tahun 2009 anggaran Kepolisian disini hanya sekitar sekian sekarang sudah 100 sekian triliun. Karena kita ingin melihat ada kinerja yang dipertunjukkan sama dengan mitra-mitra kerja kita yang lain ini. Kita juga memberikan dukungan untuk itu tetapi dukungan yang betul-betul memenuhi sasaran dan capaian dalam rangka untuk bagaimana kepentingan-kepentingan bangsa kepentingan negara dan rakyat yang betul-betul. Kalau melihat anggaran disini seperti kata Arteri tadi ya lebih banyak memang belanja untuk Kelembagaan belanja modal dan sebagainya tetapi ini yang menurut saya perlu dievaluasi kembali. Nah persoalan di Komnas HAM beberapa tahun terakhir ini ya kita juga tidak melihat ya apa tetapi banyak sekali persoalan-persoalan menyangkut masalah agraria. Konflik pertahanan ini cukup banyak Pak belum lagi bagaimana tentang kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap warga negara itu juga tidak nampak kehadiran Komnas HAM.

Nah sedapat mungkin kedepan ini kita harapkan bahwa persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat dan perlakuan aparat terhadap warga negara itu betul-betul dapat di advokasi sedemikian rupa oleh Komnas HAM supaya itu nampak bahwa Lembaga ini hadir ketika masyarakat mengalami tindakan kekerasan, terjadi konflik antara warga masyarakat dengan pihak pengusaha dan belakangan ada aparat Komnas HAM harus hadir disitu supaya kehadiran mereka betul-betul Lembaga ini masih sangat dibutuhkan. Nah dalam kaitan menyangkut masalah Komnas Perempuan kita juga tidak banyak menaruh harapan tetapi paling tidak ada satu bu yang saya titip bagaimana *human trafficking* itu betul-betul menjadi perhatian. Dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan cukup banyak terjadi di daerah. *Human trafficking* itu kalau bisa di advokasi diberikan Komnas Perempuan turunlah karena banyak korban-korban terhadap *human trafficking* ini Nusa Tenggara Timur cukup banyak disana dan beberapa daerah-daerah lain. Paling tidak itu menjadi perhatian saya titip untuk itu.

Nah dalam kaitan menyangkut LPSK. Pak Hasto ini kawan lama saya di LBHI saya tahu semangatnya Bapak sungguh sangat luar biasa dalam hal memberikan perlindungan dan membongkar tentang persoalan-persoalan yang terjadi sehingga tugas dari LPSK ini memang juga sangat dibutuhkan memberikan perlindungan terhadap saksi korban sebenarnya tetapi apa daya memang anggarannya ini masih tergantung pada Setneg ya Pak. Nah saya kira di forum ini saya minta Pimpinan agar LPSK ini jelas kelaminnya. Di anggaran itu betul-betul mandiri begitu jadi tidak lagi tergantung pada Setneg tetapi kita mitra kerja LPSK tetapi anggarannya tergantung pada Sekretariat Negara begitu loh tetapi bagaimana agar anggarannya juga ditentukan oleh Komisi III sehingga kemandirian anggaran itu nampak dan begitu pula tentang mitra kerja. Saya kira ini usulan saya tentang LPSK. Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Suding.

Yang terakhir Fraksi PPP silakan Pak Arsul.

F.PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota yang terhormat,
Yang terhormat Pak Kepala dan Pak Ketua dari mitra-mitra kita BNPT, Komnas HAM dan LPSK beserta seluruh jajaran yang hadir,

Rasanya semua sudah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi terdahulu saya hanya ingin memberikan beberapa catatan saja. Pertama kepada ketiga mitra kita ini saya kira kan dalam laporan BPK RI ada temuan-temuan meskipun sudah saya periksa sebetulnya kalau dikaitkan dengan keseluruhan jumlah

anggaran maupun angka itu tidak terlalu material tetapi karena ini temuan dari auditor negara ya tetap harus Bapak-bapak tindak lanjuti terkait dengan yang temuan BPK RI. Saya tidak ingin sampaikan secara detail satu persatu. Nah untuk BNPT saya mencermati yang tadi disampaikan dipaparkan oleh Pak Kepala BNPT terkait dengan program kerja 100 hari Kepala BNPT yang baru. Nah ini ada yang menarik yang saya ingin juga sampaikan pada kesempatan ini dalam konteks anggaran juga tentunya tetapi sebelum itu saya ingin mengucapkan juga selamat pada Pak Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT yang baru mudah-mudahan Bapak bisa membawa BNPT lebih baik lagi Pak. Kalau sama dengan Pak Suhardi berarti Bapak termasuk orang-orang yang merugi Pak. Kalau lebih jelek celaka Pak baru beruntung kalau Bapak bisa membuat BNPT lebih baik.

Itu kata agama begitu Pak Ketua. Disini ada pada poin 9 program pelayanan rehabilitasi korban terorisme Pak. Ini menarik perhatian saya karena kewenangan BNPT pada Pasal 43 G Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu melakukan koordinasi Pak. Eksekusinya itu ada di Pak Hasto dan kawan-kawan. Nah ini menjadi penting bagi para mitra Komisi III supaya tidak terjadi overlapping kewenangan. Ruang fiskal pemerintah itu sudah sedemikian sempit apalagi ditengah pandemi Covid-19. Jadi prinsip *money follow the program* itu itu harus benar-benar juga kita terapkan *budget follow the program* dan tentu sesuai dengan tupoksi masing-masing nah itu catatan saya yang pertama. Jadi mestinya BNPT tidak melakukan eksekusi yang terkait dengan rehabilitasi korban terorisme. Itu eksekusinya ada pada LPSK, itu politik hukum yang kita sepakati pada saat kita membahas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 nah jadi ini juga untuk catatan untuk kedepan tetapi Bapak mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi termasuk juga dalam konteks koordinasi itu juga mengawasi tupoksinya LPSK. Itu catatan saya untuk BNPT Pak tidak banyak saya kira yang paling penting itu kalau hal-hal lain nanti kita sampaikan dalam rapat kerja pengawasan.

Nah untuk Komnas HAM dan LPSK tadi sudah disebut-sebut istilah di kampungnya Pak Hinca Pandjaitan itu kalau di istilah waktu saya ngaji di kampung saya Pak Hinca itu memang kita itu diajarkan supaya tidak *wujuduhu ka adamihi* ada dan tidak adanya tidak mengganjilkan atau menggenapkan kira-kira begitu artinya. Nah jadi ini menjadi penting nah saya melihat Pak Ketua Komnas beserta seluruh jajaran. Komnas HAM itu sebetulnya bisa menjadi mitra strategis, mitra yang berdampingan dengan Komisi III dalam melakukan tugas-tugas fungsi pengawasan terutama dalam urusan penegakan hukum. Karena tupoksinya Komisi III itu kan memang hukum, ham dan keamanan nasional ini bisa, nah saya sudah bolak balik meminta sama mantan pacar saya yang di Komnas HAM Ibu Sandra Moniaga. Jadi saya minta tadi sudah disoroti supaya temuan-temuan apa pun katakanlah apa pun ya disebut laporan berkala itu tolonglah sampaikanlah kepada Komisi III.

Kalau pun sudah disampaikan ke DPR RI sebagai Kelembagaan tidak ada salahnya Bapak itu mengirimkan kepada Sekretariat Komisi III Pimpinan dan paling tidak poksi-poksi. Lebih bagus lagi kalau setiap Anggota Komisi III yang 53 itu dikasih semua. Karena itu akan menjadi bahan yang dahsyat

ketika nanti rapat kerja pengawasan dengan jajaran Polri, juga dengan Kejaksaan dan juga mungkin dengan BNPT juga terkait dugaan-dugaan pelanggaran yang sudah disentuh atau diselidik oleh Komnas HAM ini dahsyat Pak. Sehingga kami di Komisi III juga itu tadi wujudnya Komnas HAM juga bisa kita lihat lebih baik sehingga minta tambahan anggaran juga gampang konsidrannya bagi kita itu yang saya harapkan. Dari pada Bapak hanya konpers dimuat memang di media-media mainstream tetapi apa orang ingat setelah dua hari setelah baca. Kalau di Komisi III pasti kita ingat Pak karena kalau bahkan kemudian kita tuangkan sebagai katakanlah kita serahkan misalnya kepada Kapolri atau Jaksa Agung tidak dilaksanakan kita tanya lagi Pak apalagi menjadi kesimpulan rapat.

Nah ini penting ini kalau mau merayu Komisi III biar anggarannya lebih itu itu sebetulnya menurut saya. Saya kasih jalan keluarnya itu Pak Hinca biar kelihatan begitu loh apakah mau kuartalan, mau semesteran mestinya jangan tahunan kalau tidak kuartalan semesteran. Terutama kerja-kerja penyelidikan yang menjadi kewenangan Bapak itu sampaikan kepada Komisi III supaya kita suarakan juga. Kalau yang penting Komisi III baca wah kita kunker ini kesana kalau nanti Covidnya sudah hilang begitu loh Pak kalau sekarang ya jangan kunker begitu kemaruk nanti. Jadi itu Pak ini Komnas HAM itu dibawah Bapak-bapak ini saya sudah melihat tracknya lebih baik ini walaupun kurang bagus dibandingkan dengan periode sebelum komisioner sebelum Bapak, isinya hanya berantem saja itu, ya Mba Sandra begitu kan bukan. Sekarang sebenarnya sudah lebih baik saya melihat jadi itu yang saya inikan. Nah ini untuk LPSK juga saya setuju juga LPSK ini agak galakan sedikit. Sekali-kali misalnya kalau Polisi periksa saksi tidak benar komentari saja Pak LPSK. KPK apalagi komentari saja tidak usah takut nanti dianggap tidak pro pemberantasan korupsi. Kita juga sering komentari kalau perlu ya sampaikan juga kepada Komisi III bahan-bahan itu.

Karena banyak juga orang diperiksa berjam-jam dan tidak jelas pertanyaannya penyidikanya tidak siap. Ini sebetulnya diperiksa ini entah dipanggil karena pesanan atau apa menjadi tidak jelas. Nah ini kalau LPSK juga bisa mengambil sisi itu ya bagus juga begitu loh. Nah yang berikutnya saya kira ini mesti kita *clearkan* dulu juga ini mau ada nanti mungkin juga bahkan kalau perlu diangkat dirapat konsultasi DPR RI dengan Presiden. Ini ko soal LPSK masih jadi satkernya Setneg ini ko tidak selesai-selesai begitu kan sudah ada Pak Setjennya kan sudah berapa dua tahun. Sudah mempunyai Kesetjenan sendiri kalau dibawah Setneg karena belum ada Kesetjenannya sekarang sudah ada ko tidak pisah-pisah. Nah ini saya kira ini harus kita *clearkan* agar tahun depan kita bicara anggaran itu benar-benar sudah mandiri. Jadi mungkin nanti kita komunikasi lebih lanjut supaya ini kita *clearkan* juga. Kalau perlu nanti Pimpinan Komisi III bertemulah dengan Mensetneg soal ini. Terima kasih saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Arsul terima kasih.

Mengingat waktu kita *break* dulu setengah jam, jam 14.00 WIB nanti kita ketemu.

F.PDI-P (ICHSAN SOELISTIO):

Pak Ketua.

Saya bisa satu menit saja Pak Ketua jadi supaya nanti masuk *break* tinggal jawaban saja Ketua. Satu menit saja

KETUA RAPAT:

(Tidak pakai mic).

F.PDI-P (ICHSAN SOELISTIO):

Terima kasih Ketua.

Yang saya hormati kawan-kawan Komisi III,
Para mitra yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu,

Pak Kepala BNPT saya hanya mau menanyakan saja. Dari anggaran ini apakah Bapak sudah mengantisipasi kekuatan-kekuatan atau modernisasi dari pada teroris Pak. Dengan kegiatan mereka yang sudah menggunakan CBR segala macam itu apakah Bapak sudah siap untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu Pak karena ini barang mahal ya kan. Artinya Bapak bukan bagian dari pada kaumnya, untuk itu tetapi persiapan-persiapan Bapak terhadap itu Pak dan juga tadi Pak Hinca sudah menyebut soal kounter teroris *financing*. Saya kira ini penting Pak karena Bapak mencegah atau memputus *fianncing* mereka itu lebih penting dari pada yang lain-lain Pak karena lebih karena modal dari pada kegiatan mereka itu adalah disini Pak dan untuk Komnas HAM Pak saya kira Bapak ada salah ada tolong perbaikan Pak karena saya cari-cari di dalam presentasi Bapak pagu indikatif Bapak tahun 2021 itu 80 miliar 252 sekian ditambah Komnas Perempuan 22 miliar sekian jumlahnya 100 diatas.

Jadi di halaman 4 Pak presentasi ini Pak yang dilepas ini. Jumlahnya 100 jadi kalau kita jumlah dua ini sebetulnya 102. Saya cari-cari dilaporan Bapak yang tertulis ini yang dalam buku Bapak disini tulisnya RKA 20, 21 tetapi saya cari angka-angkanya disini 22, 21 tidak ada sama sekali Pak. Jadi tolong kalau ini dikurangi berarti anggaran Bapak itu tidak sampai 80 miliar Pak. Jadi tolong diberi penjelasan karena ini jelas maksud saya Pak ya karena jumlah Bapak itu cuma 100 sekian miliar bukan 104 ini sudah 102 Pak dan berikutnya ya untuk LPSK saya kira saya tidak banyak komentar karena memang penting yang tadi disampaikan oleh Arsul bahwa Bapak harus bisa berdiri sendiri untuk menjamin legalitas bukan legalitas, kekuatan Bapak sehingga bisa bekerja sesuai dengan tupoksi Bapak.

Terima kasih Pimpinan.

F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Pimpinan sebelum ditutup sekalian saya ambil jatah dua menit. Kalau dilanjutkan sebentar langsung dijawab saja. Dua menit saya bicara sebentar.

KETUA RAPAT:

Satu menit ya.

F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Satu menit boleh.

KETUA RAPAT:

Oke.

F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Pertama saya harus ucapkan dulu terima kasih kepada semua mitra kerja Pak BNPT, Komnas HAM, LPSK, kemudian Komnas Perempuan. Kepada Teman-teman semua yang saya hormati dan Pimpinan yang terhormat,

Saya langsung saja supaya bisa memuat ini dalam tempo satu menit mulai dihitung dari sekarang ya. Untuk BNPT saya tidak berusaha untuk mengulangi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Bisakah BNPT melakukan yang namanya cegah dini. Sebagaimana yang terjadi pada saat mau tsunami ada namanya aba-aba yang muncul. Ketika ada muncul kira-kira ada letupan-letupan dimana-mana bisakah dirumuskan itu bahwa kalau gerakannya mulai dari barat sana akan muncul persoalan seperti ini yang terjadi. Kalau munculnya dari timur maka persoalan teroris yang terjadi dari sana jaringannya kemana, jaringannya ke internasional, jaringannya ke dalam negeri seperti apa. Kira-kira deteksi dininya kita bisa rumuskan mungkin kalau Pak Kepala BNPT disambung dengan ilmu Kepolisian kira-kira ini bisa di dapat ini. Supaya kita bisa mencoba jangan lagi ada kecolongan begitu ada letupan terjadi baru kita tahu oh ada lagi teroris masih ada ternyata jaringannya, ini yang saya maksud Pak Kepala BNPT.

F-P.NASDEM (EVA YULIANA, M.SI):

Izin Pimpinan.

Ini soal anggaran bukan soal pengawasan mengingatkan saja terima kasih.

F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Tidak apa-apa ini kan saya mau berbicara tentang bagaimana nanti harapan-harapan ini dengan anggaran nanti yang dibutuhkan. Bagaimana

mau berbicara tentang anggaran tetapi tidak ada *follow up*-nya. Saya melihat disini anggarannya

KETUA RAPAT:

Lanjut Pak lanjut waktu Pak.

F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Anggaran 700 sekian miliar yang dibelanjakan hanya 600. Jangan-jangan kurangnya inovasi yang ada di BNPT yang melahirkan anggaran kurang diterima kurang dibelanjakan hanya kecolongan terjadi dimana-mana letupan.

KETUA RAPAT:

Pak Supri lanjut.

F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ini Ibu Eva mancing saya lagi ini tetapi saya suka kalau Ibu Eva mancing saya.

Ini terima kasih itu yang pertama yang saya sampaikan kepada Kepala BNPT dan jajarannya deteksi dininya itu kira-kira seperti apa. Lalu apakah anggaran yang ada ini tidak cukup. Kalau saya mengatakan tidak cukup tetapi yang dibelanjakan tidak sampai 700 sekian miliar. Maksud saya jangan tanggung-tanggung demi keselamatan bangsa dan negara tidak apa-apa mengajukan anggaran yang sampai berapa triliun asalkan keselamatan bangsa dan negara kita ini warga negara kita ini bisa terselamatkan. Tidak ada masalah bagi saya, lahirkan inovasi-inovasi. Yang kedua karena ini jatah saya sangat sempit sekali Komnas HAM. Komnas HAM saya melihat kepada arah dan kebijakan strategi Komnas HAM saya membaca detail ini. Pelanggaran yang terkait dengan agraria hampir dimana-mana yang ada yang namanya gunung atau hutan lindung selalu berhadapan dengan rakyat. Rakyatnya menanang kayu ditempat itu begitu besar dipotong rantingnya dihukum. Ada jumlah besar ada jumlah sedikit ini yang menjadi persoalan kadang-kadang langsung dipenjarakan.

Begitu masuk pengadilan dia bisa menang mampu membuktikan bahwa tidak bisa dinyatakan bersalah. Ketika secara hukum ini membuktikan masyarakat tidak bisa salah yang terjadi yang dituduhkan kepada dirinya tetapi jarang-jarang ada Komnas HAM mampu berbicara di publik bahwa jangan menyakamakan semua masyarakat seperti itu modelnya. Komnas HAM melihat ini persoalan-persoalan yang ada menurut saya lebih agresif sedikit. Banyak yang terjadi jangan yang saya contohkan yang di luar Jawa, di Jakarta saja kemarin-kemarin terjadi persoalan ditendang, diapain, dipukuli oleh oknum-oknum Polisi yang ada di unjuk rasa sedikit pun tidak ada kalimat-kalimatnya Pak dari Komnas HAM yang mengecam tindakan seperti itu. Saya tahu diantara Pimpinan ini ada sahabat saya aktifis sama dengan

saya angkatan 98 kemarin Pak Hiransyah. Saya tunggu kalimat-kalimatnya tidak muncul juga padahal ini aktifis loh. Saya sama-sama waktu itu di jalan.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Supri kita skors ketemu jam 14.15 WIB.

(RAPAT DI SKORS PUKUL 13.25 WIB)

(SKORS RAPAT DIBUKA PUKUL 14.25 WIB)

Baik selanjutnya dipersilakan kepada Kepala BNPT untuk menyampaikan jawaban penjelasan atas pertanyaan beberapa

Anggota Komisi III yang terhormat,

Tadi tetapi mengingat mereka sudah pada pulang mohon Pak Boy jawab pertanyaan yang hadir saja biar kita singkat.

Silakan Pak Boy.

BNPT (Dr. BOY RAFLI AMAR, M.H.):

Terima kasih Pimpinan atas waktu yang diberikan.

Berarti sementara kami mengawali apa yang disampaikan oleh Pak Hinca Pandjaitan. Kami berterima kasih atas dukungan dari apa yang disampaikan Bapak Hinca Pandjaitan terutama memang benar kami berusaha mempublikasikan secara luas kegiatan-kegiatan terkait masalah pencegahan terorisme ini terutama adalah karena kita menyadari bahwa jaringan teroris global ini propagandanya begitu kuar melalui media dan mereka juga sangat sadar dengan media sosial. Oleh karena itu ruang informasi publik menurut hemat kami perlu kita lawan dengan narasi-narasi kontra terhdap isu-isu terorisme, isu-isu radikalisme, intoleran karena kita khawatir kalau ruang informasi publik ini dikuasai oleh kelompok-kelompok teror tentu akan semakin banyak generasi muda Indonesia akan terpengaruh dengan ideologi-ideologi kekerasan yang diusung oleh kelompok jaringan teroris global. Oleh karenanya salah satu di dalam program 100 hari itu adalah BNPT tv.

Benar kami juga menggunakan media mainstream itu sudah pasti. Kemudian di internal kita juga punya Pusat Media Damai (BMD) sudah jalan juga. Jadi semakin banyak kanal-kanal informasi publik yang bisa kita bangun untuk menyebar luaskan diseminasi progam-program kita maka akan semakin masiflah informasi untuk mengimbangi desiminasi ideologi kekerasan paham-paham radikal yang hari ini begitu banyak diakses oleh generasi muda Indonesia. Oleh karenanya kami berusaha agar chanel tv yang ada ini menjadi ciri khas dari BNPT dalam rangka secara formal menginformasikan kepada publik kita. Disamping tentunya hal-hal yang sifatnya kontra radikalisme dengan menggunakan Pusat Media Damai yang sudah berdiri. Dimana narasi-narasinya terkadang menggunakan influen dari masyarakat sehingga tidak saja selalu suara BNPT tetapi juga suara tokoh-tokoh untuk mengajak hati-hati kepada generasi muda Indonesia.

Karena terus terang saja kelompok-kelompok yang mengusung ideologi terorisme ini hari ini terus propaganda dan bahkan katakanlah dari jaringan isis hari ini mereka dengan sengaja menghimbau kepada seluruh jaringannya di dunia. Apabila mereka tidak bisa ikut bergabung dalam wilayah mereka di Timur Tengah mereka menganjurkan kepada pengikutnya yang telah berbayat secara langsung atau pun melalui online untuk melakukan perjuangannya di negara masing-masing. Jadi ruang informasi publik menurut hemat kami harus kita isi dengan narasi-narasi yang moderat. Kemudian juga pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh kita yang meluruskan pemahaman-pemahaman yang dapat kami katakan pemahaman menyimpang. Karena harus kita akui beberapa peristiwa teror diantara mereka ini ada yang meninggalkan pesan termasuk yang di Dahas Selatan surat. Bahwa mereka adalah sedang dalam berjuang atas nama agama.

Kemudian mereka sedang berjihad kemudian mereka juga menyuruhkan kepada semua untuk bangun dari tidur untuk melakukan serangan jihat kepada yang menurut mereka disebut sebagai tougut. Jadi ada pemahaman yang agak keliru dan bahkan mungkin ini keliru sesat mengatas namakan agama dan bahkan mengatas namakan Tuhan untuk melakukan tindakan teror dan bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu ruang informasi publik kita dengan kanal-kanal informasi yang kita bangun akan mengimbangi, akan menetralsir dan bahkan juga bisa kita isi dengan mendesiminasi paham-paham kebangsaan. Jadi narasi kebangsaan harus kita ideologi pancasila pun harus kita dengungkan secara masif sehingga ideology terorisme ini tidak dominan di ruang masyarakat kita. Jadi niat kami adalah seperti itu dan kemudian dari alat peralatan yang disampaikan oleh Pak Hinca kaitan masalah *data center* benar.

Di dalam usulan kami memang telah disebutkan pembangunan Pusat Pengendalian Krisis yang isinya ada alat peralatan data center database. Database ini digunakan oleh Pusdalsis termasuk menganalisis jaringan teroris global yang nantinya pada saat situasi krisis dapat menjadi alat bantu bagi seluruh peserta yang diundang dalam konteks sebagai anggota yang diamanatkan di dalam Undang-Undang. Jadi terima kasih kami akan mencoba terus mengakomodir masalah penerapan sistem teknologi di dalam kegiatan analisis yang di dalam Undang-Undang disebut sebagai Pusdalsis. Di dalam catatan kami usulan kita tahap tahun 2021 ini kami mengajukan 100 miliar. Apakah ini cukup tentu kami akan melihat dengan kondisi kekinian dari kemampuan keuangan negara. Yang apabila memang nanti ini disetujui paling tidak tahap awal Pusdalsis ini bisa kita operasionalkan dengan dukungan teknologi informasi yang memadai. Andaikan pembangunan teknologi informasi yang *blue printnya* sedang kita siapkan ini bisa kita lakukan dengan cara multiyers.

Jadi kami akan coba dulu mudah-mudahan ini di dapat di acc karena kalau kami ajukan secara lengkap sepertinya angkanya cukup membengkak. Oleh karena itu kami estimasikan plafon dari penghitungan sementara pada tahap satu pemberlakuan dari Pusdalsis yang di dukung dengan sarana IT ini kami ajukan sebagaimana dalam dokumen yang telah kami sampaikan yaitu

Rp 100 miliar. Demikian juga dengan media sosial yang tentunya kami berusaha juga untuk masuk kepada akun-akun yang banyak diminati oleh masyarakat kita. Karena kita sadar sudah lebih dari 100 juta pengguna akun media sosial adalah masyarakat Indonesia yang tentunya sangat dimungkinkan mereka dapat mudah mengakses konten-konten narasi radikal yang selama ini disebar luaskan oleh kelompok-kelompok radikal. Yang berikutnya berkaitan dengan masalah kounter teroris *financing*. Kami umumnya dalam rangka kerja sama diantara Aparat Penegak Hukum. Jadi kami ada Direktorat kaitan penegakan hukum tetapi isinya sebenarnya adalah kordinasi dan kerja sama.

Karena kami tidak sebagai penyidik kita tidak melakukan pemberkasan perkara jadi kita hanya mengkordinasikan. Terkait dengan hal-hal teroris *financing* ini tentu adalah kounterpet kita PPATK. Sejauh ini kami sudah bekerja sama dengan baik segala informasi yang kami terima dari mitra kita di luar negeri beberapa kali mitra kita di luar negeri banyak masukan yang kemudian kita minta bantuan kepada PPATK untuk melakukan analisis transaksi keuangan dan kemudian hasilnya itu kita jadikan dasar untuk kita kordinasikan dengan Aparat Penegak Hukum lainnya. Jadi kepada siapa kepada Densus 88. Nah untuk kerja dengan Densus 88 ini memang keterkaitannya cukup erat antara BNPT karena kita diakomodir dengan adanya satuan tugas dan satuan tugas yang bersama-sama diantara Aparat Penegak Hukum yang ada. Bahkan juga melibatkan dari unsur-unsur diluar Polri seperti unsur Kejaksaan sehingga apabila ada hal-hal yang terkait kordinasi dibidang penegakan hukum kita bisa cepat termasuk juga tentu di dalamnya adalah unsur dari Dirjen Lapas. Kemudian di dalam lainnya yang disinggung oleh Pak Hinca tentu seputar hal tersebut masalah buser.

Ini juga masukan yang dapat kami catat jadi kami upayakan karena memang untuk menggunakan buser dalam rangka desiminasi informasi yang positif yang kemudian narasinya memoderasi paham-paham kekerasan ini juga menjadi solusi yang bagus. Karena tentu kita ingin masif agar semua *massage* kita ini bisa diterima oleh sebanyak-banyaknya para pengguna akun media sosial. Jadi saya anggap ini sebagai masukan dalam kontra radikalisme di dunia maya terutama dan ini akan kita coba akomodir sehingga *massage* kita bisa semakin luas bisa mencapai keseluruhan lapisan masyarakat. Kemudian yang berikutnya dari Ibu Ade Rosi dulu. Yang kedua mengenai yang disampaikan Ibu Rosi adalah terkait masalah anggaran yang terus bertambah. Anggaran kami memang yang kami usulkan tidak lepas dari pagu indikatif yang telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas. Jadi kita tidak bisa karena yang berikutnya juga kita tentu dengan kondisi kekinian kita menyadari bahwa kondisi keuangan banyak fokus kepada penanganan pandemic Covid.

Termasuk di internal kita yang juga di *refocusing* dan realokasi. Kemudian di dalam penanganan masalah kerja sama. Dalam membangun kesiapsiagaan nasional yang sedang kita rumuskan adalah kerja sama yang lintas profesi, lintas etnik, lintas agama dengan melibatkan komponen masyarakat yang seluas-luasnya. Jadi yang pernah dibahas pada tahun 2019 ini kami mencoba melakukan perluasan pelibatan unsur masyarakat agar

kesiapsiagaan ini bisa semakin masif di tengah-tengah masyarakat. Kenapa tentu ini memerlukan peran serta masyarakat yang banyak karena kita menyadari bahwa penetrasi kelompok jaringan teror ini bisa masuk keseluruhan lapisan masyarakat. Korban dari peristiwa kejahatan teror ini bisa mengenai ke siapa saja tidak melihat setrata sosial, tidak melihat gender dan sebagainya. Oleh karena itu di dalam upaya membangun sebuah sinergi yang luas untuk terwujudnya kesiapsiagaan nasional yang juga pada gilirannya akan menimbulkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat.

Ini sedang kita persiapkan pedomannya termasuk rencana deklarasi yang akan kita laksanakan mudah-mudahan bisa dilaksanakan bertepatan dengan 28 Oktober yaitu Hari Sumpah Pemuda. Rencana kami pada hari itu kita akan meminta kepada seluruh komponen masyarakat bahwa kita semua totalitas harus berperang melawan terorisme, berperang melawan ideologi terorisme yang mengusung kekerasan. Memang benar tidak identik dengan agama tertentu tetapi kalau kita pelajari satu persatu peristiwa kejahatan terorisme yang ada di Indonesia umumnya menggunakan symbol-simbol agama tertentu yang mereka seolah-olah sedang berjuang atas nama agama. Kemudian mereka mengatakan sedang berjihad dan kemudian mereka memerangi pihak-pihak negara yang dianggap menurut mereka dioperasionalkan bukan dengan hukum yang menurut mereka. Jadi yang dioperasionalkan dengan hukum negara dianggap adalah lawan yang harus diperangi. Kemudian dengan kerja sama Dirjen PAS kemudian juga dengan Kominfo kalau dengan Dirjen PAS kami sangat erat sekali kerja samanya karena ada program deradikalisasi. Jadi program deradikalisasi ini dilaksanakan dimasa penyidikan, kemudian dimasa penuntutan, dimasa menjalani hukuman, kemudian pasca tetapi dengan Dirjen PAS tentu fokus kami adalah ketika menjadi mereka sebagai warga binaan.

Seperti diketahui bahwa Dirjen PAS mengelola beberapa rutan termasuk rutan yang berada di dalam lokasi kantor BNPT Sentul., dimana hari ini tersisa sekitar 14 yang mereka mengikuti program deradikalisasi setelah di asesmen. Mereka setelah di asesmen yang berasal dari rutan lapas Gunung Sindur berasal dari Nusa Kambangan juga berdasarkan dari LP-LP yang ada di daerah yang ada kedatangan napiter tim terlebih dahulu melakukan asesmen dan ketika mereka dianggap sudah sangat kooperatif dan bisa masuk kepada program deradikalisasi yang dilaksanakan di Sentul di kantor kita maka mereka akan dikirim ke Sentul. Namun demikian apabila mereka masih belum layak untuk di datangkan atau dipindahkan ke lapas yang berada di Sentul maka mereka tetap berada di tempat masing-masing. Sejumlah program dilaksanakan tetapi pada intinya fokus kepada perubahan mindset dari para napiter ini. Karena pada napiter ini kan menganggap negara ini sebagai musuh yang harus diperangi termasuk aparat-aparat yang ada di dalamnya.

Jadi kita merubahkan *mindset* dulu mencoba mereka kembali mengingatkan siapa mereka, kemudian membangun semangat nasionalisme mereka kembali, kemudian menyadari bahwa perbuatan mereka itu adalah keliru dan kemudian mereka kita bekali program latihan kerja. Jadi program latihan kerja ini bercocok tanam atau pun berkaitan dengan perternakan,

perikanan, termasuk kemampuan dibidang mekanik. Disitu ada balai-balai latihan yang memang dipersiapkan untuk mereka. Jadi lapas tentunya merupakan bagian yang erat hubungannya dengan kita dalam program deradikalisasi. Selama ini mereka-mereka yang masih dianggap belum layak untuk dipindah ke lapas di Sentul maka mereka tetap akan menjalani di lapas masing-masing seperti di Nusa Kambangan. Jadi mayoritas hari ini narapidana terorisme yang terbesar jumlahnya ada di Nusa Kambangan. Kemudian dengan Kominfo kami pernah bertemu dengan Pak Menteri langsung dan kami menyampaikan dan bahkan kami mengusulkan kita perlu ada DES penyimpangan informasi atau penyalahgunaan media sosial.

Pak Menteri Bapak Johnny Plate waktu itu setuju jadi maksud dari DES ini adalah untuk sama-sama kita sharing temuannya. Misalkan dari Polri, dari BNPT, kemudian dari BIN, BSSN, kemudian juga dari Polri ada inteletik disana yang juga mencermati kondisi media sosial yang berkembang di masyarakat. Ini bisa menjadi pembahasan dan merencanakan bagaimana tindak lanjut dari keberadaan konten-konten ini. Jadi secara fisik memang kami sarankan kepada Bapak Menteri. Karena memang benar otoritas itu ada di Bapak Menteri katakanlah untuk tack down itu kita harus kordinasi dengan profider dan sebagainya tetapi bagaimana informasi yang mengancam negara ini bisa menjadi fokus kita. Yang merusak generasi muda kita dari sisi pemahaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memaksakan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan pancasila. Jadi ini yang kita bahas dan sudah dalam tahap rapat dengan Bapak Menkoinfo mudah-mudahan DES informasi yang sifatnya penanganan penyalahgunaan dunia maya ini bisa kita wujudkan sehingga fokus kita bisa sama-sama sinergi kita bisa samap-sama. Mana yang dapat kita langkah-langkah tack down mana yang bisa kita lakukan dengan langkah-langkah penegakan hukum karena kalau sudah penegakan hukum berarti bisa jadi masuk kepada Direktorat Cyber Crime yang dibawah penanganannya oleh Bareskrim Polri.

Kemudian terkait masalah pelibatan terlibatnya perempuan anak. Dalam program yang kami sampaikan itu termasuk juga perlindungan perempuan dan anak dalam kasus terorisme korban terorisme sebagaimana yang ada di pengungsian hari ini. Karena dari estimasi sekitar 1.500 mereka yang berangkat akibat propaganda isis ini ada perempuan dan anak asal Indonesia di dalamnya. Ini juga menjadi sesuatu hal yang perlu kita bahas maka di dalam perlindungan kepada perempuan dan anak ini tentu perlu ada langkah-langkah lebih lanjut di dalam realisasinya. Bagaimana program-program konkrit yang tentunya harus kita bicarakan dengan termask dengan Komnas HAM, termasuk dengan LPSK, tentunya termasuk juga dengan Kementerian PPA, termasuk juga tentu Kementerian Kumham berkaitan dengan status hukum mereka kelak seperti apa tetapi sebagai informasi berdasarkan data yang kita terima bahwa dari anak-anak yang ada dalam cam pengungsian setidaknya-tidaknya 80 anak dibawah 10 tahun itu sudah positif berasal dari Indonesia yang dibawa oleh orang tuanya.

Ini kan perlu langkah-langkah lebih lanjut yang harus kita lakukan kedepan. Kita masih berupaya untuk bisa mendapatkan ferivikasi kesempatan ferivikai berikutnya karena belum seluruhnya terferivikasi. Jadi kami sedang

merumuskan dengan tim satuan tugas yang ada dibawah kordinasi Bapak Menko Polhukam untuk juga nanti kemungkinan berangkat kembali ke darah Irak Utara terutamanya di daerah wilayah dominasi suku yang ada disana ada kurang lebih 3 cam pengungsian yang juga nanti kita bisa tingkatkan lagi untuk pentahuan kita dibidang data orang perorang yang ada disana. Hal ini juga termasuk penggunaan data dukcapil yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi dengan teknologi hari ini di Kementerian Dalam Negeri bisa kita manfaatkan berdasarkan foto sehingga kita bisa tahu jika memang pernah tercatat dalam sistem dukcapil di negara kita. Kemudian terkait dengan masalah rencana aksi nasional yang berkaitan dengan masalah perlindungan perempuan dan anak.

Ini berkait dengan masalah kesiapsiagaan nasional juga yang tentunya paling tidak kesiapsiagaan ini juga harus ada dikalangan perempuan atau wanita Indonesia. Karena apa karena juga disamping dirinya sendiri yang kemungkinan bisa terbawa kalau dia terbawa oleh suami mungkin sesuatu hal yang karena intensitasnya hubungan itu begitu kuat antara suami dan istri sehingga suaminya terpapar istrinya bisa jadi terbawa dan bahkan anaknya. Namun demikian kita juga tent harus mengupayakan mereka-mereka yang seorang ibu kemudian punya anak masih muda remaja yang tentunya harus dilindungi. Yang artiannya disini jangan sampai anak-anak ibu-ibu orang Indonesia ini semua terekruit karena yang terekruit ini umumnya adalah usianya masih relatif muda. Contohnya yang di Daha Selatan 20 tahun itu adalah contoh terakhir tetapi berdasarkan catatan kita pelaku-pelaku bom bunuh diri yang direkrut ini adalah umurnya 18 sampai 20, 21, 23. Jadi kerentanannya adalah bagaimana anak-anak Indonesia ini perlu kita ingatkan kewaspadaan dari ibu diseluruh Indonesia terhadap membangun ketahanan keluarga. Karena tentu ibu adalah tiang keluarga yang tentu kita harapkan bisa ikut meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka terutama dalam pergaulannya sehari-hari.

Karena tadi sudah begitu mudah akses media sosial kemudian juga dengan pergaulan yang apabila tidak dikontrol diikuti oleh para orang tua ibu, sangat besar kemungkinan pada akhirnya terpapar virus radikalisme dan sehingga mereka tanpa disadari melakukan aktifitas-aktifitas yang selama ini dari kelompok jaringan yang ada yang sudah teridentifikasi di kita seperti saya sebut saja jamaah Islamiyah, kemudian ada Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat mereka begitu aktif untuk merekrut generasi baru. Jadi dapat diprediksi hari ini berdasarkan penelusuran kita hampir setiap provinsi mereka memiliki organisasi-organisasi yang tujuannya adalah merekrut generasi muda. Melakukan penyiapan mereka yang akan berangkat ke luar negeri termasuk mereka yang dipersiapkan untuk melakukan aksi-aksi serangan teror di dalam negeri jadi mereka tidak pernah berhenti. Masalah FKPT 32 provinsi jadi memang benar 2 provinsi kita belum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu Papua dan Papua Barat.

Jadi 32 provinsi ini selama ini intens dimasa Covid ini apalagi kita melakukan virtual pertemuan dengan beliau-beliau, 8 provinsi yang aktif. Jadi masing-masing FKPT di provinsi ini juga menjadi kepanjangan tangan yang kita buat adanya Pusat Media Damai. Jadi mereka sudah ada 13 juga yang

berpartisipasi dalam Pusat Media Damai kepanjangan tangan dari media damai yang dibuat oleh BNPT. Jadi di 13 provinsi ini mereka melakukan aktifitas mendesiminasi nilai-nilai kebangsaan kemudian kontra narasi terkait radikalisme dan bahkan juga ikut memproduksi video-video pendek yang disebar luaskan kepada masyarakat. Jadi mereka merupakan jejaring kita dalam media sosial dan kepanjangan tangan kita dalam koordinasi dengannya. Jadi mereka juga bertemu dengan tokoh-tokoh alim ulama, tokoh agama lainnya, tokoh pendidikan, tokoh perempuan dan tokoh pemuda yang ada di masing-masing daerah. Membangun sebuah semangat untuk melawan kejahatan terorisme apalagi nanti misalkan kita canangkan kesiapsiagaan nasional maka ujung tombak kita adalah FKPT.

FKPT akan mengkonsolidasikan kekuatan di daerah kemudian melakukan langkah-langkah koordinasi lebih lanjut agar di masyarakat kita memiliki daya cegah dan daya tangkal. Jadi daya cegah dan tangkal ini secara masif bisa dilakukan oleh masyarakat dengan meningkatkan kepedulian masyarakat. Kalau dari sisi petugas mungkin sudah pakai IT. Kita sudah melakukan upaya-upaya antisipasi. Penelusuran jejak-jejak digital dari para mereka yang terlibat aksi teror beserta jaringannya. Kalau kita petugas sudah memanfaatkan IT tentu masyarakat tidak bisa kita bebaskan terlebih dulu hal-hal seperti itu tetapi minimal masyarakat memiliki sebuah kepedulian yang tinggi bahwa dikiri kanannya mereka sangat mungkin bahwa orang-orang yang tengah mempersiapkan jaringan atau rencana aksi teror itu berada disekitarnya. Beberapa pengalaman dari kebetulan sejak tahun 2002 kami juga aktif di tim investigasi bom Bali jadi kita melihat bagaimana menemukan bahwa ternyata pelaku-pelaku itu bisa kos-kosan kontrakan di tempat-tempat di rumah-rumah yang masyarakat tidak paham mereka itu siapa. Nah ini kaitan masalah kepedulian jadi jadi kita dengan FKPT tentu juga nanti bersama-sama membantu meningkatkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat sehingga ruang gerak dari kelompok jaringan teror ini semakin sempit. Masyarakat kita semakin peduli dan kemudian tidak ada kesempatan lagi jaringan teror ini untuk leluasa bergerak.

Tentu ini sesuatu hal yang tidak mudah Indonesia adalah negara yang terdiri dari gugus Kepulauan lebih dari 17.000 Sabang sampai Marauke tersebar luas lebih dari 260 juta penduduk yang tentunya berfariasi kepeduliannya. Nah inilah tentu suatu kegiatan yang secara terus menerus yang kami dengungkan kami canangkan sehingga lambat laun lama-lama sadar akan hadirnya kejahatan terorisme ini bisa sampai ke masyarakat yang berada di pelosok-pelosok di kampung-kampung. Karena pelaku-pelaku teror ini bukan saja hidup di perkotaan tetapi mereka lari kemudian sembunyi di kampung-kampung. Itulah sesuatu kondisi yang terus kita perjuangkan.

KETUA RAPAT:

Pak Boy fungsi anggaran saja yang agak detail.

BNPT (Dr. BOY RAFLI AMAR, M.H.):

Oh siap.

Fungsi anggaran berikutnya adalah Ibu Sari Yulianti berkaitan dengan anggaran BNPT. Memang benar di dalam pelaksanaan deradikalisasi kami juga menyadari belum maksimal. Jadi anggaran-anggaran yang ada memang kita harapkan dapat menopang karena deradikalisasi ini sebenarnya merubah mindset. Jadi proses perubahan mindset tadi sesuai dengan Undang-Undang sudah kami sampaikan sejak pada tahap penyidikan, penuntutan, masa penghukuman di lapas dan pasca. Tidak semua tahapan-tahapan ini berjalan maksimal. Jujur saja untuk melakukan pengawasan pelaksanaan program deradikalisasi terhadap seluruh mantan narapidana tentu yang pasca menjalani hukuman ini sesuatu yang terus kita sempurnakan. Jadi tentunya juga contoh yang di Karanganyar karena yang bersangkutan tahun lalu baru keluar dari lapas. Keterkaitan keterlibatan bom Thamrin tahun 2016. Jadi dia bukan pelaku inti tetapi adalah pelaku hasil pengembangan yang informasi di vonis 4 tahun. Nah setahun yang lalu sudah keluar dari lapas kami menyadari pengawasan-pengawasan pasca penghukuman ini termasuk yang tidak mudah. Namun demikian anggaran kami upayakan secara terukur program itu memang dihitung benar.

Kalau di dalam lapas bisa kita hitung programnya demikian juga pada masa penyidikan, masa penuntutan. Namun demikian jumlah narapidana yang bebas yang telah habis masa hukumannya ini tentu mereka tidak secara serta merta langsung. Ada yang juga ikut program kita langsung dan bahkan mereka menjadi mitra kita menjadi sahabat-sahabat kita dalam deradikalisasi di masyarakat. Namun demikian ini juga tentu akan kita sempurnakan terus jadi BNPT dalam upaya pencegahannya juga tidak mungkin melakukan tugas-tugas itu sendiri. Nah dalam deradikalisasi ini disamping program yang kami sampaikan tadi kami juga melakukan yang namanya program sinergitas dengan Kementerian dan Lembaga. Kementerian Lembaga ini sudah disepakati ada MoU ada program-program yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Lembaga terkait tetapi tujuannya adalah menghadirkan negara. Jadi negara hadir daerah-daerah itu kemudian membuat para penduduk yang hasil mapping kita itu ternyata memiliki ke khususan dalam keterkaitan dengan paham-paham radikal tentu ini menjadi pilihan yang kami rencanakan dan kita program-program dari Kementerian ini bagian dari hadirnya negara baik itu yang sifatnya pembangunan fisik.

Termasuk tadi beberapa saran dari Romo termasuk berkaitan masalah saran penggunaan agro wisata ikhwan ini akan kami revisi jadi nomenklatur ini tidak akan kami teruskan mungkin nanti akan kami rubah tidak memakai kata-kata yang spesifik tadi tetapi itu adalah semangat bagaimana pemberdayaan dalam mederadikalisasikan paham-paham yang berkembang di masyarakat. Jadi ini perlu keterlibatan semua pihak oleh karena itu BNPT dengan tugas yang sifatnya mengkoordinasikan kami berharap semakin banyak kepedulian baik itu dari jajaran pemerintah maupun di kalangan masyarakat untuk menyadari bahwa paham-paham radikal ini paham-paham yang mengusung kekerasan umpamanya dapat kita lakukan langkah-langkah moderasi sehingga tidak mempengaruhi alam pikiran masyarakat Indonesia lainnya. Kemudian dari Pak Supriansah terima kasih Pak Supriansah oh Ibu Eva belum ya jadi kami mundur dulu ke Ibu Eva.

Terima kasih kepada Ibu Eva yang telah memberikan apresiasi kepada BNPT dan tentunya di dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diemban ini beberapa hal tadi yang ibu soroti adalah kaitan masalah penambahan dari anggaran BNPT. Oleh karena itu memang anggaran tentu juga berbasis kepada program. Jadi dalam penyusunan ini kami tetap patuh terhadap pagu indikatif namun demikian beberapa keperluan-keperluan yang kami perlukan dikaitkan dengan masalah sarana dan prasarana dan sebagainya tentu akan kami usulkan. Hari ini memang secara khusus usulan kami yang sejak beberapa tahun tidak dikabulkan adalah masalah pengadaan sarana prasarana data center untuk melengkapi dari Pusdalsis kita. Tadi kami sudah singgung juga dan kami berharap di 2021 pembangunan *data center* ini bisa kita lakukan karena dalam 2 tahun terakhir ini gagal dilaksanakan dan mudah-mudahan ini di tahun 2021 sebagai satu hal yang juga merupakan prioritas karena ini sudah diamanatkan di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 keberadaan Pusdalsis itu adalah anggaran tambahan yang kami persiapkan untuk di tahun 2021 dan semoga dapat dukungan dari Bapak-Bapak yang ada di Dewan.

Kemudian dari sisi yang berikutnya adalah masalah kualitas kinerja yang tentunya memang ini menjadi hal yang kita fokuskan dalam upaya penerapan program 100 hari yang coba kami tambahkan bukan untuk merubah dari program yang sudah ada tetapi merupakan program *quick win* yang kita harapkan memiliki daya ungkit dalam rangka percepatan pencapaian target nah oleh karena itulah dalam upaya peningkatan kualitas kinerja ini kami mencoba memanfaatkan pada saat ada petunjuk dilakukannya realokasi *refocusing* termasuk dalam upaya menghadapi pandemi Covid setidaknya-tidaknya untuk internal kami agar semuanya tetap sehat maka kami juga melihat beberapa hal yang memiliki daya ungkit agar akuntabilitas dari BNPT ini semakin bagus termasuk juga program-program reformasi birokrasi. Program reformasi birokrasi ini yang kami sampaikan adalah kita agak sebelumnya belum mencanangkan BNPT sebagai zona integritas kawasan wilayah bebas korupsi wilayah bebas melayani nah kami coba masukkan itu dalam program 100 hari ini tentunya semuanya adalah dilandaskan semangat untuk terjadinya sebuah peningkatan kualitas kinerja yang kemudian juga dilandaskan semangat transparansi akuntabilitas yang terjaga dikalangan personil kami tentunya juga kami menyadari dengan anggaran-anggaran yang ada ini harus dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mengeliminasi potensi dari ancaman terorisme dan aksi terorisme yang ada di negara kita.

Kemudian untuk berikutnya berkaitan dengan pertanyaan Bapak Supriansa berkaitan dengan kesiapsiagaan nasional yang terkait dengan cegah dini nah tadi kami sudah singgung terkait dengan cegah dini dalam hal ini kesiapsiagaan nasional lah termasuk salah satu sarana dalam rangka meningkatkan daya cegah dini masyarakat disamping juga di dalam undang undang kita melibatkan kementerian lembaga maka di dalam koordinasi dengan kementerian lembaga termasuk juga menyoroti dugaan-dugaan adanya paham-paham terkait masalah radikalisme di kementerian lembaga kami juga berkoordinasi kemudian juga di perguruan tinggi demikian kemudian juga di masyarakat sendiri tentunya kita yang berkaitan dengan

masalah ini tadi sudah menggunakan teknologi informasi namun demikian yang secara manual yang secara konvensional yang dapat dilakukan oleh masyarakat kita adalah meningkatkan kepedulian masyarakat kita berkaitan dengan pemberdayaan dari Aparatur Negara kita juga menyadari bahwa di jajaran di daerah-daerah ini ada unsur kepolisian, ada unsur TNI, ada unsur dari Pemerintah Daerah yang mereka juga punya komunitas intelijen di daerah ini juga menjadi pemberdayaan yang harus kita manfaatkan karena pada dasarnya kemampuan cegah dan kemampuan dini sejauh mana kita mampu mendeteksi jadi *early detection* yang maksimal lah yang pada akhirnya kita bisa melakukan langkah-langkah proaktif langkah-langkah antisipatif yang lebih awal jadi terima kasih untuk cegah dini yang tadi disarankan kita juga tidak ingin istilahnya ada kecolongan walaupun kondisi-kondisi itu sangat mungkin terjadi tetapi tentu dengan kepedulian yang tinggi dengan kerja sama Aparatur Negara di daerah yang harmonis erat di dalam deteksi segala fenomena gelagat perkembangan terkait dengan paham-paham radikal yang ada ini bisa dilakukan secara maksimal di daerah-daerah. Jadi sarannya adalah terbangunnya kesiapsiagaan nasional yang ada di masyarakat kita ini yang akan kami lakukan semaksimal mungkin karena dengan penekanan tugas di bidang pencegahan sesuai dengan Undang Undang 5 Tahun 2018 maka diharapkan BNPT bisa membangun sebuah kekuatan kerja sama yang efektif di antara kementerian lembaga dan masyarakat.

Kemudian yang berikutnya.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Pimpinan, saya hanya mau mempertajam sedikit ini Pak Jenderal cukup tidak anggaran yang ada sekarang ini kira-kira masih perlu tidak kita berpikir untuk menambah anggaran supaya bisa kita melakukan hal-hal pencegahan yang lebih jelas seperti saya contohkan dulu sawan dulu belum ada alat yang bisa mendeteksi gempa tsunami seiring perkembangan ilmu sudah bisa dideteksi dengan membeli alat kalau kita bawa ke dunia terrorism kan ada simpul-simpul itu saya kira dari Kepolisian pasti paham disini bergerak di belakangnya ini tujuannya di sana maksud saya adakah alat yang bisa kita gunakan mempercepat ini koordinasi antara ya saya katakanlah BNPT berkoordinasi dengan BIN berkoordinasi dengan siapa yang lebih jelas supaya memang ada koordinasi ini yang tidak terputus tidak disadap oleh orang karena saya masih yakinkan bahwa kecerdasan orang-orang yang memang dalam dunia terroris bergerak itu mereka juga bisa menyadap pembicaraan pembahasan-pembahasan para Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Intelijen dan lain sebagainya, kenapa? karena bisa tahu nanti langkah-langkah mereka ini baru bergerak lagi ini sekarang langkah lagi nih kita dianggap tidak lagi karena kita konsentrasi Covid 19 saya takutkan tiba-tiba lagi ada yang meledak nanti ni itu maksud saya barangkali masih butuh tidak anggaran khusus untuk itu kira-kira. Kira-kira seperti itu Pak terima kasih.

KEPALA BNPT (DR. BOY RAFLI AMAR, M.H.):

Ya, terima kasih. Jadi peran itu dilaksanakan oleh *monitoring center* kita dari Polri juga punya *monitoring center* ditentunya dari teman-teman dari BIN sendiri ada kita juga ada BSSN yang tentunya sama melakukan itu tapi tentu kita fokus masalah jaringan terorisme jadi ini masih berjalan jadi termasuk yang kita usulkan hari ini yang terangkat dalam Pusdalsis itu, sebenarnya juga bagian dari monitoring jaringan terror jadi itu yang yang kami rasa cocok dengan yang Bapak sampaikan

Tetapi yang jelas teknologi informasi ini tentu terus berkembang yang tentunya sangat dimungkin setiap 2, 3 tahun adanya aplikasi-aplikasi baru yang sangat memungkinkan bagi kita untuk melakukan penetrasi kepada pola komunikasi yang dilaksanakan oleh jaringan teror tapi untuk yang hari ini dengan pengajuan yang sementara ini Rp 100.000.000.000 kami melihat ini cukup memadai untuk saat ini untuk saat ini tetapi antisipasi ke depan dengan deteksi secara IT ini yang membuat kita memang bisa dua tiga langkah lebih cepat di depan dari kelompok jaringan teror ini karena pola komunikasi mereka kita pelajari.

Mereka sedang bergerak apa walaupun mereka ada sandi-sandi yang katakanlah baru istilah-istilah baru baik itu penggunaan email penggunaan *website* maupun penggunaan media sosial kita bisa mengikuti menelusuri jejak-jejak digital mereka maka beberapa peristiwa yang berhasil kita cegah itu sebenarnya hasil dari ya dalam istilahnya *tapping* yang kita lakukan terhadap kegiatan-kegiatan aktivitas mereka umumnya mereka sudah ada yang sadar bahwa aktivitas mereka dimonitor tetapi ada juga yang tidak sadar jadi tinggal mereka kelihatan biasanya kalau yang sudah sadar mereka merubah-merubah akun merubah istilah-istilah tetapi pada dasarnya cegah dini yang dilakukan dengan IT dapat dikatakan sudah kita lakukan sejak 15 tahun yang lalu kita sudah mulai awalnya kita belajar dari pihak negara tetangga tetapi hari ini kita sudah transfer ilmu pengetahuan dan bahkan alat-alat itu sudah sepenuhnya dioperasikan oleh kita sendiri. Jadi di kami ada yang kami ajukan ini bisa semakin memperkuat dari yang sudah ada.

Kemudian teman-teman di Aparat Penegak Hukum khususnya di Kepolisian, di Kepolisian ada unsur Densus, ada unsur Bareskrim juga melakukan cegah dini dari penelusuran IT. Jadi itu yang dapat kami sampaikan sebenarnya ini hal-hal yang tentu tidak begitu bagus untuk disampaikan tetapi itu adalah gambaran jadi kami gambaran saja hanya memang diantara mereka terutama yang pemain-pemain baru masih banyak yang belum sadar jadi mereka masih pikir apa yang mereka bicarakan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh siapapun tapi pada akhirnya beberapa kegiatan berhasil kita amankan termasuk Aparat Penegak Hukum yang melakukan penangkapan di masa tahun 2020 ini sudah lebih dari 80 itu juga hasil dari upaya-upaya penelusuran jejak mereka di IT jadi sehingga rencana mereka tidak sempurna menjadi sebuah kejahatan terror makanya ketika diamankan ada peralatan-peralatan yang kita duga bagian dari perencanaan pembuatan dari alat-alat peledak yang mereka akan gunakan.

Jadi itu adalah dari sisi IT tetapi dari sisi konvensional yang dapat dilakukan oleh masyarakat penting sekali masyarakat untuk dapat meningkatkan *public awareness* kita sehingga tidak ada ruang lagi bagi kelompok-kelompok ini karena kelompok-kelompok ini secara *klandestin* nyata mereka melakukan aktivitas sama seperti di Kalsel kalau di Kalsel itu.

F.PDI-P (ICHSAN SOELISTIO):

Ketua, Ketua, Interupsi Ketua kiri Ketua. Pak Kepala BNPT mohon mungkin ini lebih banyak ke pengawasan Pak kita anggaran dari tadi sehingga ini sudah terlalu Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Boy singkat saja yang terkait pengawasan kita fokus ke anggaran saja.

KEPALA BNPT (DR. BOY RAFLI AMAR, M.H.):

Iya, dari Bapak Ichsan Soelistio yang telah tadi menyampaikan kaitan masalah dukungan anggaran *counter terrorist financing* dan juga terkait masalah CBR, CBN. Jadi ini ke depan akan menjadi sebuah tantangan baru memang namun demikian dari sisi sarana prasarana tentu kami masih perlu melakukan kajian lebih dalam lagi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang terkait CBN dan kemudian di dalam pembahasan-pembahasan awal dalam program *capacity building*.

Sebenarnya sudah mulai menjadi hal yang kita sorot hanya memang benar dari sisi dukungan sarana teknologi untuk kaitan ini masih belum dan tentu kami menjadi catatan kami untuk bisa lebih fokus ke depan karena kita lihat bisa jadi nanti serangan terroris ini bukan yang konvensional yang seperti hari ini kita lihat hari-hari, tetapi juga ada tentunya dengan modus operandi baru berkaitan dengan masalah chemical, biologi, dan nuklir yang tentunya sangat mungkin kedepan ini untuk menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat kita. Jadi terima kasih masukan dari Pak Ichsan dan tentunya kaitan apakah ini perlu kita lakukan penyiapan sarana prasarana dengan pendekatan teknologi yang lebih canggih lagi tentu ini adalah sebuah keharusan dan tantangan bagi kami di BNPT terima kasih akan menjadi catatan kami dan akan kami pikirkan.

Berikutnya sudah hampir semua yang hadir Bapak Pimpinan jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini walaupun mungkin belum memuaskan namun demikian dengan penjelasan-penjelasan secara pribadi *insyaallah* akan kami lengkapi dan kami sangat terbuka masukan-masukan saran yang telah disampaikan tadi kami mengucapkan terima kasih. Sekian waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Boy Rafli sebelum ke Komnas HAM saya perlu mengingatkan jawabannya nanti penjelasannya nanti saya harap kita fokus pada fungsi anggaran terkait pertanyaan fungsi pengawasan hanya sekilas saja Pak. Lanjut silakan.

KETUA KOMNAS HAM (AHMAD TAUFIK DAMANIK):

Terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari seluruh Anggota Komisi III yang telah memberikan respon secara umum tentu kami sangat berterima kasih apapun yang disampaikan bagi kami itulah masukan ya dan kami terima kami cerna jadi apa kalau kami katakan vitamin lah buat Komnas HAM kami sehari-hari tentu juga mendapat *applause* dari sekelompok orang tapi juga kadang-kadang dapat caci maki dan kritik menurut kami itu hal yang biasa dan kami buktikan selama 2,5 tahun terakhir misalnya ini saya kira periode kami periode yang aman-aman ajalah 7 orang bahkan sekarang baru pergantian minggu lalu ya tidak ada tidak ada konflik saya jamin itu kalau dulu kan mobil saja berantem sekarang kita tidak ... kenapa? karena memang kita menyadari Komnas HAM ini sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan di luar negeri. Nah terkait tadi ada soal anggaran ya kenapa kok ini anggarannya kecil itu susahlah bergerak tadi menggunakan istilahnya Pak Arteria ya itu kita sadari Pak bahkan juga agak kesal sebetulnya kami ya kami harus sampaikan disini kita sudah tunjukkan dari *disclaimer* dalam 1 tahun naik jadi WDP memperbaikinya tidak gampang setahun kemudian WTP *Alhamdulillah* sakipnya naik, lakipnya naik, tukinnya naik, tapi malah anggarannya kan kalau kita lihat tadi dari 104 sekarang jadi 100 koma berapa gitu kan itu sebenarnya agak-agak sedikit paradoks ya kalau kita bilang kita tidak menjelaskan, kita menjelaskan.

Saya kasih contoh aja ya saya bertemu langsung dengan Kepala atau Menteri Bappenas yang lama ya waktu itu masih Pak Bambang saya katakan Pak ini contoh saja gitu kalau Bapak melihat HAM isu HAM contoh saja, kita ini sekarang Pak sebagai negara yang terus berkembang dinamika ekonomi politiknya disorot oleh internasional saya bilang tetapi kemampuan kita untuk mengkomunikasikan perkembangan demokrasi dan HAM di Indonesia ke internasional tu lemah karena itu yang paling banyak memberikan *statement* tentang hak asasi manusia Indonesia itu lembaga luar saya bilang karena itu izinkan saya Pak mewakili Komnas HAM untuk kami mengambil peran internasional itu saya jelaskan dengan sangat persis kepada Pak Bambang di depan Deputinya ada Direktornya.

Jadi kalau Bapak izinkan mestinya kami juga dikasih tambahan anggaran untuk kami bekerja internasional tentu bukan pemantauan kalau pemantauan Undang Undang 39 tidak membolehkan kami. Saya katakana kerja sama kami dengan Suhakam itu tidak dalam pemantauan tapi analisis situasi jadi hampir sama dengan *assessment* dibenarkan oleh undang undang. Nah kalau ada kasus nanti bisa didorong konjen kita di sana karena kita juga kerja sama dengan mereka tapi *alhamdulillah* sampai ini tidak ada Pak dengar anggarannya jadi kalau kita mau jujur kita katakan memang isu

hak asasi manusia ini ya di negara kita belum dianggap satu isu yang strategis masuk itu hak perempuan hak anak dan semacam jadi itu *problem Pak* kami tidak mengatakan bahwa kami tidak punya kontribusi terhadap masalah itu kami mengatakan kami juga punya kontribusi karena itu berarti bagian dari belum berhasilnya Komnas HAM untuk meyakinkan seluruh pihak termasuk publik jadi saya tadi katakan kenapa kami berterima kasih karena itu bagi kami adalah dorongan untuk kita meyakinkan semua pihak supaya isu hak asasi.

Contoh saja misalnya kami sudah berkali-kali mengundang Bapak Presiden di acara hari HAM Internasional di Komnas HAM belum pernah datang Pak yang datang itu masih Wakil Presiden *Alhamdulillah* juga kami tetap katakan *Alhamdulillah*. 8 rekomendasi kami beri berikan kepada Presiden melalui Wakil Presiden waktu itu Pak JK sekarang yang tahun lalu itu Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin datang kita kasih sampai hari ini juga belum dipanggil untuk mendiskusikan satu persatu itu termasuk tari isu-isu yang dianggap. Jadi memang ada persoalan Pak saya kira inilah kami sangat berharap sebetulnya peran atau dukungan Komisi III ya saya setuju Pak untuk kedepan tentu kami akan-akan bekerja sama juga dengan memberikan bahan-bahan yang mungkin bisa dikerjasamakan dengan Komisi III kami setuju tadi di luar saya sambil *break* tadi tanya sama teman-teman ini permintaannya semua sudah disampaikan beberapa kali saya kira kita tidak ada alasan lagi untuk menolak saya bilang kita harus dukung itu karena kalau tidak memang nanti Komnas HAM jalan sendiri nih tidak didukung oleh DPR ya.

Tahun lalu kami bikin Seminar Hak Asasi Manusia khusus topiknya itu *review* terhadap Undang Undang 39 di Gedung DPR waktu itu yang jadi pembicara Pak Sudding mewakili Komisi III salah satu yang kita mintakan adalah penguatan terhadap peran Komnas HAM karena contoh ya tadi ada kasus agraria kasus itu kita tangani ada tiga caranya, pertama kami melakukan pemantauan terhadap kasus, yang kedua kami melakukan pengkajian terhadap isu agraria itu,

Yang ketiga kami melakukan mediasi, tiga-tiganya dikerjakan Pak dan tiga-tiganya tentu saja ujungnya adalah rekomendasi tapi harus kita akui jujur ya kepatuhan terhadap rekomendasi itu untuk di negeri kita masih rendah dan di dalam pasal-pasal di dalam Undang Undang 39 itu memang kalau rekomendasi Komnas HAM tidak dipatuhi tidak ada sanksinya Pak itu yang tempo hari kita mencoba menawarkan satu wacana ya ini masih wacana karena kan tidak masuk di daftar legislasi yang baru ya supaya nanti satu ketika memang Undang Undang 39 itu harus di-*review* khususnya pasal mengenai kepatuhan rekomendasi gitu nanti apakah sanksinya administratif apakah sanksi lain-lain itu silakan saja tapi ini tentu masih diskusi tanpa itu menurut saya memang menurut kami maksud saya ya rekomendasi kita itu bisa tidak ada tidak ada daya tekannya gitu. Saya kasih contoh misalnya tadi kebetulan disinggung oleh Saudara-Saudara saya senior saya tadi Romo ya Romo ini saya selalu panggil Abang.

KETUA RAPAT:

Pak saya ingatkan kalau yang tidak ada di tempat tidak perlu dijawab.

KETUA KOMNAS HAM (AHMAD TAUFIK DAMANIK):

Oh iya iya Pak. Daerah Sumut itu adalah provinsi kedua yang terbanyak dilaporkan setelah DKI dan *Alhamdulillah* sekarang dengan Gubernur baru sebetulnya bulan Maret saya sudah harus kami sudah harus MoU tapi karena Covid ditunda nah langkah kita seperti tadi saya katakan salah satunya adalah mediasi meskipun belum ada MoU tapi sudah diberikan ruang sekarang oleh Gubernur sementara untuk kami menangani kasus sama-sama bersama Pemerintah Daerah juga tetapi ada beberapa kasus yang rekomendasinya tidak dijalankan bahkan ada yang tidak mau datang Pak.

Satu kasus misalnya di Sumatera Selatan itu pihak perusahaannya tidak bersedia hadir kami tidak bisa paksa mereka kalau mereka tidak bersedia hadir karena itu para pihak yang hadir disitu tidak lengkap padahal Gubernur juga sudah menghimbau supaya mereka datang ada kemajuan misalnya untuk PTPN 2 sudah bersedia hadir dengan dukungan dari Menteri BUMN jadi ada banyak kasus-kasus yang sudah mulai dan pendekatan kita yang selanjutnya adalah memang mau tidak mau mendekati Pemerintah Daerah Pak selain Kementerian, Kementerian ATR, KLHK sekarang bersama kita, BUMN sudah mulai mengirim tapi masih jajaran Direktur kita undang sebenarnya Menteri BUMN nya karena banyak dengan BUMN juga untuk kasus tanah, tambang dan lain-lain itu.

Nah untuk Kepala-Kepala Daerah belum semua Pak Kepala Daerah nah jadi kalau tadi ada pertanyaan soal Festival HAM sebetulnya Festival HAM ini bukan-bukan kegiatan kebudayaan Pak itu hanya penamaan saja ini adalah satu ajang setiap tahun dimana Kepala-Kepala Daerah seluruh Indonesia itu di undang Pemerintah Pusat juga datang Wakil-Wakilnya untuk mendiskusikan beberapa masalah-masalah strategi hak asasi manusia salah satu tentang intoleransi ah mereka-mereka *sharing* diantara mereka tahun 2 tahun

Ini adalah satu ajang setiap tahun dimana Kepala-Kepala Daerah seluruh Indonesia itu di undang Pemerintah Pusat juga datang Wakil-Wakilnya untuk mendiskusikan beberapa masalah-masalah strategi hak asasi manusia salah satu tentang intoleransi ah mereka-mereka *sharing* diantara mereka tahun 2 tahun misalnya Wonosobo punya pengalaman bagaimana mereka mengelola intoleransi itu mereka *sharing* kan itu dengan lain dan ada 20.000an peserta dari negara-negara sahabat kita termasuk Amerika Latin datang juga mereka *sharing* jadi ini sebetulnya satu kegiatan yang kita sebut festival itu ini bukan-bukan kegiatan seni budaya tapi lebih sebetulnya kegiatan dimana semua pihak terutama Kepala-Kepala Daerah untuk hadir karena penanganan atau perlindungan hak asasi manusia ini tidak mungkin hanya Pemerintah Pusat karena kasusnya itu justru banyak di daerah-daerah

Jadi sebetulnya bagian dari kita melibatkan mereka apalagi Komnas HAM di dalam apa yang kita sebut sebagai jaringan global untuk *human rights cities* namanya Pak. Jadi ini mungkin kami perlu klarifikasi kenapa kami sebut namanya Festival HAM meskipun pasti karena ada kata festival nanti ada sedikit banyak ada kegiatan-kegiatan yang berbau kesenian supaya isu HAM itu jangan dilihat terlalu-terlalu seram gitu ya jadi tapi sebetulnya yang terjadi sebetulnya *stakeholder* pertama Kepala-Kepala Daerah duduk bersama mendiskusikan pengalaman-pengalaman mereka dalam mengelola hak asasi manusia.

Tadi disungguh soal Hambra saya setuju ya saya jawab saja dari beberapa yang merespon tadi dari 12 tidak salah 12 berkas pertemuan kami di kantor Menkopolkam di Pimpin langsung oleh Pak Mahfud MD sebenarnya sudah mendekati Pak walaupun itu masih informal untuk antara Komnas HAM dan Jaksa. Berpolemik di media jadi itu selesai jadi kita akan cari solusi yang kita sebut yudisial sesuai dengan Undang Undang 26 maupun yang sekarang diusulkan oleh Pemerintah, Pemerintah Jokowi melalui Menkopolkam menyampaikan satu usulan bagaimana kalau diusulkan yang KKR kita bilang ya oke saja silakan Pemerintah membuat Undang Undang KKR itu tetapi sementara itu kami juga menawarkan beberapa solusi lain.

Ketika ini sedang bergulir tiba-tiba kita kan menyelesaikan satu perkara lagi penyelidikan itu Paniai yang Papua tapi ada komentar yang memang sebetulnya internal Komnas HAM tidak mau merespon karena ini kita debat seperti yang dulu lagi gitu tetapi kalau kita tidak memberikan *counter* ini kan sudah menyangkut ya istilah kita nama baik Komnas HAM juga kalau kalau hasil penyelidikannya dipersoalkan sedemikian rupa ini menyangkut apa nama baik Komnas HAM karena itu kita klarifikasi tapi kepada Menkopolkam kami selalu minta untuk 3 pihak ini duduk lagi mencari solusi hukum termasuk yudisial dengan Undang Undang 26 maupun yang ditawarkan oleh Bapak Presiden melalui usulan KKR yang sekarang itu sedang digodok oleh Tim Menkopolkam.

Kaitan dengan Mei, peristiwa Mei Pak saya kira kalau bisa kita apa kita bisa *recall* semua ingatan kita Komnas paling-paling keras waktu itu bicara ini hampir tiap minggu tim yang di Pimpin oleh Pak Irwasum Pak Mugiarto yang lalu dengan Pak Niko regu tim satu lagi ada dua tim itu hampir tiap minggu datang Komnas HAM pemaparan semua. Ada 2 yang paling penting, pertama adalah kami menyampaikan 5 kasus yang aktual, ada banyak lagi tapi tidak kami temukan faktanya Pak yang 5 kasus kami temukan faktanya dan kami minta supaya dilakukan tindakan atau proses hukum terhadap mereka dan itu sudah dilakukan oleh oleh pihak Polisi, Polisi Republik Indonesia.

Satu isu lagi yang kami angkat adalah meninggalnya 9 orang ya pengunjuk rasa di Jakarta dan satu di Kalimantan Barat sampai hari ini memang pelakunya belum ditemukan itu rekomendasi Komnas HAM yang belum di apa diselesaikan oleh pihak Kepolisian kita tapi itu salah satu yang rekomendasinya kami sampaikan secara terbuka bahwa kami memsoalkan 10 orang yang meninggal 9 di Jakarta ada 1 di Kalimantan Barat.

Untuk kasus Novel tadi juga karena disinggung ya saya kira kalau kita ikuti perkembangan media bahkan seorang Novel pun ketika dijadikan saksi di Pengadilan dia bawa laporan penyelidikan Komnas HAM, TGPF, yang dibentuk Kapolri tempo hari juga hasil rekomendasi Komnas HAM Pak jadi itu sebetulnya kita berani mengatakan bahwa ada kontribusi Komnas HAM untuk kemudian Kapolri dengan pengawasan Presiden waktu itu Pak Presiden bikin komentar juga di media untuk membentuk TGPF, TGPF nya kemudian melahirkan beberapa rekomendasi juga TGPF nya Kapolri itu dan itulah yang kemudian jadi langkah-langkah selanjutnya sampai sekarang ada dua terdakwa itu walaupun kami terus terang memang kecewa dengan ... tidak-tidak tidak persis sama dengan apa yang kami temukan dan kami rekomendasikan pada waktu itu tapi langkah-langkah kita cukup banyak pada waktu itu untuk kita lakukan beberapa terobosan-terobosan. Tapi satu hal yang menarik dengan Kepolisian dengan Pak Idham Azis yang jadi Kapolri sekarang ini sepakat Pak untuk merevisi MoU Komnas HAM dengan Kapolri. Dulu MoU kita itu sifatnya masih umum Pak sekarang kita lebih-lebih menyetujui beberapa poin-poin tambahan salah satunya adalah pengawasan mengenai kekerasan itu disetujui oleh Pak Kapolri.

Dan sekali lagi Covid Pak kami terpaksa menunda tetapi ada usulan sekarang setelah kami angkat 2 kasus yang di Sulawesi Tengah Saudara Qidam dan 2 anak remaja yang tertembak dan mati ya di Sulawesi Tengah itu kita bicara dengan Pak Kadensus yang baru Pak Martinus kemudian juga tim kami yang di Sulteng itu bicara dengan Kapolda di Sulteng ada dua yang disepakati, pertama melakukan penyidikan terhadap 37 Aparat Kepolisian jadi ada berita mungkin yang mengatakan seolah-olah kasusnya berhenti, tidak Pak sampai sekarang itu masih 37 orang diperiksa cukup banyak awalnya cuma 5 sekarang 37 orang memang belum bisa dipastikan apakah ada pelanggaran atau tidak karena itu nanti tergantung pada penyidikan.

Yang kedua, Kapolda Sulteng meminta kepada Komnas HAM membuat perjanjian kerja sama dan ini sedang kami proses untuk peningkatan kapasitas pemahaman hak asasi manusia terhadap tim Satgas Tinombala jadi saya kira itu juga kemajuan akhirnya teman-teman kita dari Kepolisian membuka diri untuk kemudian bersama-sama Komnas HAM membangun standar hak asasi manusia. Saya kira ini langkah-langkah Pak tapi terus terang kalau dikatakan harus lebih greget, harus lebih greget, harus lebih greget kami mengakui Pak kita setuju itu kami tentu tidak menutup diri untuk dikritik diberi masukan karena itu apalagi kalau tadi ada usulan juga untuk bersama-sama dengan Komisi III *Insyah Allah* kami akan apa lakukan itu dan kita tentu sama-sama punya niat yang-yang baik untuk meningkatkan kapasitas Komnas HAM bukan kami bertujuh tapi institusi HAM itu dan juga hak asasi manusia.

Saya kira demikian Pak, khusus untuk Pak Ichsan saya minta Pak Sekjen mengecek Pak, Bapak benar makasih banyak Pak nanti kita coba ini ada-ada penginputan yang salah Pak kami mohon maaf untuk itu tapi memang pagu indikatif yang disepakati itu Rp 100.000.000.000 lebih saja Pak kebetulan tadi salah-salah penginputan karena yang RAB yang diusulkan

diawal itu yang kemudian dimasukan jadi jumlahnya menjadi tidak sinkron Pak sekali lagi makasih Pak Ichsan kami akan-akan perbaiki ini tadi ini ke depan sudah di saya minta dari Pak Sekjen untuk mengecek ternyata Bapak cukup jeli ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas masukannya dan juga sekaligus mohon maaf atas keliruan itu tapi tadi sudah dicek memang antara pagu indikatif yang sepakati Rp 100.000.000.000 itu menurun Rp 4.000.000.000 dari yang 2020 itu ada penginputan yang salah karena dimasukkan justru RAB yang awalnya bukan yang akhirnya disetujui oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Makasih Bapak Pimpinan.

F.PDI-P (ICHSAN SOELISTIO):

Pimpinan, Pimpinan, kiri Pimpinan, melalui Pimpinan saya kebetulan jadi dikasih kerjaan sama Bapak ini saya ngitung sekali lagi Pak di halaman 5, kalau menurut halaman 5 disini Bapak tulisnya pagu alokasi 2021 Rp 100.090.000.000 tapi kalau Bapak jumlahin apa yang tertulis disini di luar Komnas Perempuan, Bapak keluarnya Rp 78.000.000.000 sekian 491 ya. Jadi kalau Komnas HAM ditambah dengan Perempuan kok keluarkan Rp 101.231.121.000 jadi tidak cocok dengan pagu alokasi Bapak ya jadi tolong diperbaiki itu juga Pak. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya Ketua LPSK kita fokus ke anggaran saja Pak ya yang lain hanya sekilas saja.

KETUA LPSK (Dr. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim.):

Ya terima kasih Pimpinan.

Bapak dan Ibu sekalian

Sayang sekali udah banyak yang meninggalkan ruang ini. *Alhamdulillah* Pak Arteria kembali lagi.

Bapak dan Ibu sekalian

Saya memaklumi kalau kemudian terkesan presentasi dari LPSK ini penuh keluh kesah karena apa karena memang acara pada hari ini adalah berkaitan dengan anggaran jadi kami cuman mau memaparkan kondisi anggaran yang riil yang terjadi di LPSK pada saat ini dan walaupun itu dianggap keluh kesah ya barangkali memang tempatnya ya kepada Anggota DPR kami harus berkeluh kesah tapi sebenarnya bukan itu niatan kami.

Bapak dan Ibu sekalian

Selain soal anggaran tadi Pak Arteria menanyakan tentang satuan 3 ya? Saya kira untuk satuan 3 untuk anggaran 2021 belum ada memang dan untuk 2020 kami sudah kirimkan ke Komisi III saya kira bisa dicek nanti. Berkaitan dengan anggaran kompensasi yang ditanyakan oleh Romo tadi

mengapa anggaran kompensasi itu masuknya ke anggaran tambahan bukan anggaran pokok yang diajukan itu karena memang Kementerian Keuangan melihat belum ada dasar hukum untuk pemberian kompensasi kepada para korban terrorisme di masa lalu ini karena masih harus menunggu pengganti PP Nomor 7 yang sampai saat ini belum ditandatangani oleh Pak Presiden. Oleh karena itu, ada komitmen dari Kementerian Keuangan nanti begitu PP ini sudah ditandatangani Presiden Kementerian Keuangan akan menyediakan anggaran untuk pembayaran kompensasi ini.

Mengenai BPJS Ibu Eva barangkali kita baru ketemu ya Bu ya, mengenai BPJS ini memang para korban yang mengajukan permohonan ke LPSK itu sebagaimana termasuk dalam prioritas LPSK tetapi sebagian lagi agak sulit ya untuk bisa masuk ke perlindungan LPSK untuk mendapatkan bantuan karena biasanya yang diajukan hanya bantuan medis itupun bantuan medis yang sudah dikeluarkan lebih dulu oleh para korban ini karena mereka mengalami cedera dan sebagainya kemudian berobat ke rumah sakit mengeluarkan sejumlah uang tertentu dan dikemudian ditagih oleh rumah sakit tapi mereka tidak mampu dan ternyata tidak di apa dibayar lagi oleh BPJS untuk beberapa jenis tindak pidana akhirnya mereka ke LPSK.

Mengenai dasar hukum atau payung hukum untuk menangani itu bagi LPSK ada Bu sudah artinya itu memang ada beberapa korban yang memang termasuk dalam prioritas LPSK dan sedapat mungkin kami mencoba mengakomodir itu tetapi ada yang sulit kami bisa akomodir karena misalnya pengobatannya sudah lewat jauh hanya tinggal membayar hutang pengobatan ke rumah sakit tapi BPJS tidak bisa membiayai itu kemudian mereka ke LPSK ya tentu yang begini kami sulit untuk bisa mengakomodir. Ini tentang apa kewenangan LPSK Bu ya jadi saya kira ini sudah diatur memang dalam Undang Undang Nomor 31, nomor ya 31 2014 yang merupakan penyempurnaan dari Undang .Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Selain soal anggaran yang kondisinya seperti saya laporkan tadi yang kemudian terkesan berkeluh-kesah beberapa isu kami sampaikan bahkan untuk isu pelanggaran HAM masa lalu kami berani mengklaim bahwa LPSK yang sudah secara riil betul-betul melakukan sesuatu bagi para korban pelanggaran HAM yang ini tentu saja ini merujuk pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh rekan-rekan dari Komnas HAM tetapi untuk kegiatan pemulihannya itu dilakukan oleh LPSK dan saya kira ini LPSK adalah satu-satunya lembaga yang sampai saat ini betul-betul melakukan upaya pemulihan pada para korban tindak pidana terroris pelanggaran HAM ini.

Tindak pidana TPPO ini LPSK juga makin lama makin banyak menangani kasus TPPO yang terakhir yang tadi juga sudah saya singgung adalah kasus ABK Kapal Cina yang di Korea diantaranya yang dibuang ke laut karena meninggal itu itu kita sudah menerima permohonan mereka untuk menjadi terlindung. Kasus-kasus kekerasan seksual terutama pada anak-anak dan perempuan yang makin lama makin meningkat itu juga kami tangani dan yang sekarang sedang mulai kita terlibat lebih banyak karena keluarnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah kasus-kasus terrorisme. Untuk kasus-kasus korupsi pada saat Pimpinan KPK baru dilantik yang baru mereka

berkunjung ke LPSK dan kita ada bersepakat bahwa perlindungan kepada saksi untuk kasus-kasus korupsi itu akan dirujuk oleh KPK kepada LPSK dengan demikian itu memang sesuai dengan yang kewenangan yang diatur dalam undang undang dan beberapa kali memang kita selalu koordinasi untuk menangani kasus-kasus terrorisme eh korupsi yang ditangani oleh KPK.

Kemudian kasus Novel ini juga cukup menjadi berita dan LPSK sebenarnya bukan tinggal diam bahkan sejak yang bersangkutan ini mengalami penyiraman kami sudah secara proaktif menawarkan perlindungan kepada yang bersangkutan dan keluarganya tapi kami kurang tahu apa pertimbangannya permohonan tidak diajukan oleh yang bersangkutan maupun keluarganya. Untuk kasus JC kita memang sedang menyiapkan Perpres ya untuk penganturan tentang penunjukan JC ini beberapa kali kita menyelenggarakan diskusi dan diantaranya kami mengundang Bapak-Bapak dan Ibu dari Komisi III untuk terlibat di dalam FGD salah satunya Pak Arteria ya di Jogja bersama Pak Benny pada waktu itu, Pak Nasir berhalangan tetapi kita coba untuk merumuskan langkah-langkah dan rumusan-rumusan yang barangkali nanti bisa menjadi masukan agar pengaturan tentang JC ini menjadi lebih konkrit karena selama ini semua rujukannya ada pada Perpres 99 ya? PP 99, sehingga semua Aparat Penegak Hukum merasa mempunyai hak atau merasa berwenang untuk menentukan seseorang menjadi JC atau tidak.

Ini yang kondisi ini yang menyulitkan LPSK bahkan Lapas melalui apa Dirjen PAS itu juga merasa bisa memberikan fasilitasi seseorang untuk menjadi JC nah ini tentu saja kekacauan yang-yang perlu kita cermati bersama saya kira Bapak dan Ibu dari Komisi III bisa mengambil peran yang lebih besar dan kami harapkan tentang JC ini kalau bisa peran LPSK ini dilembagakan secara lebih kukuh misalnya paling tidak masuk di dalam KUHP walaupun tidak disebutkan LPSK misalnya disebutkan oleh lembaga yang melakukan layanan perlindungan saksi dan korban. Itu saya kira itu akan lebih mengokohkan dan membakukan pengaturan tentang penentuan *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama ini.

Tadi disinggung juga tentang Nazaruddin ya yang kasusnya sekarang jadi kontroversi antara KPK dengan Dirjen PAS memang yang bersangkutan ada beberapa kali mengajukan permohonan pada LPSK untuk menjadi *justice collaborator* tapi pada waktu itu beberapa kali juga LPSK tidak mengabulkan untuk memberikan statusnya sebagai JC dengan pertimbangan itikad yang tidak baik dalam mengajukan permohonan jadi ini sekaligus juga melaporkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di Komisi III untuk kasus-kasus yang demikian kita sudah cukup terlibat hanya saja untuk JC ini memang karena aturannya belum terlalu jelas satu-satunya undang undang yang mengatur tentang *justice collaborator* ini adalah Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban tetapi aturan turunannya yang belum ada sehingga aturan turunannya PP 99 itu dirujuk oleh semua Aparat Penegak Hukum.

Sehingga memungkinkan terjadinya kontroversi seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan karena *moment*

ini adalah *moment* tentang anggaran sekali lagi saya mohon maaf kalau terkesana berkeluh kesah jadi kami hanya menggambarkan bahwa itulah kondisi anggaran yang ada di LPSK tentu saja ini belum menjadi apa kewajiban dari Bapak-Bapak di Komisi III karena kami *partner*-nya masih Komisi II untuk anggaran mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa menjadi Badan Anggaran sendiri yang saat ini sudah diproses mungkin akhir tahun ini bisa terlaksanaan perkembangannya nanti akan dijelaskan oleh Pak Sekjen sampai dimana perkembangan Pelembagaan LPSK sebagai Badan Anggaran sendiri. Demikian terima kasih silakan Pak Sekjen.

SEKJEN LPSK (Dr. Ir. NOOR SIDHARTA, M.H. MBA.):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Komisi III DPR yang saya hormati
Bapak Ibu Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati

Perkenankan secara singkat saya menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Mei tahun 2020 Bappenas sudah mengeluarkan persetujuan program untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai modal untuk menjadi bagian anggaran sendiri, jadi ada 2 program, yang pertama adalah program perlindungan saksi dan korban dan yang kedua adalah program *generic*-nya itu adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya LPSK. Nah berdasarkan persetujuan dari Bappenas ini kemudian Sekneg mengirimkan surat kepada Dirjen Anggaran yaitu meminta untuk penetapan nomor bagian anggaran dari Kementerian Keuangan.

Kami sebetulnya tinggal menunggu 1 *step* saja Bapak Ibu agar LPSK menjadi bagian anggaran sendiri. Kesepakatan kami dengan Setneg sebetulnya itu di semester dua awal semester dua ini seharusnya LPSK sudah bisa menjadi bagian anggaran sendiri. Kami mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu Komisi III DPR agar mimpi kami ini segera terwujud dan kami bisa lebih leluasa di dalam mengajukan program dan anggaran kepada Komisi III DPR. Saya kira itu saja Pimpinan yang bisa kami laporkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA LPSK (Dr. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim.):

Ya demikian jadi

KOMNAS PEREMPUAN (THERESIA SRI ENDRAS ISWARINI):

Pak Pimpinan.

KETUA LPSK (Dr. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim.):

Mudah-mudahan kami segera bisa menjadi sepenuhnya *partner* dari Komisi III.

KOMNAS PEREMPUAN (THERESIA SRI ENDRAS ISWARINI):

Pak izin Pak tadi saya ada kelupaan mempersilakan Komnas Perempuan yang bagian Satker kami untuk memberikan jawaban mohon izin Pak.

KETUA RAPAT:

Singkat ya Bu ya 5 menit.

KOMNAS PEREMPUAN (THERESIA SRI ENDRAS ISWARINI):

Iya, terima kasih Pak. Sebelumnya saja ingin menyampaikan terima kasih pada Pimpinan Sidang dan juga kepada seluruh Anggota Komisi III. Saya mengapresiasi sekali dukungan yang telah disampaikan ada beberapa tadi Pak Hinca Panjaitan misalnya kemudian ada Pak Arteria lalu juga ada Ibu Yuliana dan Pak Syarifuddin ya. Jadi dukungan itu sangat berarti bagi kami juga termasuk ada titipan juga soal TPPO menurut saya nitip itu artinya kerja-kerja Komnas Perempuan diakui dan itu membuat kami harus terus memperkuat mandate, peran, dan juga Kelembagaan Komnas Perempuan ke depan ini menurut saya menjadi sangat penting dan saya juga sangat berterima kasih karena ada keinginan juga dari kayaknya ya *clue-clue* juga bahwa kerja-kerja lintas sektor atau sinergitas antar lembaga itu menjadi sesuatu yang sangat penting tadi saya mendengar banyak sekali soal isu kekerasan BNPT tadi misalnya mengatakan bahwa isu-isu kekerasan terhadap perempuan itu ada di dalam isu-isu yang berkaitan dengan ekstremisme juga gitu.

Tapi ini memang membutuhkan kesanggupan kerja sektor karena seringkali kan isu-isu perempuan itu dikerdilkan ya sering kali dia pinggirkan sebegitu rupa dan juga saya menghargai apa yang dilakukan oleh Komisi III memberikan dukungan ini juga berarti menempatkan persoalan apa kekerasan terhadap perempuan itu dalam kerangka penegakan hukum HAM dan keamanan menurut saya ini menjadi sesuatu yang harus saya apresiasi betul sehingga untuk konteks anggaran pun tampaknya Komisi III cukup mendukung sangat mendukung kerja-kerja Komnas Perempuan artinya juga itu kami betul-betul harus menggunakan anggaran ini sebaik mungkin memastikan bahwa penyerapannya tinggi dan karena kami masih berada di bawah koordinasi Komnas HAM tentu kami akan terus berkoordinasi dalam hal pengelolaan anggaran ini.

Dan selain itu juga kami melihat bahwa persoalan anggaran ini kan kadang-kadang rumit bukan-bukan kadang-kadang tapi memang rumit terutama dalam konteks untuk memastikan pasca pandemi atau mungkin new normal sekarang ini kami juga membutuhkan apa cara-cara baru untuk

mengelola anggaran sehingga penyerapannya tetap bisa terjaga. Untuk isu lain kekerasan terhadap perempuan itu kompleks dan kadang-kadang posisi kami Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM kami adalah lembaga independen untuk mengecek atau memonitor kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu masih seringkali dipahami sehingga kami juga ingin meminta dukungan dari Komisi III agar tata kelola apa negara memberikan perhatian yang lebih kuat pada peran NHRI itu termasuk dalam memastikan independensi Komnas Perempuan menurut saya itu menjadi sangat penting karena kami sekarang sedang berusaha melakukan kerja-kerja penguatan kelembagaan dan penguatan kelembagaan itu sangat berkaitan erat dengan kemandiriannya Komnas Perempuan. Bapak dan Ibu mengetahui bahwa kami masih berada di bawah koordinasi Komnas HAM sehingga kami berpikir bahwa ke depan harus ada upaya lebih untuk membuat Lembaga HAM Perempuan ini menjadi lebih independen dan mandiri.

Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dikatakan oleh Komisi III rentang kerja kami itu memang betul ke depan harus ada upaya lebih untuk membuat Lembaga HAM Perempuan ini menjadi lebih independen dan mandiri.

Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dikatakan oleh Komisi III rentang kerja kami itu memang betul-betul besar ya jadi seluruh Indonesia dengan anggaran yang menurut Pak Arteria tadi lumayan efektif dan efisien ya dari 22, 23 yang kita anggarkan miliar kita bisa mengelola Rp 10.000.000.000 untuk kerja-kerja besar seperti itu saya pikir dalam konteks ke depan postur anggaran ini mungkin bisa di diperhitungkan bisa dipertimbangkan kembali untuk melihat seluruh postur anggaran itu sesuai dengan kerja Komnas Perempuan yang di seluruh Indonesia sehingga menurut saya memang penting penguatan Kelembagaan Komnas Perempuan ini juga turut didukung oleh Komisi III dan kami sangat berharap bahwa Komisi III bisa mempertimbangkan kemandirian ini sebagai bentuk dari proses pengawasan ke depan untuk HAM Perempuan di Indonesia. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Ibu Terima kasih.

Bapak Ibu hadirin peserta rapat yang berbahagia.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.H., S.T., M.H.):

Ketua, Ketua, Ketua, Ketua sedikit Ketua, sedikit, sedikit.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar, saya lanjutkan dulu sebentar. Kita tadi telah mendengarkan paparan dan penjelasan dari Kepala BNPT, Ketua Komnas HAM dan Ketua LPSK. Sebelum saya membacakan kesimpulan usulan anggaran BNPT, Komnas HAM, dan LPSK saya akan memberikan

kesempatan kepada rekan kita Fraksi Fraksi PKS tadi belum menyampaikan pertanyaan atau masukan sebelum ke PKS saya berikan kesempatan singkat kepada Pak Arteria.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.H., S.T., M.H.):

Terima kasih Ketua.

Saya ke Komnas Perempuan, Komnas HAM, LPSK sama BNPT. Kenapa apa kita tadi agak keras karena saya pikir Bapak Ibu semua ini tidak kreatif dan tidak inovatif anggarannya sedikit kalau anggarannya sedikit caranya yang paling efektif apa kita numpang Pak kami-kami ini punya jaringan di kabupaten kota masing-masing minimal punya Bupati.

Walikota minimal punya Gubernur yang sulit-sulit seperti itu dikawinkan programnya Pak Sekjen saya bener ngomong Pak Sekjen kan LPSK ini bertanya kurang seksinya ada isu yang menarik tuh yang kemarin MN yang kemarin yang Bapak baru sebut jawabannya ada dijawab Bapak LPSK berkali-kali apa dia berkali-kali mohon tapi apa LPSK mengatakan tidak bisa jadi tidak ada lagi perdebatan Kumham sama itu Pak. Nah yang kayak gitu isu-isu itu hadir setiap saat di LPSK dan mudah-mudahan bisa kedepan bisa lebih menempatkan apa biar bisa seksi Pak kelihatan dan dibutuhkan, KPK kan biasa-biasa saja tapi dia bisa tampil seksi sehingga orang jadi dibutuhkan dan memperhatikan dia.

Nah kemudian yang kembali lagi jadi ini kan namanya kalau istilahnya ada UMKM ini namanya mitra kita yang UMKM ya Pak Ichsan ya yang anggarannya kecil-kecil lah kalau anggaran kecil-kecil ini kami mohon sekali agar bisa efektif bagaimana koordinasi BNPT dengan Densus dihadirkan lagi oh kurang sama mana lagi kita hadirkan cerita-cerita itu yang ingin kita lihat kerja sama antar lembaga sinergitas jadi tidak hanya mengandalkan uang kami terbatas ya program kami itu-itu saja sama Komnas Perempuan kebetulan saya itu Mbak.

Jadi nanti kalau bisa nanti saya membuka diri lah semua Bupati-Bupati yang di Dapil saya itu nanti saya akseskan ke Komnas Perempuan, Mbak hanya datang kita yang siapin acara mungkin bisa syukur-syukur Mbak bawa dana juga itu loh ini suatu bentuk jadinya apa anggaran yang harusnya dikeluarkan tidak perlu Mbak keluarkan karena memang di Kementerian di Pemerintah daerah sudah ada nomenklatur anggaran untuk mengadakan hal seperti itu jadi lebih terukur daerahnya juga lebih terukur teman-teman disini juga lebih diringankan dalam konteks anggaran. Mungkin itu saja Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Nasir Djamil.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Ketua yang baik hati Dr. Pangeran Khairul Saleh kalau disingkat PKS dan juga Dr. Adies Kadir
Bapak Ibu Anggota dan Mitra Kerja yang kami hormati
Ketua Rapat yang saya hormati

Mencermati dan mendengar apa yang disampaikan oleh BNPT kemudian juga Komnas HAM dan juga LPSK maka Komisi III barangkali perlu memikirkan ulang terkait dengan kehadiran lembaga-lembaga penunjang negara seperti yang ada dihadapan kita karena Ketua gejala umum yang dihadapi oleh negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga seperti ini itu ada 3 *problem* pertama, pertama mekanisme akuntabilitas, yang kedua struktur mereka dalam ketataan negara, kemudian pola hubungan kerja mereka dengan pembentuk undang undang juga dengan pemegang kuasa Pemerintahan dan pemegang kekuasaan Kehakiman.

Jadi Pak Pangeran Khairul Saleh, Barangkali Komisi III perlu mengambil inisiatif untuk mengkritisi lembaga-lembaga ini ya karena tadi ada gejala umum yang dihadapi oleh negara-negara yang membuat lembaga-lembaga seperti ini kita dulu berharap karena proses demokrasi lembaga ini memang muncul untuk mengimbangi ya mengimbangi dan kemudian menangkap aspirasi warga tapi dalam kenyataannya memang bukan berarti kita katakan mereka tidak bekerja tapi kemudian harapan masyarakat sepertinya belum bisa kesampaian nah karena itu dalam kesempatan ini Fraksi PKS meminta kepada Pimpinan Komisi III untuk kemudian mengambil inisiatif agar suatu waktu kita mengevaluasi kedudukan lembaga-lembaga penunjang negara yang beririsan dengan Komisi III ya jadi apa bagaimana pola hubungan kerja mereka dengan pemegang kekuasaan pembentuk undang undang dengan pemegang kekuasaan Pemerintahan dan pemegang kekuasaan kehakiman kemudian tidak rancu ya.

Contoh misalnya tanggal 30 Maret LPSK mengirim surat kepada para terlindung ya yang-yang isi surat itu artinya ya tidak bisa membayar kompensasi ya bantuan-bantuan kepada korban terrorisme ya di tahun 2019 seharusnya sudah dibayar tapi karena ada *problem* ke anggaran dan lain sebagainya akhirnya tertunda dan akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini 2020 sudah bulan Juni sebentar lagi Desember lalu tadi ada pernyataan menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah dan Persetujuan Menteri Keuangan lalu kemudian kita baca berita ya Pak Wiranto yang terhormat sedang menunggu kompensasi ya Rp 69.000.000. Jadi lpsk begitu cepat dan tanggap dengan Pak Wiranto dengan segala hormat saya sebutkan Beliau tapi dengan orang-orang yang sudah lama menunggu LPSK sepertinya kurang tanggap jadi ini *problem* menurut saya yang harus kita atasi kedepan ya belum lagi misalnya bagaimana BNPT dengan Undang Undang 5 Tahun 2018 sebenarnya dulu keinginan kami sebagai pembentuk undang undang saya ikut didalamnya ada beberapa Anggota Komisi III ikut didalamnya BNPT itu bisa memetakan daerah-daerah apakah dia hijau, apakah dia merah,

apakah dia hitam kemudian bekerja sama dengan Institusi Pemerintah lainnya berusaha mengatasi dan mengubah warna-warna itu sehingga kemudian kita tahu ketika ada kejadian lalu kita bisa memetakan nah *problem*-nya memang kita tidak punya seperti itu.

Nah karena itu saya sangat tersanjung ketika Pak Boy Rafli ya buat *paper* ini di sini ada BNPT di sini ada DPR baru kali ini saya selama saya di Komisi III sudah hampir 3 periode, baru kali ini BNPT membuat ada logo DPR dan ada logo BNPT jangan-jangan ini maksudnya agar kita lebih bisa banyak punya inisiatif dengan BNPT untuk kemudian bisa bekerja di lapangan ya dalam arti kita bisa berkolaborasi Pak Boy ya bagaimana kita mengikis paham-paham radikalisme yang menjurus kepada terorisme tersebut dan saya mengharapkan kepada BNPT ketika membentuk forum komunikasi ya yang ada di daerah itu dikomunikasikan juga dengan Anggota DPR RI khususnya Komisi III yang ada di Dapil itu kadang-kadang BNPT memilih orang yang intelek tapi tidak melek ya saya perhatikan itu, itu intelek memang dia intelek tapi tidak melek ya dia tidak punya jaringan ya tidak punya jaringan dia sama sekali sehingga forum itu mati suri ya nampak ketika ada kegiatan setelah itu sudah hilang.

Nah karena itu sekali lagi inilah harapan kami kepada Pimpinan Komisi III mudah-mudahan sekali lagi mari ya kita evaluasi secara kritis lembaga-lembaga ekstra atau lembaga-lembaga penunjang negara ini sehingga ke depan alokasi anggaran yang kita berikan kepada lembaga-lembaga ini bisa berdaya guna dan kemudian bisa mencapai apa yang diharapkan oleh negara. Barangkali itu banyak diantara catatan kami ya terkait masalah ini dan mudah-mudahan saja beberapa harapan terkait dengan anggaran-anggaran yang disampaikan oleh BNPT kemudian Komnas HAM baik Komnas Perempuan dan juga LPSK kita bisa coba untuk memperjuangkannya kami beberapa Anggota Banggar yang ada Komisi III termasuk saya mudah-mudahan bisa merealisasikan harapan BNPT, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK. Terima kasih Pak PKS, Pak Pangeran Khairul Saleh.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KEPALA BNPT (DR. BOY RAFLI AMAR, M.H.)::

Maaf Pimpinan bisa saya klarifikasi sedikit dari Pak Nasir Djamil ini tadi saya kira ada yang perlu saya klarifikasikan kami klarifikasi.

KETUA RAPAT:

Pak nanti di *closing statement* saja.

KEPALA BNPT (DR. BOY RAFLI AMAR, M.H.)::

Oh oke.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan Pak Adies Kadir mungkin ada yang ingin disampaikan.

F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Terima kasih Pimpinan Rapat yang sangat bijaksana hari ini.

Bapak Ibu Komisi III yang kami hormati
Para Mitra Kerja BNPT, Komnas HAM, LPSK, dan ada juga Komnas Perempuan yang kami hormati

Pertama sedikit saya tambahkan untuk BNPT Pak Rafli kami menaruh harapan besar kepada Bapak untuk menjalankan roda BNPT ini kami Komisi III tidak ingin kedepan BNPT hanya terkesan sibuk dengan sosialisasi dan kunjungan-kunjungan studi banding ke luar negeri yang menghabiskan anggaran tetapi apa yang disampaikan Saudara Nasir Djamil tadi ini kami berharap besar bisa direalisasikan dengan demikian kita mengetahui dengan persis dimana daerah-daerah yang betul-betul hitam, merah, hijau, kuning, dengan cepat dan paling tidak dapat mengantisipasi gejala-gejala yang sudah di muncul di negara kita mudah-mudahan di bawah Pak Rafli ini bisa terealisasikan dan terkait dengan anggaran tentunya dibarengi dengan kinerja kalau kinerjanya luar biasa tentunya di Komisi III juga dan Pemerintah tentunya kita akan menekankan agar supaya bisa dipenuhi untuk membantu kerja-kerja daripada BNPT ini.

Kemudian Komnas HAM ini tambahannya juga cukup lumayan tapi kami menghimbau Pak Komnas HAM jangan cuman pas rapat anggaran saja Bapak mau datang Komisi III itu Pak. Menurut catatan saya sebagai Pimpinan bolak-balik kita minta rapat sampai 3 kali kalau tidak salah tidak pernah Bapak hadir dengan alasan kegiatan ini kegiatan itu sampai terakhir itu kita juga bilang ya sudahlah kita tidak usah rapat saja sama Komnas HAM itu. Bagaimana kami bisa mengkritisi dan berbicara dari hati ke hati kalau ini tidak spesifik kita berbicara tentang pengawasan dan program-program kerja kita hanya berbicara mengenai anggaran jadi kami berharap mungkin kedepan kalau kita ngundang dalam rangka ingin tahu program kerjanya Komnas HAM 1 tahun kedepan bagaimana program-program pengawasan terkait dengan Komnas HAM masa lampau, terkini, dan yang telah muncul akhir-akhir ini itu bisa kita koordinasikan dengan baik jadi bukan hanya muncul pada saat hadir diundang Komisi III pada saat mau rapat pembahasan anggaran tiba-tiba minta tambah anggaran padahal kita tidak tahu juga kerjanya seperti apa wajar saja kalau beberapa kawan tadi agak keras karena memang mungkin rindu dengan Bapak-Bapak semua.

Kemudian di LPSK tadi terkesan saya mendengar Bapak sampaikan LPSK kerjanya sudah baik sudah bagus sehingga pantaslah untuk anggaran ditambah karena tidak ada lagi hal yang perlu diragukan tapi di masyarakat itu Pak kebalikan yang kami lihat banyak sekali korban-korban saksi-saksi yang tidak tersentuh oleh LPSK. Contoh kasus Nenek Minah yang di Banyumas dihukum 3 bulan saya tidak tahu apa yang dilakukan LPSK,

kemudian di Dapilnya Pak Hinca ini di Simalungun Kakek Samirin dihukum 10 bulan karena getah yang nilainya Rp 17.000 ya Pak ya, apa yang dilakukan LPSK, belum lagi korban-korban Asuransi Jiwasraya, kemudian Koperasi Indosurya apa yang dilakukan LPSK yang katanya sudah baik kerjanya dan minta pantas untuk ditambah anggarannya. Belum lagi korban-korban anak dan perempuan- perempuan yang masuk di panti-panti yang ada di Bogor itu yang menjadi korban perkosaan sampai punya anak akibat berhubungan sama pengelolanya ya waktu di Komnas HAM dulu ya Bu ya kita itu sampai sekarang apa kerjanya LPSK itu korban-korban begini kok tidak tahu terus tiba-tiba datang kami paling baik, kami kerja baik, kami minta anggaran. Ditunjukkan dulu Bapak-Bapak kerjanya mungkin baru kita bisa ngomong kerjanya baik ini dan itu segala macam. Itu saja Pimpinan dari kami. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Adies Kadir saya akan bacakan kesimpulan usulan anggaran.

1. Kepala BNPT memaparkan pagu indikatif tahun 2021 yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 515.919.444.000 beserta usulan tambahan yang diajukan sebesar.

F-PG (Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum):

Izin Pimpinan mungkin bukan kesimpulan, catatan Pak ya.

KETUA RAPAT:

Oke catatan maaf. Saya lanjutkan beserta usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp 361.602.246.000 sehingga menjadi Rp 877.521.690.000, Betul Pak Boy.

2. Ketua Komnas HAM memaparkan pagu indikatif tahun 2021 yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan besar Rp 100.090.000.000 beserta usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp 361.162.820.000 sehingga menjadi Rp 461.552.820.000.
3. Ketua LPSK memaparkan pagu indikatif tahun 2021 yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 79.417.515.000 beserta usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp 83.729.000.000 sehingga menjadi Rp 163.146.515.000. Betul ya Pak ya?

Dari hasil pembahasan anggaran ini akan kami bawa dalam rapat internal Komisi III DPR RI dan keputusan hasil rapat internal tersebut akan kami sampaikan ke Badan Anggaran secara tertulis dan untuk sinkronisasi.

Bapak Ibu hadirin yang berbahagia

Dengan telah selesainya pembicaraan seluruh materi rapat pada hari ini maka selesai sudah rangkaian Rapat Dengar Pendapat secara fisik dan *virtual* pada hari ini. Sebelum Rapat Dengar Pendapat ini ditutup kami

persilakan kepada Kepala BNPT, Ketua Komnas HAM, dan Ketua LPSK untuk secara bergantian memberikan *closing statement* 2 menit silakan.

KEPALA BNPT (Dr. BOY RAFLI AMAR, M.H.):

Terima kasih Pimpinan. Pada kesempatan hari ini saya Kepala BNPT Boy Rafli Amar bersama dengan Deputi 1 Mayor Jenderal TNI Hendri Paruhuman Lubis hadir, Inspektur Jenderal Budiono Sandi selaku Deputi 2, kemudian Deputi 3 Bidang Kerja Sama Internasional Andhika Chrisnayudhanto beserta Direktur Gakkum Brigjen Polisi Edi Hartono, Direktur Pencegahan Brigjen Polisi Hamli, Direktur Deradikalisasi Prof. Dr. Irfan dan Kepala Biro Perencanaan Saudara Bambang mengucapkan terima kasih atas pertemuan pada pagi siang hari ini sejumlah catatan, masukan, kritik, terhadap kami memang tentunya menjadi suatu hal masukan yang menurut hemat kami akan kami bicarakan lebih lanjut pertama dari sisi efisiensi anggaran, program-program yang mungkin dapat kami sampaikan disini kami luruskan kembali termasuk istilah nomenklatur yang tadi disarankan kami sepakat bahwa penanggulangan terorisme ini kejahatan terorisme ini tidaklah berkaitan dengan identik kaitan dengan agama tertentu tetapi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang di antara mereka terkadang mengatasnamakan agama.

Selanjutnya kerja sama dengan DPR RI tentu sangat kami harapkan termasuk BNPT RI juga pernah siap menerima kunjungan Ibu Bapak semuanya yang beberapa hari lalu berapa bulan lalu sempat diagendakan untuk melihat fasilitas kami di Sentul andaikan itu nanti direncanakan kembali kami dengan senang hati untuk menerima Ibu Bapak sekalian di kantor kami di BNPT Sentul. Terima kasih atas pertemuan hari ini kami akhiri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA KOMNAS HAM (AHMAD TAUFIK DAMANIK):

Terima kasih.

Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI yang kami banggakan

Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih nama 7 Komisioner yang seluruhnya hadir pada RDP kali ini dan juga Pak Sekjen Staf kami yang karena keterbatasan ruangan ada di atas tapi tim kami cukup lengkap Pak dari mulai Komisioner, Sekjen, Kepala Biro semua hadir dengan beberapa staf itu sebetulnya tanda bahwa kami menganggap kerja sama dengan atau kemitraan dengan Komisi III sebagai sesuatu yang serius. Mungkin tempo hari ada *miss* informasi kalau itu dianggap sebagai sebuah kesalahan kami mohon maaf tapi memang ada beberapa kali perubahan yang kemudian pada undangan yang terakhir misalnya saya sudah berjanji dengan Gubernur Sumatera Utara waktu itu untuk mendiskusikan soal beberapa pelanggaran HAM di sana sehingga mungkin agak ada kesulitan sehingga kami minta perubahan tapi kami menyadari itu sebagai suatu yang harus kami perbaiki

depan tapi kehadiran kami pada kesempatan ini dengan tim yang lengkap itu pertanda bahwa kita memang sangat berharap kerja sama dukungan dari Komisi III.

Kemarin kami juga mengirim surat kepada Pimpinan DPR dan ada tembusan kepada Komisi III terkait masukkan kami untuk Perpres Pak dan itupun kami sampaikan kepada Komisi III juga Komisi I waktu itu sekaligus juga terutama tujuan utamanya kepada Pimpinan DPR dalam hal ini Ketua dan Wakil Ketua DPR masukan kami Perpres ya ini sekaligus harapan kami untuk yang kedepan juga kami akan sampaikan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang selama ini kami sampaikan langsung pada Bapak Presiden mungkin nanti juga ada *copy* yang akan kami sampaikan kepada DPR RI.

Sebelum saya tutup Pak ada pesan ini dari rekan-rekan KomPer ya tadi belum tercatat katanya ada tambahan dari KP sebesar Rp 4.500.000.000 yang belum dimasukkan dalam catatan Pak tapi ini segera setelah ini ajalah disampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Pimpinan rekan-rekan Bapak-Bapak Ibu-Ibu Anggota Komisi III atas semua masukan kami yang-*yang* *applause* yang kritik segala macam kami anggap semua sebagai masukan buat kemajuan dari Komnas HAM untuk periode kami yang kedua 2,5 tahun yang kedua. Sekali lagi makasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA LPSK (Dr. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim.):

Ya. Terima kasih Pimpinan.

Bapak dan Ibu yang terhormat
Para Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas semua masukan berupa kritik dan sebagainya dan juga dukungan sehingga kami yang sedang berproses untuk menjadi Badan Anggaran sendiri ini mudah-mudahan konsentrasi ini bisa kita lewati sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kami bisa menjadi Badan Anggaran sendiri dan menjadi mitra sepenuhnya dari Komisi III. Ada beberapa catatan yang tadi disampaikan diantaranya dari Pak Adies Kadir kehadiran LPSK tentu saja akan sulit bisa mengintervensi kasus-kasus yang terjadi di seluruh Indonesia.

Yang pertama tindak kejahatan itu menurut data yang ada di BPS ada 48.000 dalam satu tahun kasus kejahatan di seluruh Indonesia dan tentu saja itu kita sulit untuk bisa meng-*cover* semua korban maupun saksi di kasus-kasus tindak kejahatan nah berkaitan dengan kasus nenek-nenek yang di Banyumas dan sebagainya ini menurut kami memang bukan kewenangan LPSK karena Beliau berstatus sebagai tersangka dan kemudian menjadi terdakwa ini yang saya kira perlu klarifikasi barangkali ada lembaga lain mungkin Komnas HAM ya lebih berwenang untuk mengatasi itu atau kemungkinan Ombudsman yang bisa mengintervensi keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian misalnya dari sisi kebijakan publiknya.

Kemudian Pak Nasir Djamil kami tidak merasa menulis surat kepada para korban tindak pidana terorisme untuk menghentikan layanan jadi nanti barangkali ada informasi kami bisa apa minta informasi lebih lanjut. Tentang layanan kami kepada para korban tindak pidana terorisme dulunya memang kami mengalami kesulitan yang luar biasa karena apa? tindak pidana terorisme terutama terorisme di masa lalu itu sudah tidak lagi bisa ditemukan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan adalah korban tindak pidana terorisme, misalnya data di Kepolisian ternyata tidak lengkap tidak bisa lagi dirujuk apakah yang bersangkutan memang tindak pidana terorisme atau bukan, kemudian data di rumah sakit itu sudah dimusnahkan itu kesulitan LPSK melayani para korban tindak pidana terorisme di masa lalu. Tapi kemudian kami mempunyai pengalaman yang menarik dengan Kapolda Bali pada waktu itu dan Kapolda Bali

Bukti bahwa yang bersangkutan adalah korban tindak pidana terorisme, misalnya data di Kepolisian ternyata tidak lengkap tidak bisa lagi dirujuk apakah yang bersangkutan memang tindak pidana terorisme atau bukan, kemudian data di rumah sakit itu sudah dimusnahkan itu kesulitan LPSK melayani para korban tindak pidana terorisme di masa lalu. Tapi kemudian kami mempunyai pengalaman yang menarik dengan Kapolda Bali pada waktu itu dan Kapolda Bali kemudian mengeluarkan pokoknya dia korban dan itu dinyatakan oleh Kapolda sehingga kami bisa memberikan layanan dan termasuk apa upaya Pak Nasir Djamil untuk mengupayakan apa bahwa para korban ini patut ditetapkan sebagai korban dan akhirnya kemudian muncul Undang Undang Nomor 5 2018 yang lebih membakukan bagaimana seorang korban itu bisa ditetapkan melalui BNPT misalnya itu yang kemudian terjadi dan LPSK bisa memberikan layanan kepada para korban secara lebih baik.

Mengenai kasus Pak Wiranto sebenarnya ini LPSK ini menjalankan Undang Undang saja Pak jadi di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 dinyatakan bahwa LPSK wajib memberikan bantuan kepada para korban tindak pidana terorisme sesaat setelah kejadian itu terjadi. Jadi ketika terjadi tindak pidana terorisme di Tangerang kebetulannya korbannya Pak Wiranto yang kami datang duluan itu sebenarnya adalah Pak Kapolseknya tapi karena Pak Wiranto ini tentu saja lebih menarik perhatian publik dan media itu yang kemudian di ekspos. Tapi dalam komunikasi kami dengan Pak Wiranto, Pak Wiranto itu juga menyatakan saya tidak mau untuk minta kompensasi tapi kami juga bersikeras ini kewajiban kami Pak memfasilitasi kompensasi karena bahkan kalau misalnya seorang korban itu tidak mengajukan kompensasi di dalam undang undang itu disebutkan LPSK harus mengajukan jadi kami hanya menjalankan undang undang dan ini kami jelaskan juga kepada Pak Wiranto tapi saya kira kita perlu menjelaskan juga kepada publik bahwa ini bukan soal Pak Wiranto dan kami menyampaikan yang lain tidak sama sekali tidak.

Berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Arteria kerja sama dengan Pemerintah Daerah sudah kami coba lakukan beberapa memang berhasil tapi beberapa menjalani jalan buntu dalam artian begini bantuan

kepada para korban di Pemerintah Daerah itu ternyata tidak ada mata anggarannya jadi itu kesulitan Kepala Daerah untuk bisa berkoordinasi dan berkontribusi dengan kami karena tidak adanya mata anggaran yang khusus menyebutkan untuk para korban tindak pidana akhirnya mengakali pakai.

KETUA RAPAT:

Satu menit lagi Pak ya.

KETUA LPSK (Dr. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim.):

Oh ya. Memakai anggaran untuk orang miskin padahal menurut kami kan korban itu harus dikenali tetap sebagai korban bukan sebagai orang miskin. Oleh karena itu, saya dan kami LPSK barangkali mengusulkan lewat Komisi III ini mungkin bisa di dorong agar ada anggaran di tingkat nasional yang secara eksplisit memberikan perhatian negara kepada para korban tindak pidana sehingga nanti di Pemerintah Daerah itu bisa menjadi rujukan untuk membuat anggaran APBD-nya yang menyebutkan secara eksplisit perhatian kepada para korban tindak pidana. Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak Ibu peserta rapat yang berbahagia

Demikianlah rapat pada hari ini saya nyatakan selesai dan ditutup terima kasih atas segala perhatian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 16.25 WIB)

Jakarta, 23 Juni 2020
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001